



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja, Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purbalingga, 25 Maret 2019

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



Ir. SEFIYADI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19611007 198903 1 006



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, kami panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga disusun sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

Purbalingga, Maret 2019

Pt. **BUPATI PURBALINGGA**

WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga	2
	C. Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah	8
	D. Kepegawaian	11
	E. Isu Strategis	12
	F. Sistematika	15
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	17
	A. Visi	17
	B. Misi	17
	C. Tujuan	18
	D. Indikator Kinerja Utama	20
	E. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	22
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	26
	A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga	26
	B. Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga	29
	C. Realisasi Indikator Kinerja Utama	30
	F. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	32
	D. Akuntabilitas Keuangan	186
BAB IV	PENUTUP	199
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administratif menurut Kecamatan, Desa/ Kelurahan, RW dan RT	2
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Purbalingga pada tahun 2018	4
Table 1.3	Prosentase penduduk Kabupaten Purbalingga menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2018	5
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga	6
Tabel 1.5	Nilai IPM Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun 2015 - 2017	8
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purbalingga	21
Tabel 2.2	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017	23
Table 3.1	Komponen Penilaian Indeks RB	28
Tabel 3.2	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017	31
Tabel 3.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah	34
Tabel 3.5	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	35
Tabel 3.6	Rekomendasi atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018	36
Tabel 3.7	Indeks Pelayanan Publik Tahun 2018 pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	37
Tabel 3.8	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.....	38
Tabel 3.9	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	41
Tabel 3.10	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tingkat Nasional	43
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Paham Kebangsaan	46
Tabel 3.12	Daftar Pemilih yang menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018	47
Tabel 3.13	Hasil Rekapitulasi Pengembalian C6 KWK yang Tidak Terdistribusi Dalam Wilayah Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018	49
Tabel 3.14	Rekapitulasi Pemilih Disabilitas Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga.	50



Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Perda dan Perbup	53
Table 3.16	Data Penegakan Perda dan Perkada Kurun Waktu 2015-2018	55
Tabel 3.17	Capaian Sasaran Terwujudnya Rasa Aman dan Tenang Dalam Masyarakat	57
Table 3.18	Data Kriminalitas Purbalingga.....	58
Table 3.19	Data Kejadian Kriminalitas Per Kecamatan	59
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Sasaran Tertanganinya Korban Bencana	61
Tabel 3.21	Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Purbalingga	62
Tabel 3.22	Kejadian Bencana Alam Tahun 2018	64
Tabel 3.23	Bantuan Bencana Alam Tahun 2018	65
Tabel 3.24	Realisasi Korban Bencana Alam Yang Tertangani	67
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan	71
Tabel 3.26	Produktifitas Pertanian	71
Tabel 3.27	Rekapitulasi Produksi Ternak	72
Tabel 3.28	Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.....	73
Tabel 3.29	Kebutuhan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018	73
Tabel 3.30	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 ...	76
Tabel 3.31	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	78
Table 3.32	Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	79
Tabel 3.33	Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan Rumah	81
Tabel 3.34	Kepemilikan Rumah	81
Tabel 3.35	Data Perumahan	82
Tabel 3.36	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	84
Tabel 3.37	Rata- rata Lama Sekolah	85
Tabel 3.38	Jumlah Penduduk Usia 7-16 Tahun Yang Tidak Bersekolah per Kecamatan	85
Table 3.39	Rata-Rata Lama Sekolah Eks Karsidenan Banyumas	86
Tabel 3.40	Harapan Lama Sekolah	87
Tabel 3.41	APK dan APM Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2018	88
Tabel 3.42	Besaran BOS SD dan SMP (ribu rupiah), jumlah SD dan SMP	89
Table 3.43	Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs	90
Tabel 3.44	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Purbalingga	90



Tabel 3.45	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	92
Tabel 3.46	Rasio Dokter	97
Tabel 3.47	Layanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga	100
Tabel 3.48	Peserta Jaminan Kesehatan	101
Tabel 3.49	Kasus Demam Berdarah Dengue	106
Tabel 3.50	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	107
Tabel 3.51	Data Keluarga Tahun 2018	109
Tabel 3.52	Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	113
Tabel 3.53	Capaian sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi, Berkurangnya Angka Pengangguran, Serta Terkendalinya Angka Inflasi	117
Table 3.54	Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten Purbalingga Tahun 2018	118
Tabel 3.55	Jumlah Pencari Kerja dan Penempatan Kabupaten Purbalingga	121
Tabel 3.56	Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	122
Tabel 3.57	Capaian indikator laju inflasi	126
Tabel 3.58	Capaian indikator angka kemiskina kabupaten purbalingga	130
Table 3.59	Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan dan Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 – 2018	131
Tabel 3.60	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	137
Tabel 3.61	Lokasi Kumuh Kabupaten Purbalingga	138
Table 3.62	Lokasi Kawasan Kumuh	138
Tabel 3.63	Perkembangan Luasan Kawasan Kumuh	139
Tabel 3.64	Data Baseline KOTAKU 2017	140
Table 3.65	Data Hasil Inventarisasi Investasi Kegiatan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Lingkungan 2016–2018 Permukiman Kumuh Kawasan Kandangampang	142
Table 3.66	Data Hasil Inventarisasi Investasi Kegiatan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Lingkungan 2016–2018 Permukiman Kumuh Kawasan Kembaran Kulon	143
Table 3.67	Data Hasil Inventarisasi Investasi Kegiatan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Lingkungan 2016–2018 Permukiman Kumuh Kawasan Purbalingga Wetan	143



Table 3.68	Data Hasil Inventarisasi Investasi Kegiatan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Lingkungan 2016–2018 Permukiman Kumuh Kawasan Purbalingga Kidul	144
Table 3.69	Data Hasil Inventarisasi Investasi Kegiatan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Lingkungan 2016–2018 Permukiman Kumuh Kawasan Purbalingga Lor	144
Tabel 3.70	Desa/ Kelurahan Potensi Kumuh	145
Tabel 3.71	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Desa	147
Tabel 3.72	Data Indeks Desa Membangun Kabupaten Purbalingga	148
Tabel 3.73	Status Perkembangan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2018	148
Tabel 3.74	Desa Tertinggal Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018	149
Tabel 3.75	Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaannya Air Permukaan Untuk Pertanian pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	157
Tabel 3.76	Cakupan Air Irigasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2018	158
Tabel 3.77	Kondisi Bangunan Irigasi Kewenangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018	159
Tabel 3.78	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	164
Tabel 3.79	Permohon Rekomendasi / Informasi Kesesuaian Tata Ruang Tahun 2018	165
Tabel 3.80	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	169
Tabel 3.81	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan konektifitas wilayah	169
Table 3.82	Panjang jalan di Kabupaten Purbalingga	169
Tabel 3.83	Lajur Jalan Minimal 5,5 meter	171
Tabel 3.84	Jaringan Jalan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Lebar Lebih Dari 5,5 Meter	171
Tabel 3.85	Panjang Jembatan Tahun 2018	173
Tabel 3.86	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Air Bersih	176
Table 3.87	Pamsimas	177
Table 3.88	Hibah Air Minum Pedesaan	178
Table 3.89	SIPAS	178
Tabel 3.90	Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	180
Tabel 3.91	Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Purbalingga	181
Tabel 3.92	Realisasi Anggaran	186



Tabel 3.93 Analisis Efisiensi per Misi Tahun 2018 196



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga	3
Gambar 1.2	SIM Kepegawaian Kabupaten Purbalingga.....	12
Gambar 3.1	Hasil PMPRB Kabupaten Purbalingga	28
Gambar 3.2	Industri bulu mata dan rambut palsu	118
Gambar 3.3	Wisata kabupaten purbalingga	124
Gambar 3.4	Pembangunan Daerah Irigasi Sungai	125
Gambar 3.5	Kredit Mawar	126
Gambar 3.6	Aktivitas jual beli di Pasar	128
Gambar 3.7	Penerima program rantang berkah	134
Gambar 3.8	Lokasi Kawasan Kumuh	139



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga.....	7
Grafik 1.2	IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2016	8
Grafik 1.3	Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tingkat pendidikan	12
Grafik 3.1	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2018	41
Grafik 3.2	Cakupan Penegakan Perda dan Perbub	55
Grafik 3.3	Kejadian Bencana Tahun 2015 – 2018	64
Grafik 3.4	Dampak Bencana Tahun 2015 – 2018	65
Grafik 3.5	Kerugian Bencana Tahun 2015 – 2018	65
Grafik 3.6	Bantuan Bencana Kekeringan Tahun 2018	66
Grafik 3.7	Cakupan Pencapaian Penanganan Bahaya Kebakaran	68
Grafik 3.8	Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2018	93
Grafik 3.9	Persebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja di Kabupaten Purbalingga	95
Grafik 3.10	Persebaran tenaga kesehatan menurut jenisnya di Kabupaten Purbalingga	96
Grafik 3.11	Angka Kematian Bayi	103
Grafik 3.12	Angka Kematian Ibu	104
Grafik 3.13	Perbandingan laju inflasi Purbalingga, Jawa Tengah dan Nasional	129
Grafik 3.14	Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga	131
Grafik 3.15	Perkembangan Luasan Kawasan Kumuh	140
Grafik 3.16	Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2015 – 2018	149



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/299 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/ 331 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*Continuing Improvement*).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode 2016–2021.
2. Mewujudkan keterkaitan antara kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih.



3. Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang, antar program, dan antar wilayah dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan.
4. Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2016–2021.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan prakiraan maju pendanaan.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

1. Letak Geografi

Wilayah Kabupaten Purbalingga berada di antara beberapa rangkaian pegunungan dan aliran sungai. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng serta bagian selatan merupakan depresi aliran Sungai Serayu. Secara geografis terletak di bagian barat daya wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi pada $101^{\circ}11'$ – $109^{\circ}35'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}10'$ – $7^{\circ}29'$ Lintang Selatan. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga adalah :

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Pemalang
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas
- Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.

Secara administratif Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 Kecamatan, 224 Desa, 15 Kelurahan, 886 Dusun, 1.558 RW dan 5.092 RT.

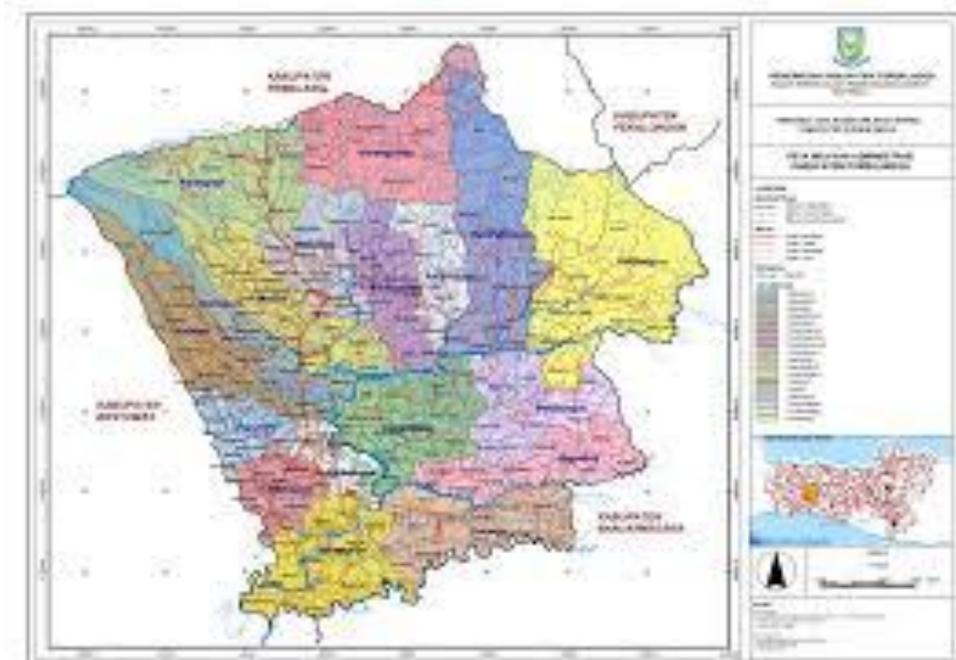
Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administratif menurut Kecamatan, Desa/ Kelurahan, RW dan RT

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RW	RT
1.	Kemangkon	19	-	129	348
2.	Bukateja	14	-	104	365
3.	Kejobong	13	-	109	251

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RW	RT
4.	Pengadegan	9	-	72	211
5.	Kaligondang	18	-	117	379
6.	Purbalingga	2	11	67	243
7.	Kalimanah	14	3	97	337
8.	Padamara	13	1	59	240
9.	Kutasari	14	-	115	262
10.	Bojongsari	13	-	125	287
11.	Mrebet	19	-	100	334
12.	Bobotsari	16	-	109	346
13.	Karangreja	7	-	54	241
14.	Karangjambu	6	-	27	143
15.	Karanganyar	13	-	47	220
16.	Kertanegara	11	-	47	225
17.	Karangmoncol	11	-	112	321
18.	Rembang	12	-	68	338
Jumlah		224	15	1.558	5.092

Sumber : Purbalingga Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga





2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Purbalingga pada tahun 2018 sebanyak 985.542 jiwa dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 498.303 jiwa atau 50,56% dan berjenis kelamin perempuan 487.240 jiwa atau 49,44%.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Purbalingga pada tahun 2018

NO	KECAMATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	KEMANGKON	31,877	31,712	63,589
2.	BUKATEJA	39,119	38,670	77,789
3.	KEJOBONG	25,555	25,128	50,683
4.	KALIGONDANG	32,766	32,380	65,146
5.	PURBALINGGA	28,870	29,609	58,479
6.	KALIMANAH	28,167	27,739	55,906
7.	KUTASARI	32,097	31,141	63,238
8.	MREBET	38,459	37,418	75,877
9.	BOBOTSARI	27,329	26,941	54,270
10.	KARANGREJA	22,682	21,943	44,625
11.	KARANGANYAR	20,643	19,692	40,335
12.	KARANGMONCOL	29,506	28,157	57,663
13.	REMBANG	34,690	33,151	67,841
14.	BOJONGSARI	31,027	29,934	60,961
15.	PADAMARA	22,519	22,358	44,877
16.	PENGADEGAN	20,347	20,219	40,566
17.	KARANGJAMBU	13,849	12,919	26,768
18.	KERTANEGARA	18,801	18,129	36,930
Jumlah		498,303	487,240	985,543

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2018



Dari table diatas, persebaran penduduk di Kecamatan Bukateja menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu masing-masing 77.789 jiwa atau sebesar 7,87% dari penduduk Kabupaten Purbalingga. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Karangjambu dengan jumlah penduduk 26.768 jiwa atau sebesar 2,75%. Sementara itu, prosentase penduduk Kabupaten Purbalingga menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2018. Penduduk Kabupaten Purbalingga masih didominasi oleh umur 35 – 39 tahun.

Table 1.3 Prosentase penduduk Kabupaten Purbalingga menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2018

No	Kelompok Umur	Pria	Wanita	Jumlah
1	2	3	4	5
1	0-4	35,248	33,323	68,571
2	5-9	40,468	37,854	78,322
3	10-14	39,745	37,174	76,919
4	15-19	38,733	37,565	76,298
5	20-24	38,761	37,810	76,571
6	25-29	38,888	37,137	76,025
7	30-34	38,144	36,807	74,951
8	35-39	40,511	39,657	80,168
9	40-44	36,711	36,455	73,166
10	45-49	33,536	33,515	67,051
11	50-54	28,222	30,293	58,515
12	55-59	25,511	26,725	52,236
13	60-64	19,971	20,420	40,391
14	65-69	16,142	15,561	31,703
15	70-74	11,272	11,549	22,821
16	>=75	16,440	15,395	31,835
	Jumlah	498,303	487,240	985,543

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

Menurut data Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 sebesar 931.129 jiwa. Pada tahun 2016 sebesar 950.452 jiwa meningkat



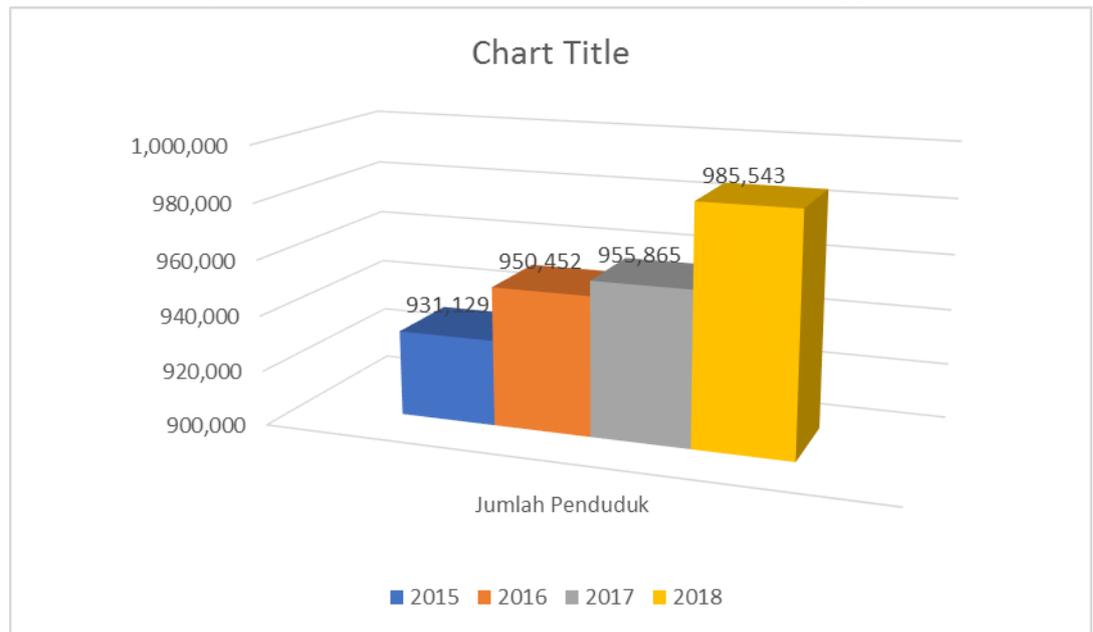
sebesar 19.323 jiwa. Pada tahun 2017 meningkat sebanyak 5.413 jiwa menjadi 955.865 jiwa. Tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menjadi 985,543. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 sebesar 1,60% meingkat 0,59 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 1,01%.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga

NO	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018
1	KEMANGKON	60.439	60.930	60.989	63,589
2	BUKATEJA	74.388	74.549	75.212	77,789
3	KEJOBONG	48.937	48.657	49.028	50,683
4	KALIGONDANG	62.210	62.656	62.706	65,146
5	PURBALINGGA	58.002	57.456	56.923	58,479
6	KALIMANAH	54.297	53.741	53.700	55,906
7	KUTASARI	59.928	60.582	61.101	63,238
8	MREBET	73.551	73.610	74.147	75,877
9	BOBOTSARI	52.194	52.676	52.559	54,270
10	KARANGREJA	43.269	43.438	43.758	44,625
11	KARANGANYAR	38.024	38.822	39.053	40,335
12	KARANGMONCOL	56.252	56.774	57.047	57,663
13	REMBANG	66.092	66.223	66.495	67,841
14	BOJONGSARI	52.766	57.810	58.751	60,961
15	PADAMARA	40.061	43.354	43.282	44,877
16	PENGADEGAN	35.412	38.413	38.959	40,566
17	KARANGJAMBU	22.035	25.100	26.298	26,768
18	KERTANEGARA	33.275	35.661	35.857	6,930
Jumlah		931.129	950.452	955.865	985,543

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk menggambarkan kondisi kehidupan penduduk, khususnya yang menyangkut beberapa kebutuhan yang mendasar. Ukuran ini dapat pula digunakan untuk menunjukkan pencapaian dari suatu kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. IPM menggambarkan tingkat kesehatan penduduk yang direpresentasikan melalui Angka Harapan Hidup, perkembangan dan kemajuan sosial yang ditunjukkan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta kemampuan ekonomi penduduk yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per Kapita.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. IPM Purbalingga pada rentang 60 hingga 70, yang artinya berada pada klasifikasi sedang. Meskipun begitu, IPM Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2012-2016. Pada tahun 2012, IPM Kabupaten Purbalingga mencapai 64,94 meningkat menjadi 65,53 pada tahun 2013. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2014 dan 2015 dimana masing-masing capaian IPM mencapai 66,23 dan 67,03 serta pada tahun 2016 mencapai 67,48 dan tahun 2017 mencapai 67,72. Perkembangan IPM Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :



Tabel 1.5 Nilai IPM Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun 2015-2017

Kabupaten	Nilai IPM		
	2015	2016	2017
Cilacap	67,77	68,60	68,90
Banyumas	69,89	70,49	70,75
Purbalingga	67,03	67,48	67,72
Banjarnegara	64,73	65,52	65,86
Kebumen	66,87	67,41	68,29
Jawa Tengah	69,49	69,98	70,52

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Grafik 1.2 IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 - 2017



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

C. KONDISI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Purbalingga telah menata ulang kelembagaan perangkat daerah yang ada dengan menyesuaikan peraturan dimaksud.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:



1. Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
 - f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan dan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);



- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga serta bidang Pariwisata;
 - q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - r. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan.
5. Badan Daerah Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
6. Kecamatan terdiri dari:
- a. Kecamatan Kemangkong dengan Tipe A.
 - b. Kecamatan Bukateja dengan Tipe A.
 - c. Kecamatan Kejobong dengan Tipe A.
 - d. Kecamatan Kaligondang dengan Tipe A.



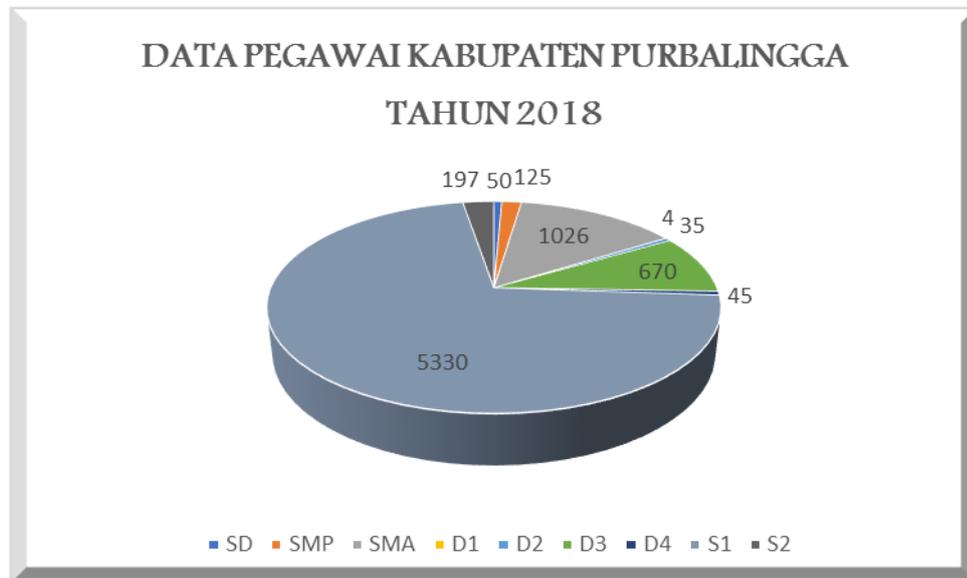
- e. Kecamatan Purbalingga dengan Tipe A.
- f. Kecamatan Kalimanah dengan Tipe A.
- g. Kecamatan Kutasari dengan Tipe A.
- h. Kecamatan Mrebet dengan Tipe A.
- i. Kecamatan Bobotsari dengan Tipe A.
- j. Kecamatan Karangreja dengan Tipe A.
- k. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A.
- l. Kecamatan Karangmoncol dengan Tipe A.
- m. Kecamatan Rembang dengan Tipe A.
- n. Kecamatan Bojongsari dengan Tipe A.
- o. Kecamatan Padamara dengan Tipe A.
- p. Kecamatan Pengadegan dengan Tipe A.
- q. Kecamatan Karangjambu dengan Tipe A.
- r. Kecamatan Kertanegara dengan Tipe A.

Selain Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata dan RSKBD Panti Nugroho yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru/ unit kerja baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KEPEGAWAIAN

Kabupaten Purbalingga memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 sebanyak 7.482 orang, terdiri dari 3.651 orang atau 48,80% Laki-laki dan 3.831 orang atau 52,20% Perempuan, hal ini menunjukkan bahwa secara gender berimbang. Sedangkan berdasarkan pendidikan, ASN Kabupaten Purbalingga didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 71,24% atau 5.330 orang, disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 13,71% atau 1.026 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM ASN Kabupaten Purbalingga relatif baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

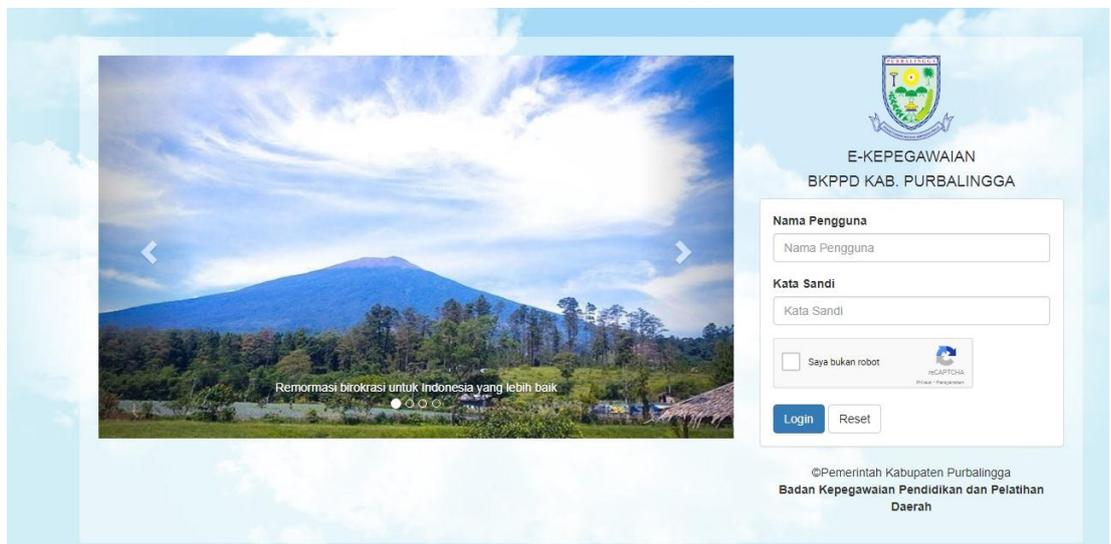
Grafik 1.3 Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tingkat pendidikan



Sumber : BKPPD Kabupaten Purbalingga

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai keadaan pegawai Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat melalui website Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Kabupaten Purbalingga.

Gambar 1.2 SIM Kepegawaian Kabupaten Purbalingga



E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu Strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, meliputi :



- a. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional maupun regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga
- b. Isu strategis daerah lainnya yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga
- c. Isu strategis dari kebijakan pembangunan berupa RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025, dan isu strategis dengan melihat kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, sarana prasarana dan pemerintahan umum pada masa kini serta melihat kemungkinan yang akan terjadi masa mendatang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Purbalingga 2016-2021, sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi karena rendahnya kemampuan untuk mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi guna menunjang kehidupannya.

2. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menyangkut pemenuhan hak dasar rakyat yang dijamin konstitusi. Pemenuhan hak dasar ini antara lain meliputi hak untuk mendapatkan identitas/ legalitas, akses layanan kesehatan, akses layanan pendidikan, pangan, perumahan sehat dan layak, serta fasilitas sanitasi dan akses terhadap air minum. Pembangunan manusia dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia.

3. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan menitikberatkan pada peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas, perdagangan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, serta koperasi. Adapun dalam rangka perluasan kesempatan kerja, pengembangan investasi harus diarahkan pada pengembangan industri padat karya.



4. Infrastruktur

Infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, prasarana irigasi, prasarana perkotaan, prasarana permukiman, serta prasarana pelayanan sosial dan ekonomi dengan kapasitas dan kualitas yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk pembangunan sarana prasarana perhubungan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kapasitas akses dan mempercepat akses konektivitas wilayah.

5. Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan Beragama

Menurunnya semangat nasionalisme dan patriotisme akibat pengaruh budaya global dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya bangsa belum sepenuhnya dapat membendung perilaku yang negatif, terbukti dengan banyaknya perilaku asusila, pornografi dan pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, meningkatnya kriminalitas serta praktik-praktik lain yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Internalisasi nilai-nilai moral yang positif perlu dikembangkan dan ditanamkan melalui pendidikan formal, non formal, informal maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan beragama perlu terus didorong guna meningkatkan pemahaman, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agama bersamaan dengan upaya mewujudkan kerukunan inter dan antar umat beragama.

6. Lingkungan Hidup

Peningkatan populasi manusia bersamaan dengan peningkatan aktivitasnya serta peningkatan pemanfaatan bahan-bahan hasil sintesa kimiawi mengakibatkan meningkatnya dengan pesat produksi bahan pencemar lingkungan hidup (polutan) seperti sampah plastik, asap kendaraan bermotor, limbah kimia dan sebagainya. Di sisi lain peningkatan populasi manusia menyebabkan peningkatan desakan terhadap sumberdaya lahan yang ditandai dengan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian maupun lahan yang memiliki fungsi lindung. Memburuknya kondisi hutan lindung dan kawasan lindung lainnya seperti kawasan tangkapan air, kawasan sekitar mata air, sempadan sungai, lahan dengan kelerengan tinggi telah mengakibatkan berbagai permasalahan dan ancaman bagi kehidupan manusia seperti mengeringnya beberapa mata air akibat menurunnya keseimbangan tata air, terjadinya tanah longsor, terjadinya banjir yang besar ketika musim



penghujan dan kekeringan yang ekstrim ketika musim kemarau dan sebagainya

7. Tatakelola pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip-prinsip good governance antara lain efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki visi strategis (strategic vision)

F. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang dan landasan hukum penyusunan pelaporan kinerja, gambaran umum Kabupaten Purbalingga serta pengantar lainnya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

A. Rencana Strategis

Menyajikan secara singkat mengenai rencana strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang meliputi visi misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program yang direncanakan.

B. Perjanjian Kinerja

Menyajikan target-target dari indikator kinerja setiap sasaran strategis yang sudah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2018.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, serta menyajikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target



kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan, disajikan pada akhir bab ini dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dan singkat tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan telah di Review oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga
2. Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/ 299 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 060/ 331 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2018, menampilkan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2018 serta eksisting dari tahun 2015, capaian 2016 sampai dengan tahun 2017 .

A. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu ***“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”***.

B. MISI

Dalam mewujudkan visi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.
2. Mendorong Kehidupan Masyarakat Religius yang Beriman dan Bertakwa Kehadirat Allah SWT serta Mengembangkan Paham Kebangsaan guna



Mewujudkan Rasa Aman dan Tenteram dalam Masyarakat yang Berdasar pada Realitas Kebhinekaan.

3. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Utamanya melalui Peningkatan Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Rakyat, dengan Mendorong Simpul-Simpul Perekonomian Utamanya Industri Pengolahan dan Manufaktur, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Industri Kreatif dengan tetap Berorientasi pada Kemitraan dan Pengembangan Potensi Lokal serta didukung dengan Penciptaan Iklim Kondusif untuk pengembangan Usaha, Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.
6. Mewujudkan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan yang Sehat dan Menarik untuk Melaksanakan Kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Gerakan Masyarakat, yang didukung dengan Penyediaan Infrastruktur/ Sarana Prasarana Wilayah yang Memadai.
7. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Misi Pertama : “Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat”.

Tujuan :

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat

Misi Kedua : “Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan”.



Tujuan :

Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat.

Misi Ketiga : Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak”.

Tujuan :

1. Meningkatnya Status Ketahanan Pangan.
2. Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni.

Misi Keempat : “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat”.

Tujuan :

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Misi Kelima : “Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”

Tujuan :

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Misi Keenam : “Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana prasarana wilayah yang memadai”.

Tujuan :

1. Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan
2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman, dengan Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman.



3. Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Orang dan Barang, dengan Sasaran Meningkatnya Manajemen, Kapasitas dan Kualitas Angkutan.
4. Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik, dengan Sasaran Meningkatnya Implementasi *e-government* dan Keterbukaan Informasi Publik.
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan kualitas Pelayanan Desa, dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa.
6. Terwujudnya Tertib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, dengan Sasaran Meningkatnya Kepastian Status dan Pemanfaatan Tanah

Misi Ketujuh : “Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”

Tujuan :

Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mengacu Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/ 299 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 060/ 331 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purbalingga menentukan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purbalingga

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1	2	3
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
	Opini Audit Keuangan BPK	Opini
	Kategori Akuntabilitas Kinerja	Kategori
	Hasil Penilaian LPPD	Nilai
Meningkatnya Paham Kebangsaan	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	persen



Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1	2	3
Meningkatnya Ketaatan terhadap Perda dan Perbup	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persen
Terwujudnya Rasa Aman dan Tentram dalam Masyarakat	Angka Kriminalitas	persen
Tertanganinya Korban Bencana	Cakupan Korban Bencana Alam yang Tertangani	persen
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka / nilai
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	persen
Ketersediaan Rumah	Persentase Rumah per KK	Persen
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata – rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	Tahun Tahun
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Keluarga Sejahtera	%
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata angka kelahiran total/ TFR	Per 1000 wanita
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi, Berkurangnya Angka Pengangguran, serta Terkendalinya Angka Inflasi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Laju Inflasi Angka Kemiskinan	Persen Persen Persen Persen



Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	Persen
Meningkatnya Kualitas Desa.	Indek Desa Membangun (IDM)	Angka
Ketersediaannya Air Permukaan untuk Pertanian pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	Cakupan Air Irigasi	Persen
Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang,	Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukan	Persen
Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektifitas Wilayah	Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen
Meningkatnya Akses Air Bersih	Cakupan Pelayanan Air Bersih	Persen
Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga tahun 2018 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/ 299 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 060/ 331 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



(APBD) dan Perubahannya Tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018
1	2	3	7
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	79
	Opini Audit Keuangan BPK	Opini	WTP
	Kategori Akuntabilitas Kinerja	Kategori	60
	Hasil Penilaian LPPD	Nilai	3.28
Meningkatnya Paham Kebangsaan	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	persen	81
Meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perbup	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persen	96
Terwujudnya Rasa Aman dan Tentram dalam Masyarakat	Angka Kriminalitas	persen	3
Tertanganinya Korban Bencana	Cakupan Korban Bencana alam yang tertangani	persen	45
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka / nilai	85.82
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	persen	91.3
Ketersediaan Rumah	Persentase Rumah per KK	Persen	84.6



Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018
1	2	3	7
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata – rata Lama Sekolah	Tahun	7.33
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.3
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73.1
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Keluarga Sejahtera	persen	78
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata Angka Kelahiran Total/ TFR	Per 1000 wanita	2.25
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi, Berkurangnya Angka Pengangguran, serta Terkendalinya Angka Inflasi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	<5
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	>5
	Laju Inflasi	Persen	<5
	Angka Kemiskinan	Persen	16-18
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	Persen	0.65
Meningkatnya Kualitas Desa.	Indek Desa Membangun (IDM)	Angka	50
Ketersediaannya Air Permukaan untuk Pertanian pada Jaringan Irigasi Primer Dan Sekunder	Cakupan Air Irigasi	Persen	43.8



Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018
1	2	3	7
Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang,	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan	Persen	84
Meningkatnya aksesibilitas dan konektifitas wilayah	Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen	78.32
Meningkatnya akses air bersih	Cakupan pelayanan air bersih	Persen	94.25
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64.5



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2016-2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

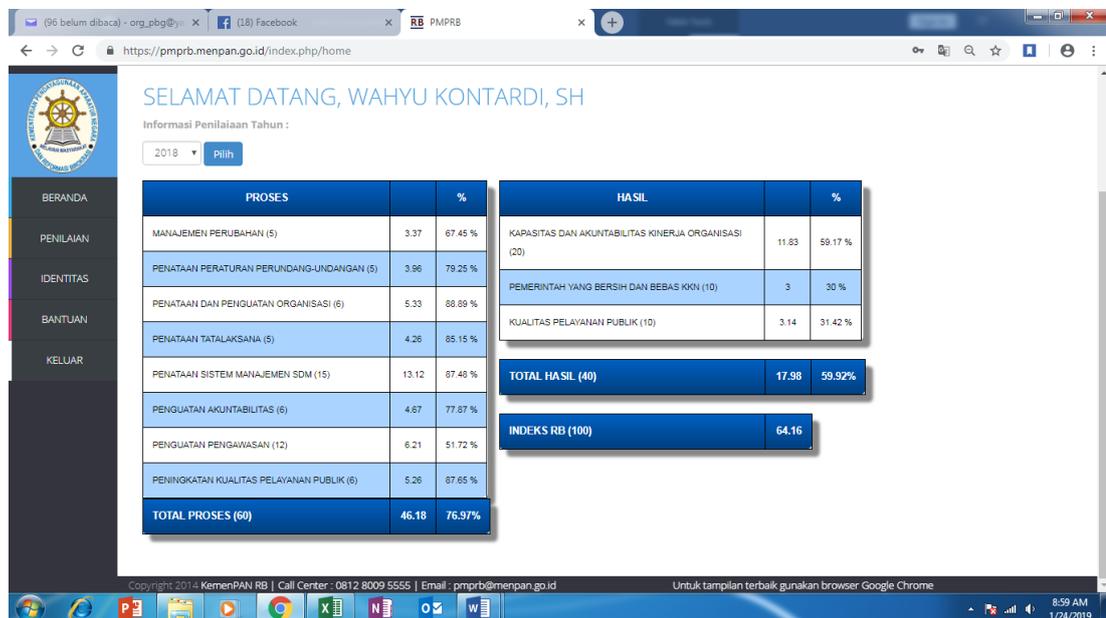
Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

A. CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PURBALINGGA

Memperhatikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/01/M.RB.06/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan bahwa seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota agar menerapkan PMPRB secara online, dan menyampaikan/ melaporkan hasil PMPRB, untuk periode sampai dengan Tahun Anggaran 2017, paling lambat bulan April 2018. Penilaian yang

dikirimkan oleh setiap instansi pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan gambaran kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi target nasional. Berdasarkan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 yang merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Nilai pencapaian program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga adalah 64,16. Nilai ini mencerminkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori baik namun masih diperlukan sedikit perbaikan.

Gambar 3.1 Hasil PMPRB Kabupaten Purbalingga



Untuk penilaian terakhir Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tanggal 13 April 2018 dengan hasil penilaian 64,1536, naik sebesar 1,772 dibandingkan Tahun 2017. Dan sesuai Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, hasil penilaian tersebut masuk Kategori B yaitu Baik, dengan catatan perlu sedikit perbaikan.

Pada tahun 2018, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga masih dalam proses penilaian di Kementerian PAN dan RB. Pada tahun 2017 sebesar 53,29 dengan kategori CC dengan rincian :



Table 3.1 Komponen Penilaian Indeks RB

No.	Komponen Pengungkit	Bobot	Nilai
Komponen Pengungkit			
1.	Manajemen Perubahan	5	1,87
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2.09
3.	Penatan dan Penguatan Organisasi	6	1,32
4.	Penataan Tata Laksana	5	2,16
5.	Penataan sistem Manajemen SDM	15	9,78
6.	Penguatan Akuntabilitas	6	1,82
7.	Penguatan Pengawasan	12	4,11
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	2,12
Komponen Hasil			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	7.00
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6	4.50
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	5.62
4.	Opini BPK	3	3.00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	7.90
Nilai Komponen Hasil		40	28.022
Indeks Reformasi Birokrasi		100	53.291

Tabel diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya didukung oleh komitmen yang tinggi dari pimpinan sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Haal-hal yang masih harus diperhatikan terkait dengan upaya untuk menjalankan program reformasi birokrasi adalah :

- a. Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga agar dijabarkan ke dalam rencana kerja sehingga dalam pelaksanaannya lebih optimal;
- b. Meningkatkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan mengadakan pertemuan secara berkala antar pokja untuk melaporkan perkembangan reformasi birokrasi di Kabupaten Purbalingga;



- c. Menetapkan Agen Perubahan secara formal dan menugaskan *Agent of Change/ Role Model* dengan target-target perubahan nyata pada masing-masing unit kerja;
- d. Meningkatkan Internalisasi budaya kerja dan perubahan *mindset* agar mempercepat terwujudnya perubahan budaya kerjadan pola pikir kearah yang lebih baik;
- e. Mengoptimalkan sistem penataan peraturan perundang-undangan terkait identifikasi dan harmonisasi peraturan yang tumpang tindih serta sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan evaluasi kelembagaan namun belum berfokus kepada kinerja yang akan dihasilkan;
- g. Menyusun Peta Bisnis Proses mulai dari level instansi hingga unit kerja sehingga belum dapat menggambarkan hubungan dan sinergisitas antar unit kerja;
- h. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen SDM antara lain *assessment* pegawai yang belum menyeluruh dan ukuran kinerja individu yang belum sepenuhnya mengacu pada kinerja organisasi serta belum sepenuhnya menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja;
- i. Menetapkan kebijakan tentang pengaduan masyarakat, *Whistle – Blowing Sistem* dan benturan kepentingan serta implementasi atas penanganan gratifikasi dan penerapan SPIP;
- j. Meningkatkan implementasi pelayanan public khususnya di OPD pelayanan dalam hal standar pelayanan, inovasi dalam layanan publik, pemberian *reward/ punishment* terhadap pemberi layanan dan tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat belum berjalan.

B. PENILAIAN TINGKAT MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Berdasarkan surat Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor : S1210/PW11/3.2/2018 tanggal 30 Mei 2018 bahwa mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan target level 3 yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2014–2019, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga diminta agar melaksanakan penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP Secara Mandiri atau SA (*self assesment*) dengan menggunakan Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.



Hasil *Quality Assurance* (QA) dari Tim BPKP sebagaimana tersebut diatas, dengan nilai 2,725 maka tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purbalingga berada pada level 2 (berkembang). SPIP pada tingkat berkembang menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun pelaksanaan pengendalian intern belum didukung dengan dokumentasi yang baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Dalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPIP dari level 2 (tingkat berkembang) ke level 3 (tingkat terdefinisi), maka perlu dilakukan strategi peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi pengendalian intern terutama atas kegiatan unsur/sub unsur SPIP yang nilai maturitasnya belum mencapai 3 yaitu Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Risiko yang nilainya baru mencapai level 2. Adapun beberapa kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tingkat Kabupaten yang ditandai dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Bupati beserta seluruh jajarannya dengan disaksikan oleh Kementrian/ Lembaga Pusat terkait antara lain dari Kemenpan-RB dan Ombudsman RI.
- b. Pengarahan dan sosialisasi hasil Penilaian Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga kepada pimpinan OPD oleh Plt. Bupati dan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
- c. Implementasi kegiatan Penilaian Risiko dan penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas kegiatan utama pada masing-masing OPD sebagai salah satu bukti bahwa OPD tersebut telah mengimplementasikan SPIP, serta mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP dengan baik.
- d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP pada masing-masing OPD oleh APIP, khususnya pada OPD yang telah dijadikan sampel dalam penilaian maturitas SPIP dan telah mengikuti Bimtek/ asistensi Penyusunan RTP.

C. REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :



Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	CAPAIAN 2018
1	2	3	4
MISI 1 <i>MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFISIEN, EFEKTIF, BERSIH DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT</i>			
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	79	79,49
Opini Audit Keuangan BPK	Opini	WTP	Belum keluar
Kategori Akuntabilitas Kinerja	Kategori	57,75	58,79
Hasil Penilaian LPPD	Nilai	3,28	Belum Keluar
MISI 2 <i>MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KE HADIRAT ALLAH SWT SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN RASA AMAN DAN TENTRAM DALAM MASYARAKAT YANG BERDASAR PADA REALITAS KEHIDUPAN</i>			
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	81	68,39
Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	96	100
Angka Kriminalitas	Persen	3	1,53
Cakupan Korban Bencana Alam yang Tertangani	Persen	45	96,85
MISI 3 <i>MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MANUSIA UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK</i>			
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka/nilai	85,82	85,5
Persentase Rumah Layak Huni	Persen	91,3	93,74
Persentase Rumah per KK	Persen	84,6	77,52
MISI 4 <i>MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT</i>			
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,33	6,87
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,3	11,94



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	CAPAIAN 2018
1	2	3	4
Usia Harapan Hidup	Tahun	73,1	72,91
Keluarga Sejahtera	Persen	78	78,39
Rata – rata Angka Kelahiran Total /TFR	Per 1000 wanita	2,25	1,99
MISI 5 <i>MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI RAKYAT, DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, INDUSTRI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA</i>			
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	<5	5,33
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	>5	5,12
Laju Inflasi	Persen	<5	3,01
Angka Kemiskinan	Persen	16 – 18	15,62
MISI 6 <i>MEWUJUDKAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG SEHAT DAN MENARIK UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MELALUI GERAKAN MASYARAKAT, YANG DIDUKUNG DENGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR/ SARANA PRASARANA KEWILAYAHAN YANG MEMADAI</i>			
Luasan Kawasan Kumuh	Persen	0,65	0
Indeks Desa Membangun (IDM)	Persen	0,6681	0,65422
Cakupan Air Irigasi	Persen	43,8	71,66
Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukan	Persen	84	75,50
Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen	78,32	86
Cakupan Pelayanan Air Bersih	Persen	94,25	90,43
MISI 7 <i>MEWUJUDKAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP</i>			
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	64,5	66,70

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meliputi rencana strategis, perjanjian



kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 100	Sangat Berhasil
2.	75 s.d 100	Berhasil
3.	55 s.d 75	Cukup Berhasil
4.	≤ 55	Kurang Berhasil

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut :

Misi 1 :

“MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFISIEN, EFEKTIF, BERSIH DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT”

**SASARAN 1 :*****MENINGKATNYA KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH***

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah* mendapatkan nilai rata-rata 99,3% dengan kategori berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran *Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah*

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	77,6	77,96	78,51	79	79,49	100,62	82
Opini audit keuangan BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	Belum keluar	-	WTP
Kategori Akuntabilitas Kinerja	Kategori	50,20	50,03	57,75	60	58,79	97,98	67
Hasil Penilaian LPPD	Nilai	3,2563	3,2954	Masih dalam proses	3,28	Belum Keluar	-	3,5
Rata-rata kinerja							99,3	

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Seiring dengan penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, maka istilah indeks kepuasan masyarakat berubah menjadi Survei kepuasan masyarakat. Dalam peraturan tersebut terjadi perubahan substansi yang mengamanatkan bahwa setiap OPD/ Unit Kerja yang mengampu pelayanan publik dapat menggunakan metode sesuai dengan kaidah penelitian dan penentuan sampel yang dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah populasi. Selain itu hasil Survei Kepuasan Masyarakat wajib dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan informasi dan website yang dapat diakses oleh



masyarakat. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sudah dilaksanakan setiap tahun pada 55 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang meliputi Dinas, Kecamatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Adapun capaian hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 79,49. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2017 dengan nilai sebesar 78,51. Survei yang dilakukan menggunakan 2 metode, yaitu survei secara mandiri yang dilakukan oleh tim Survei dari perangkat daerah dan survei yang dilakukan oleh unit independen. Untuk mendapatkan hasil yang akurat ada beberapa unit pelayanan yang dipilih secara acak untuk diukur oleh unit independen. Hal ini dipilih dengan pertimbangan bahwa apabila survei dilaksanakan secara mandiri akan berpengaruh pada obyektivitas penilaian IKM, karena dalam prosesnya masih ditemui adanya rasa segan dari masyarakat untuk memberikan nilai yang obyektif sesuai dengan kondisi layanan publik yang diberikan oleh UPP.

Berikut kami sajikan hasil SKM yang dilaksanakan secara acak pada Sampel UPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga oleh unit independen (bekerjasama dengan LPPM Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto) :

Tabel 3.5 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

NO	UPP	SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA LAYANAN
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINPENDUKCAPIL)	77,90	B	Baik
2.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	78,39	B	Baik
3.	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	80,63	B	Baik
4.	RSKBD Panti Nugroho	79,98	B	Baik
5.	Kecamatan Karangreja	78,10	B	Baik
6.	UPTD Puskesmas Karangreja	81,49	B	Baik
7.	UPTD Puskesmas Serayu Larangan	79,95	B	Baik
	Rata – Rata IKM	79,49		

Sumber : Buku Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Survei tersebut dilaksanakan dengan mengukur 9 (Sembilan) Unsur SKM yang selanjutnya secara umum diperoleh rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai berikut :

Tabel 3.6 Rekomendasi atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu			Penanggung Jawab
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang	
1.	Persyaratan	Deregulasi Persyaratan Pelayanan	-	Evaluasi dan penyederhanaan persyaratan pelayanan	Digitalisasi persyaratan layanan	Semua Unit Layanan (utamanya layanan perijinan)
2.	Prosedur	Pelayanan Publik Pro Lansia dan Disabilitas	Prioritas pada Lansia dan Disabilitas	-	-	Unit Layanan Kesehatan
3.	Waktu Pelayanan	Pengelolaan Waktu Kunjungan/ Pelayanan	-	-	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penjadwalan kunjungan	Rumah Sakit dan Puskesmas
4.	Biaya/ Tarif	Sosialisasi	Pembuatan Papan Info	-	-	Semua Unit Layanan
5.	Produk layanan	Pengembangan produk layanan	Penambahan Dokter dan Nakes	-	-	RSBKD Panti Nugroho
6.	Kompetensi Pelaksana	Peningkatan Keahlian	-	-	-	Semua Unit Layanan
7.	Perilaku Pelaksana	Penyusunan Kode Etik	-	-	-	Semua Unit Layanan
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Optimalisasi fungsi pengaduan masyarakat	Sosialisasi Penanganan Pengaduan	Pemberian Reward and Punishment	-	Seluruh Unit Pelayanan



No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu			Penanggung Jawab
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang	
9.	Sarana dan Prasarana	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	-	Peningkatan kapasitas dan fasilitas ruang tunggu Melengkapi sarana & prasaran penunjang pelayanan	-	Seluruh Unit Pelayanan

Sumber : Buku Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Selanjutnya pada Tahun 2018, Kementerian PAN dan RB juga telah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di 3 (tiga) UPP Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu DPMPTSP, DINPENDUKCAPIL dan RSUD dr. R.Goeteng Taroenadibrata dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.7 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2018 pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

NO	UPP	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
1.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	2,71	C (Cukup)
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINPENDUKCAPIL)	3,14	B – (Baik dengan catatan)
3.	RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata	3,7	B (Baik)

Sumber : Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dilaksanakan atas aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme



SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.

Dari hasil survei kepuasan masyarakat maupun evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, masih perlu adanya pembenahan – pembenahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam upaya mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang akan berdampak pada tercapainya kepuasan masyarakat.

2. Opini Audit Keuangan BPK

Laporan Keuangan Daerah (LKD) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 masih dalam proses audit oleh auditor eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga belum dapat diketahui hasil capaiannya.

Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga hambatan yang dialami untuk mengukur capaian indikator kinerja ini antara lain BPK dalam mengaudit keuangan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir belum dapat ditentukan hasil opini laporan keuangan.

Selanjutnya untuk Penilaian atas LKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : 166/S/XVIII.SMG/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian Tahun 2017 telah sesuai dengan target kinerja pada Tahun 2017. Adapun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se – Jawa Tengah, maka dapat disajikan LHP LKPD se – Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No.	Entitas	Opini					
		TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017
1	Prov Jawa Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab Banjarnegara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



No.	Entitas	Opini					
		TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017
3	Kab Banyumas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab Batang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
5	Kab Blora	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab Boyolali	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab Brebes	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	Kab Cilacap	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
9	Kab Demak	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
10	Kab Grobogan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kab Jepara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab Karanganyar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab Kebumen	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP
14	Kab Kendal	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
15	Kab Klaten	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP
16	Kab Kudus	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kab Magelang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
18	Kab Pati	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
19	Kab Pekalongan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
20	Kab Pemasang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
21	Kab Purbalingga	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
22	Kab Purworejo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Kab Rembang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
24	Kab Semarang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kab Sragen	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
26	Kab Sukoharjo	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
27	Kab Tegal	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
28	Kab Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Kab Wonogiri	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
30	Kab Wonosobo	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
31	Kota Magelang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
32	Kota Pekalongan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
33	Kota Salatiga	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
34	Kota Semarang	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
35	Kota Surakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



No.	Entitas	Opini					
		TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017
36	Kota Tegal	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber : BPK Provinsi Jawa Tengah

Adapun terkait dengan capaian kinerja tersebut, BPK menyajikan hasil evaluasi sebagai berikut :

a. Opini atas Laporan Keuangan

BPK menyatakan bahwa Laporan Keuangan tersebut telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tanggal 31 Desember 2017 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Sistem Pengendalian Intern

Berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya, BPK masih menemukan adanya kelemahan-kelemahan yang masih perlu dilakukan perbaikan diantaranya :

- (i) pengendalian atas pencairan kas pada beberapa OPD masih kurang memadai, dan;
- (ii) pengendalian atas pengelolaan penerimaan BPHTB belum memadai.

c. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang – undangan

Masih ditemui adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pada belanja jasa pelayanan Puskesmas dan Laboratorim Kesehatan Kabupaten, serta Belanja Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat.

3. Kategori Akuntabilitas Kinerja

Dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 mengalami peningkatan. Hasil penilaian tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

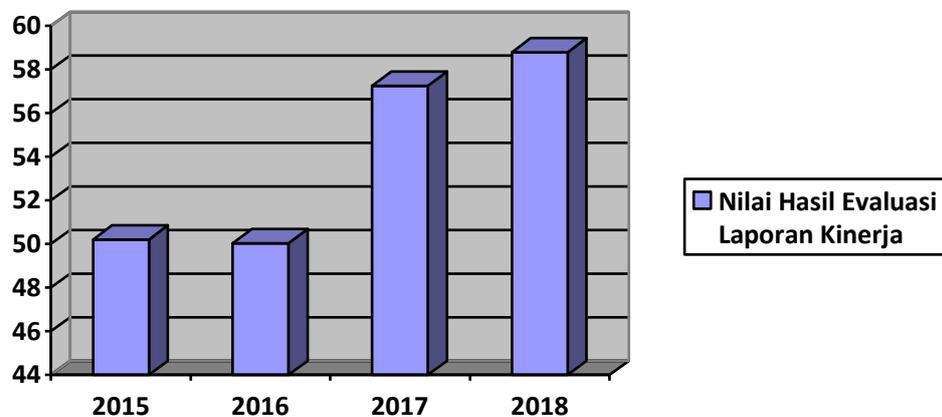
Tabel 3.9 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komponen	Bobot	Nilai			
		2015	2016	2017	2018
Perencanaan Kinerja	30	18,45	17,84	18,88	19,15
Pengukuran Kinerja	25	7,47	9,55	12,24	12,39
Pelaporan Kinerja	15	9,71	8,96	10,05	10,32
Evaluasi Internal	10	5,25	5,62	5,27	6,06
Capaian Kinerja	20	9,32	8,06	11,31	10,86
Nilai Hasil Evaluasi	100	50,20	50,03	57,75	58,79
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	CC	CC

Sumber : Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 memperoleh nilai 58,79 atau predikat “CC”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil di Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah menunjukkan hasil yang cukup memadai dan masih memerlukan banyak perbaikan.. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Grafik 3.1 Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2018





Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, masih banyak hal yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun – tahun berikutnya, khususnya untuk mencapai target akhir tahun RPJMD yaitu dengan nilai 67 Kategori B. Adapun sebagaimana evaluasi yang telah disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, maka perlu dilaksanakan langkah – langkah sebagai berikut :

- Memastikan perencanaan anggaran didasarkan pada dokumen perencanaan;
- Penyempurnaan laporan kinerja yang menyajikan analisis penyebab tidak tercapainya target kinerja secara memadai, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada masa mendatang;
- Meningkatkan kapasitas Evaluator terhadap Sistem AKIP, sehingga mampu memberikan rekomendasi percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja;
- Menyusun *Cascade Down*/Penjabaran kinerja sampai dengan level individu;
- Mereviu program, kegiatan dan komponen anggaran seluruh OPD dengan mengacu pada pencapaian Indikator Kinerja Utama OPD dan memastikan bahwa anggaran dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan;
- Menginstruksikan kepada Inspektorat untuk meningkatkan kualitas evaluasi atas implementasi Sistem AKIP OPD dengan menyelenggarakan asistensi/bimbingan kepada pejabat yang diberi tanggungjawab tentang akuntabilitas OPD, serta menginstruksikan kepada BAPPEDA dan para penanggungjawab program agar meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mendorong efektifitas dan efisiensi penerapan manajemen kinerja ;
- Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pimpinan OPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi, sehingga mampu meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.

4. LPPD

Sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan laporan pertanggungjawaban untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan rumah tangga daerah (pelaksanaan urusan), maka Kepala Daerah berkewajiban



menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah dan Informasi / Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah untuk melaksanakan pembinaan terhadap pemerintah daerah yang hasilnya digunakan sebagai pedoman dalam memberikan *reward and punishment* kepada Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah.

Realiasi Indikator Nilai EPPD/ EKPPD diperoleh untuk Tahun $n + 2$, sehingga nilai EPPD/EKPPD yang diperoleh pada Tahun 2018 merupakan nilai capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Tahun 2017. Adapun Nilai EPPD/EKPPD Tahun 2017 masih dalam proses penilaian akhir oleh Tim Pusat Kemendagri, sedangkan Nilai EPPD/EKPPD Tahun 2018 masih dalam proses/tahap penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang harus disampaikan kepada Mendagri.

Tabel 3.10 Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tingkat Nasional

No	LPPD	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
1.	LPPD Tahun 2015	44	3,2563	Sangat Tinggi
2.	LPPD Tahun 2016	51	3,2954	Sangat Tinggi
3.	LPPD Tahun 2017	Dalam Proses Penilaian Kemendagri		
4.	LPPD Tahun 2018	Dalam Proses Penyusunan		

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga

Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 menargetkan nilai 3,28 dan nilai untuk tahun 2017 masih dalam proses penilaian akhir oleh Tim Pusat Kemendagri, sehingga tidak dapat dilaksanakan pengukuran terhadap Capaian Indikator Kinerja Nilai EPPD/EKPPD.

Adapun berdasarkan tabel Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tingkat Nasional dapat diuraikan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Urusan Pemerintah meraih penghargaan Sangat Tinggi. Secara skor nilai, Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016



mengalami kenaikan sebesar 1,2% dari nilai kinerja Tahun 2015, walaupun secara peringkat mengalami penurunan.

Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten di wilayah eks Karesidenan Banyumas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih menempati posisi tertinggi di atas Kabupaten Banjarnegara pada peringkat 84 dengan nilai 3,2171, Kabupaten Banyumas di peringkat 88 dengan nilai 3,2101 dan Kabupaten Cilacap pada peringkat 128 dengan nilai 3,1082.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran *Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah* adalah :

1. Implementasi manajemen berbasis kinerja belum sepenuhnya dipahami oleh para Pimpinan Perangkat Daerah maupun jajaran di bawahnya, sehingga pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada hasil/*outcome*.
2. Belum adanya penataan dalam jabatan pelaksana, sehingga menyulitkan terwujudnya penjabaran kinerja sampai dengan level individu.
3. Belum diterapkannya *reward and punishment* yang didasarkan pada Capaian Kinerja, sehingga belum sepenuhnya mendukung peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Faktor pendukung peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, Keterbukaan Informasi Publik masih harus ditingkatkan.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen Pimpinan Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan manajemen berbasis kinerja melalui kegiatan – kegiatan Rapat Koordinasi/Pengarahan/Sosialisasi, Bimbingan Teknis;
2. Melaksanakan penataan dalam jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai upaya untuk mewujudkan manajemen berbasis kinerja dengan menjabarkan kinerja sampai level individu melalui pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) maupun perjanjian kinerja dengan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi hasil/mendukung capaian kinerja organisasi.



3. Menyusun kebijakan pemberian reward and punishment berbasiskan kinerja, sehingga akan mendorong setiap individu untuk bertanggungjawab atas target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP secara berkala, serta membangun sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi;
5. Meningkatkan maturitas SPIP, menetapkan prioritas pembenahan manajemen Pemerintahan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi, serta meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan optimalisasi peran PPID Pembantu/Perangkat Daerah dalam mengelola website Perangkat Daerah.

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah adalah :

- a. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
- b. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan
- c. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
- d. Program Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah
- e. Program Peningkatan Pelayanan Publik
- f. Program Pembinaan Kehidupan Beragama
- g. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- h. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
- i. Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah
- j. Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
- k. Program Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Pelayanan Hukum
- l. Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah
- m. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Desa
- n. Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
- o. Program Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan
- p. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- q. Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian
- r. Program Fasilitasi dan Pengembangan Kepegawaian Daerah

s. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Misi 2 :

"MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KE HADIRAT ALLAH SWT SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN RASA AMAN DAN TENTRAM DALAM MASYARAKAT YANG BERDASAR PADA REALITAS KEHIDUPAN"

SASARAN 2 :

MENINGKATNYA PAHAM KEBANGSAAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Paham Kebangsaan* mendapatkan nilai rata-rata 84,43% dengan kategori berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Paham Kebangsaan*

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target Akhir
Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Indeks	60	-	-	81	68,39	84,43	-

Pembangunan sistem politik yang demokratis dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung masyarakat. Karena hanya dengan partisipasi politik, maka hasil keputusan politik akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil keputusan politik akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan sistem politik adalah



adanya partisipasi politik (Suko Susilo:2003:71). Kesadaran politik masyarakat dapat ditingkatkan dengan melakukan pendidikan politik karena dengan melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam bentuk ikut serta dalam melaksanakan hak politik pada Pemilu.

Dengan demikian, semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, menunjukkan makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat turut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan yang bertujuan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dihitung berdasarkan rata-rata angka partisipasi pemilihan legislatif, pemilihan presiden/ wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati/ wakil bupati.

Pada tahun 2018, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dihitung berdasarkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Partisipasi masyarakat pada tahun 2018 sebesar 68,39% dari DPT yang terdaftar. Capaian tersebut hanya sebesar 84,43% dari target yang ditentukan sebesar 81% pemilih hadir di TPS. Capaian tersebut lebih besar dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2015 sebesar 60%.

Berdasarkan data KPU Jawa Tengah, jumlah pemilih pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebanyak 27.068.125, terdiri atas pemilih laki - laki sebanyak 13.478.821 dan perempuan 13.589.304. Sementara Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di Kabupaten Purbalingga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebanyak 737.674 jiwa, dengan rincian laki - laki berjumlah 370.345 jiwa, dan perempuan berjumlah 367.329 jiwa. Sedangkan yang menggunakan hak pilih nya hanya sebesar 504.489 jiwa atau sebesar 68,39%, dan 233.185 jiwa atau 31,61% tidak menggunakan hak pilihnya.

Tabel 3.12 Daftar Pemilih yang menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

NO	KECAMATAN	PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	
			JUMLAH	%
1.	BOBOTSARI	40.078	28.326	70,68%



NO	KECAMATAN	PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	
			JUMLAH	%
2.	BOJONGSARI	45.666	32.550	71,28%
3.	BUKATEJA	56.943	39.102	68,67%
4.	KALIGONDANG	49.118	34.513	70,27%
5.	KALIMANAH	41.588	30.462	73,25%
6.	KARANGANYAR	31.074	20.789	66,90%
7.	KARANGJAMBU	20.611	13.591	65,94%
8.	KARANGMONCOL	44.178	29.139	65,96%
9.	KARANGREJA	33.645	22.887	68,00%
10.	KEJOBONG	37.900	23.433	61,83%
11.	KEMANGKON	47.985	34.401	71,70%
12.	KERTANEGARA	27.881	17.551	62,95%
13.	KUTASARI	46.636	32.556	69,81%
14.	MREBET	56.972	38.980	68,42%
15.	PADAMARA	32.572	23.742	72,90%
16.	PENGADEGAN	30.774	19.187	62,35%
17.	PURBALINGGA	42.627	31.741	74,46%
18.	REMBANG	51.426	31.539	61,33%
JUMLAH		737.674	504.489	68,39%

Sumber : KPU Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan data di atas jumlah pemilih tertinggi adalah Kecamatan Mrebet sebesar 56.972 jiwa atau 7,72% dan jumlah pemilih terendah adalah Kecamatan Karangjambu sebesar 20.611 atau 2,79%. Sementara itu persentase pengguna hak pilih tertinggi di Kecamatan Purbalingga sebesar 74,46% dan terendah di Kecamatan Rembang sebesar 61,33%.

Belum tercapainya target partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain cukup banyaknya warga di wilayah Kabupaten Purbalingga yang bekerja di luar daerah (**boro**), yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena masih berada di luar daerah pada saat pelaksanaan Pemilu. Berdasarkan hasil rekapitulasi pengembalian formulir C6 KWK (surat pemberitahuan) yang tidak terdistribusi di wilayah Kabupaten Purbalingga diperoleh data sebagai berikut :



Tabel 3.13 Hasil Rekapitulasi Pengembalian C6 KWK yang Tidak Terdistribusi Dalam Wilayah Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

NO	KECAMATAN	MENINGGAL DUNIA	PINDAH	TIDAK DIKENAL	TIDAK DAPAT DITEMUI	LAIN LAIN	JUMLAH
1	BOBOTSARI	121	194	28	4.122	181	4.646
2	PURBALINGGA	128	159	235	2.470	220	3.212
3	BUKATEJA	142	157	69	5.443	763	6.574
4	KALIGONDANG	127	207	87	4.124	307	4.852
5	KALIMANAH	117	225	63	2.024	181	2.610
6	KARANGANYAR	14	4	26	455	63	562
7	KARANGJAMBU	55	63	33	1.647	933	2.731
8	KARANGMONCOL	130	141	59	5.282	1.235	6.847
9	KARANGREJA	85	54	53	2.420	340	2.952
10	KEJOBONG	110	77	18	4.079	30	4.314
11	KEMANGKON	184	124	83	4.816	534	5.741
12	KERTANEGARA	69	52	31	2.987	899	4.038
13	KUTASARI	133	142	49	3.001	226	3.551
14	MREBET	206	201	183	3.280	2.548	6.418
15	PADAMARA	83	145	67	2.235	133	2.663
16	PENGADEGAN	48	73	22	1.908	508	2.559
17	PURBALINGGA	336	318	82	1.322	792	2.850
18	REMBANG	142	210	131	8.726	2.339	11.548
	JUMLAH	2.230	2.546	1.319	60.341	12.232	78.668

Sumber : KPU Kabupaten Purbalingga

Dari data tersebut, jumlah DPT yang dipastikan tidak dapat berpartisipasi dalam Pilgub Jawa Tengah sebanyak 10,67% atau menyumbang 33,76% dari total 31,61% DPT yang tidak menyumbangkan suaranya pada Pilgub Jateng Tahun 2018. Adapun 8,18% didominasi oleh warga masyarakat Purbalingga yang tidak dapat ditemui saat pendistribusian Formulir C6 KWK atau berada di luar wilayah Purbalingga.

Selain itu, dari pemilih penyandang disabilitas sebanyak 2.544 pemilih (0,35%), hanya 653 pemilih (25,67%) yang datang dan memilih di bilik suara. Rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas menyumbang 0,28% dari seluruh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pemilih disabilitas pada penyelenggaraan



Pilgub Jawa Tengah tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga adalah masyarakat penyandang cacat fisik maupun mental yang sudah mempunyai hak memilih. Berdasarkan data KPU Kabupaten Purbalingga, jumlah pemilih disabilitas tiap kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Rekapitulasi Pemilih Disabilitas Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga.

NO	KECAMATAN	PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PERSENTASE
1.	BOBOTSARI	191	68	35,60%
2.	BOJONGSARI	225	64	28,44%
3.	BUKATEJA	245	72	29,39%
4.	KALIGONDANG	184	61	33,15%
5.	KALIMANAH	118	19	16,10%
6.	KARANGANYAR	115	44	38,26%
7.	KARANGJAMBU	40	9	22,50%
8.	KARANGMONCOL	101	35	34,65%
9.	KARANGREJA	128	18	14,06%
10.	KEJOBONG	117	25	21,37%
11.	KEMANGKON	227	59	26,00%
12.	KERTANEGARA	143	33	23,08%
13.	KUTASARI	130	25	19,23%
14.	MREBET	103	18	17,48%
15.	PADAMARA	86	27	31,40%
16.	PENGADEGAN	98	12	12,24%
17.	PURBALINGGA	123	35	28,46%
18.	REMBANG	170	29	17,06%
JUMLAH		2.544	653	25,67%

Sumber : KPU Kabupaten Purbalingga

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga meliputi:

- Sosialisasi dan Parma/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis;
- Kehumasan, Media Center, dan Pelayanan Informasi;



Kegiatan Sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode antara lain melalui forum warga, komunikasi tatap muka, pemanfaatan budaya lokal/tradisional, media seperti WA, Facebook, Twitter, dll untuk menampilkan sosialisasi Pilgub Jateng 2018 kepada masyarakat, serta bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik seperti event bazar, bhakti sosial, olahraga bersama, dll. Adapun kelompok sasaran sosialisasi berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih penyandang disabilitas, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan/atau warga internet (netizen). Sedangkan untuk kegiatan Sosialisasi melalui media cetak atau media elektronik seperti *purbalingganew.net*, *Derap Perwira*, *Gema Legislatif*, *Radio LPPL Perwira*.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui perangkat daerah terkait juga terlibat secara aktif dalam upaya menyosialisasikan penyelenggaraan Pilgub Jateng antara lain :

- a. Fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik dalam rangka melibatkan peran ormas/orsospol guna menggandeng masyarakat lebih aktif/proaktif dalam pelaksanaan Pemilu sebagai pemilih;
- b. Sosialisasi kepada warga masyarakat umum pada momen kegiatan kemasyarakatan yang rutin dilaksanakan, seperti Subuh Berjamaah, Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Gotong Royong, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan pada setiap kesempatan lainnya yang dihadiri langsung oleh Kepala Daerah, maupun Kepala Wilayah seperti Camat/Lurah;
- c. Melalui media elektronik seperti Lembaga Penyiaran Lokal "Suara Perwira", facebook resmi Pemkab Purbalingga (Dinkominfo dan Humas Protokol Purbalingga, dan metode lain yang dipandang efektif.

Adapun sebagai upaya mendukung peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga melaksanakan kegiatan rutin dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, melalui beberapa kegiatan seperti :

- a. Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi siswa, tokoh agama maupun tokoh masyarakat ;
- b. Pendidikan Kader Bela Negara bagi generasi muda, anggota ORMAS / LSM.



Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut adalah :

- a. Masyarakat merasa partisipasi mereka tidak akan memberikan perubahan berarti bagi kehidupan mereka terutama dari segi sosial dan ekonomi.
- b. Masyarakat kurang mampu memahami dinamika serta proses politik yang terjadi, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan cenderung apatis terhadap politik atau Pemilu.
- c. Informasi dan sosialisasi terkait Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018 masih belum sepenuhnya dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, sehingga mereka tidak turut serta menggunakan hak pilihnya.
- d. Belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula

Solusi yang dilakukan adalah :

- a. Diadakan sosialisasi, fasilitasi, peningkatan pendidikan politik masyarakat khususnya melalui peran partai politik.
- b. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pendidikan bela negara dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air.

Program yang mendukung capaian sasaran tersebut adalah :

- a. Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik
- b. Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan
- c. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
- d. Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

**SASARAN 3 :*****MENINGKATNYA KETAATAN TERHADAP PERDA DAN PERBUP***

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Ketaatan Terhadap Perda dan Perbup* mendapatkan nilai rata-rata 102,05 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran *Meningkatnya Ketaatan Terhadap Perda dan Perbup*

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target Akhir RPJMD
Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	93	96	100	96	100	102,05	99

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum bersifat dinamis. Artinya mengandung aspek ketidakpastian kapan dan di mana lokus serta intensitas pelanggarannya. Hal ini cukup menyulitkan bagi petugas untuk melaksanakan operasi yustisi. Pada tahun 2018 Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah telah tercapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan intensitas kerjasama lintas sektoral serta diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen.

Patroli siaga yang dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan sebanyak 3 kali per hari. Dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Pemerintah didukung sejumlah aparat serta partisipasi masyarakat. Sampai dengan tahun 2018, jumlah Polisi Pamong Praja secara keseluruhan sebanyak 98 orang, dengan rasio per 10.000 penduduk adalah 1,01. Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dibantu oleh masyarakat yang bertugas sebagai perlindungan masyarakat (linmas). Sampai dengan tahun 2018,



jumlah tenaga linmas sebanyak 5.438 orang. Rasio linmas per 10.000 penduduk saat ini sebanyak 55.18. Sementara untuk mendukung tugas linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan tersedia sarana berupa Pos Siskamling sebanyak 2.019 buah dan rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan sebesar 8,44.

Guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melalui Kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tibumtranmas kepada 239 Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Razia PGOT, Penertiban PKL, Razia Reklame, DBHCHT, Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam Teknik Penegakan Perda, Penertiban Pelanggaran Hukum terhadap ketentuan Pidana Perda Perkada.

Untuk menekan angka pelanggaran perda di Kabupaten Purbalingga hal-hal yang dilakukan antara lain dengan :

1. Operasi Pembinaan dan Penertiban PKL

Pada tahun 2018, operasi Pembinaan dan Penertiban PKL dilakukan sebanyak 76 kali. Jumlah PKL yang terdata di Kabupaten Purbalingga sebanyak 710 PKL. Dari hasil operasi dan pembinaan PKL telah dilakukan Penyelesaian Non Yustisi seperti 52 PKL membuat surat pernyataan, 47 PKL diberi Surat Peringatan dan 47 PKL dilakukan Penertiban karena tidak mengindahkan surat peringatan I, II dan surat Peringatan III yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Purbalingga, adapun titik operasi pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti di Jalan Jendral Soedirman, MT Haryono, S. Parman, A. Yani, Letkol Isdiman, Komisaris Noto Sumarsono, M. Yusup, Mayjend Sungkono, DI. Panjaitan, AW Sumarmo, Pujowiyoto, Pasar Rakyat Bobotsari, Pasar Rakyat Bukateja, Pasar Rakyat Padamara, R. Suprpto dll.

2. Razia Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)

Razia PGOT pada tahun 2018 dilakukan 67 kali dan sebanyak 396 orang yang terjaring razia. Adapun yang dijadikan titik razia perempatan lampu lalu lintas Kapten Sarengat, Bancar, Karangkabur, Sirongge, Kedungmenjangan, Air Mancur Pasar Segamas, Perempatan Terminal Purbalingga dan lokasi lain yang diperoleh dari aduan masyarakat. Kegiatan Razia Anak Sekolah sebanyak 36 kali dengan jumlah anak sekolah yang terjaring razia sebanyak 100 (seratus) orang, lokasi target razia seperti Alun-alun, Pasar Hewan, Bumi Perkemahan Munjulluhur, Taman Kota, Warnet, Game Playstation dan lokasi lain yang diperoleh dari laporan masyarakat, dalam hal pengaduan pelanggaran yang terjadi semua dapat

ditindaklanjuti baik dengan pembinaan, pemanggilan, maupun dengan penyidikan. Dengan demikian persentase penyelesaian pelanggaran Penegakan Perda tercapai 100%.

3. Penertiban Reklame

Penertiban Pemasangan Reklame yang dilakukan sebanyak 85 kali kegiatan. Dari hasil tersebut, penertiban reklame yang dilakukan ada 1.127 kasus antara lain banner, spanduk, layur dan baleho serta pamflet yang berada di 18 Kecamatan

Grafik 3.2 Cakupan Penegakkan Perda dan Perkada



Table 3.16 Data Penegakan Perda dan Perkada Kurun Waktu 2015-2018

No.	Kegiatan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1.	PGOT	14	22	213	396
2.	PKL	50	13	2.117	1.654
3.	Razia Anak Sekolah	41	14	52	100
4.	Razia PSK	-	33	5	-
5.	Razia Miras	15	19	7	6
6.	DBHCHT	-	-	16	-



No.	Kegiatan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
7.	Razia Reklame	16	20	714	1.127

Sumber : Satpol PP Kabupaten Purbalingga

Adapun kendala penanganan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain :

1. Tidak ada/atau terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas PPNS yang ada di Kabupaten Purbalingga seperti gedung khusus PPNS;
2. Belum terbangunnya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Purbalingga berkenaan dengan tindak pelanggaran operasi yustisi;
3. Kerjasama dalam pengawasan Galian Mineral Logam Bukan Batu Bara (Mineralba) dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum optimal;
4. Belum optimalnya kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan trantibum antara lain Satpol PP dengan DINSOSDALDUKKBP3A (penanganan PGOT), DPMTSP (Perizinan Reklame), DPU-PR (Sempadan Jalan dan Sungai), Dinperindag (Pembinaan dan Penertiban PKL), Dinporapar (Tertib Tempat Rekreasi/ wisata), Dindikbud (Razia Anak Sekolah);
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pemungutan Pajak Reklame belum berjalan efektif dan kompetitif;

Solusi guna mengatasi kendala permasalahan tersebut diatas, dilakukan dengan upaya-upaya, seperti :

1. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana serta anggaran operasional guna mewadahi dan mendukung operasional Sekretariat PPNS Kabupaten Purbalingga, seperti Gedung, Gudang Barang Bukti, Ruang Rapat, komputer dan kelengkapan lain;
2. Menyusun draf rencana kerjasama (MoU) Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Kejaksaan Negeri Purbalingga (selaku eksekutor) dan Pengadilan Negeri Purbalingga (agar Hakim memutus perkara pelanggaran Perda dan Perkada)



- dengan putusan berupa denda maupun perkara amar putusan dinyatakan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Menyusun draf kerjasama berkaitan pengawasan mineral logam bukan batu bara antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
 4. Membentuk Kader Siaga Tramtib (KST) atau memanfaatkan Kader Bela Negara yang sudah ada guna membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga sebagai informan adanya pelanggaran Perda dan Perkada, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Purbalingga.
 5. Perlu adanya intensitas Kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tibumtranmas kepada stakeholder, OPD terkait dan masyarakat.

Program yang mendukung capaian sasaran tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
2. Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

SASARAN 4 :

TERWUJUDNYA RASA AMAN DAN TENTRAM DALAM MASYARAKAT

Tabel 3.17 Capaian Sasaran Terwujudnya Rasa Aman dan Tentram Dalam Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target Akhir RPJMD
Angka Kriminalitas	persen	3,55	3,54	2,46	3	1,73	173,41	60

Pada tahun 2018, angka kriminalitas yang terjadi sebesar 1,73%. Kejadian kriminalitas yang terjadi sebanyak 171 kasus dan terselesaikan sebanyak 134 kasus. Capaian tersebut menurun dibandingkan dari capaian tahun 2017 sebesar 2,46%.



Tabel 3.18 Data Kriminalitas Purbalingga

NO.	KASUS	LAPORAN	TERSELESAIKAN
1.	Pencurian berat	51	32
2.	Pencurian dengan kekerasan	5	5
3.	Pencurian kendaraan bermotor	29	14
4.	Pencurian biasa	1	1
5.	Penipuan	9	9
6.	Penggelapan	16	14
7.	Perjudian	9	9
8.	Pengroyokan	7	7
9.	Korupsi	1	1
10.	Penganiayaan	11	11
11.	Pencabulan	4	4
12.	Persetubuhan	11	11
13.	Perzinaan	1	1
14.	Pengrusakan	2	2
15.	Fidusia	1	1
16.	Pemerasan	1	1
17.	ITE	1	0
18.	Pencemaran nama baik	1	1
19.	Perbuatan tidak menyenangkan	1	1
20.	Perampasan	2	2
21.	Pencurian ringan	2	2
22.	Perkelahian	1	1
23.	Kekerasan anak	2	2
24.	Serobot tanah	1	1
25.	Percobaan pemerkosaan	1	1
Jumlah		171	134

Sumber : Polres Purbalingga



Tabel 3.19 Data Kejadian Kriminalitas Per Kepolisian Sektor

NO.	POLSEK	LAPORAN	TERSELESAIKAN
1.	Purbalingga	13	13
2.	Kalimanah	8	8
3.	Kemangkon	5	6
4.	Kaligondang	5	5
5.	Rembang	2	2
6.	Kejobong	6	5
7.	Karangreja	9	7
8.	Kutasari	8	6
9.	Bojongsari	4	3
10.	Bukateja	4	3
11.	Padamara	4	3
12.	Karangmoncol	4	3
13.	Pengadegan	5	3
14.	Bobotsari	4	2
15.	Mrebet	14	7
16.	Karanganyar	6	2

Sumber : Polres Purbalingga

Guna menurunkan angka kriminalitas di Purbalingga, pemerintah bekerjasama dengan instansi terkait guna mendukung Program Keamanan, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat seperti kegiatan- kegiatan, antara lain:

1. Patroli wilayah bersama dengan unsur TNI, Polri bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dengan titik sasaran daerah-daerah rawan keamanan dan ketertiban umum seperti GOR Goentor Darjono Purbalingga, Bumi Perkemahan, Taman Terbuka Hijau, Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga
2. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Eks Pembantu Bupati Wilayah Purbalingga, Bobotsari dan Bukateja
3. Pelatihan Satlinmas Inti sebanyak 62 (enam puluh dua) orang Linmas dari Kecamatan Kejobong dan Kecamatan Kalimanah.



4. Monitoring Daerah Rawan Bencana dan Kejadian Bencana di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
5. Pembinaan Khusus bagi Anggota Satlinmas Inti.

Kendala/ permasalahan angka kriminalitas di Wilayah Kabupaten Purbalingga, seperti :

1. Angka kenakalan remaja yang masih tinggi disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah;
2. Jumlah lapangan pekerjaan yang belum merata bagi masyarakat antara pria dan wanita;
3. Masih terlihat adanya kesenjangan sosial atau kemiskinan;
4. Kurang terbangunnya sinergitas antara Satpol PP dengan aparat keamanan lainnya seperti Kepolisian, TNI, Unsur Kecamatan, Aparat Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
5. Kurang optimalnya peran Satuan Perlindungan Masyarakat di desa/kelurahan dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana LINMAS serta anggaran kesejahteraan dan pelatihan;
6. Penegakan hukum yang masih sektoral belum komprehensif.

Adapun guna mengatasi permasalahan/kendala tersebut diatas solusi yang telah dilaksanakan, seperti :

1. Kegiatan Razia Anak Sekolah di luar sekolah pada saat jam sekolah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, kemudian anak sekolah yang terjaring razia dilakukan pembinaan dengan memanggil orang tua siswa untuk ikut serta mengawasi putra/putrinya agar tidak membolos sekolah;
2. Mengupayakan pembukaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi PMA di Kabupaten Purbalingga, serta meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui Produk Bela-Beli;
3. Program simultan RTLH yang dilaksanakan dalam program prioritas Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan juga kegiatan GERMAS;
4. Terlaksananya sinergitas aparat keamanan guna meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban umum seperti Patroli terpadu antara TNI/Polri dan Satpol PP, Pengamanan Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan Tamu VIP serta Pengamanan Pilkades Serentak 184 Desa di Kabupaten Purbalingga;



5. Guna mengoptimalkan peran serta Satuan Perlindungan Masyarakat dilakukan upaya seperti Pelatihan Satlinmas Inti, Pendataan dan Pembuatan KTA LINMAS, Pembinaan dan Pelatihan khusus Satlinmas Inti, Mengirimkan Satlinmas Desa/Kelurahan untuk mengikuti Bimtek yang di selenggarakan oleh Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini oleh Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dengan kegiatan di Rindam IV/ Diponegoro, Brigif/4 - Dewa Ratna Slawi Kabupaten Tegal, mengirimkan Satlinmas dalam Kegiatan Jambore Satlinmas di Kabupaten Sukoharjo dll.;
6. Meningkatkan aktifitas ronda keliling yang dilaksanakan oleh warga masyarakat desa di wilayah kecamatan se Kabupaten Purbalingga

Program yang mendukung terwujudnya sasaran tersebut adalah :

- a. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
- b. Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
- c. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda

SASARAN 5 :

TERTANGANINYA KORBAN BENCANA

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Tertanganinya Korban Bencana* mendapatkan nilai rata-rata 215 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran *Tertanganinya Korban Bencana*

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target Akhir RPJMD
Cakupan Korban Bencana Alam yang tertangani	Persen	100	100	63	45	96,85	215	60



Wilayah Kabupaten Purbalingga dinilai masuk dalam wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan oleh BNPB Tahun 2018, Kabupaten Purbalingga menempati rangking 28 dari 35 Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, dan pada peringkat 192 secara nasional dengan skor 62. Indeks tersebut diukur dengan memperhitungkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana.

Berdasarkan kegiatan pemantauan daerah rawan bencana dan kejadian bencana, dapat terpetakan daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 3.21 Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Purbalingga

No	Jenis Bencana	Kecamatan Rawan Bencana
1.	Banjir	Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Purbalingga, Kaligondang, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang
2.	Longsor	Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Purbalingga, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang
3.	Gunung Berapi	Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Karangreja
4.	Gempa Bumi	-
5.	Kekeringan	Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Purbalingga, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang
6.	Angin Ribut	Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja,



No	Jenis Bencana	Kecamatan Rawan Bencana
		Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang
7.	Kebakaran Rumah/ Lahan	Semua kecamatan berpotensi terjadi kebakaran rumah/ lahan

Sumber : BPBD Kabupaten Purbalingga

Pemetaan daerah rawan bencana tersebut dengan mempertimbangkan faktor topografi Kabupaten Purbalingga yang beraneka ragam meliputi dataran tinggi/pegunungan dan dataran rendah. Daerah bagian utara yang berbukit – bukit dengan kelerengan lebih dari 40% sehingga berpotensi longsor. Selanjutnya Bagian Selatan merupakan daerah yang relatif rendah dengan nilai faktor kemiringan berada antara 0 – 25 % sehingga berpotensi banjir maupun kekeringan. Selanjutnya pada sebagian wilayah Kabupaten Purbalingga berada di bawah kaki Gunung Slamet, sehingga berpotensi terdampak letusan Gunung berapi. Adapun potensi angin ribut hampir semua kecamatan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Pada tahun 2018, tercatat kejadian bencana sebanyak 92 kali, meliputi kejadian bencana angin ribut sebanyak 13 kali, bencana kebakaran sebanyak 40 kali, bencana banjir sebanyak 8 kali, bencana tanah longsor sebanyak 31 kali. Sedangkan musim kemarau yang panjang pada bulan Agustus sampai dengan Nopember 2018 juga berdampak kekeringan pada beberapa desa di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Karangreja, Kejobong, Karanganyar, Bobotsari, Kertanegara, Kaligondang, Pengadegan, Karangmoncol, Kutasari, Mrebet, Bojongsari, Kemangkong, Bukateja, Rembang dan Karangjambu.

Kejadian bencana pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebanyak 112 kali. Adapun dari kejadian bencana tersebut, untuk bencana kebakaran sebagai bencana non alam di tahun 2018 mengalami kenaikan 1,1 % dibandingkan kejadian tahun 2017, yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kejadian kebakaran di tahun 2017, dan di tahun 2018 terjadi 40 (empat puluh) kejadian kebakaran.

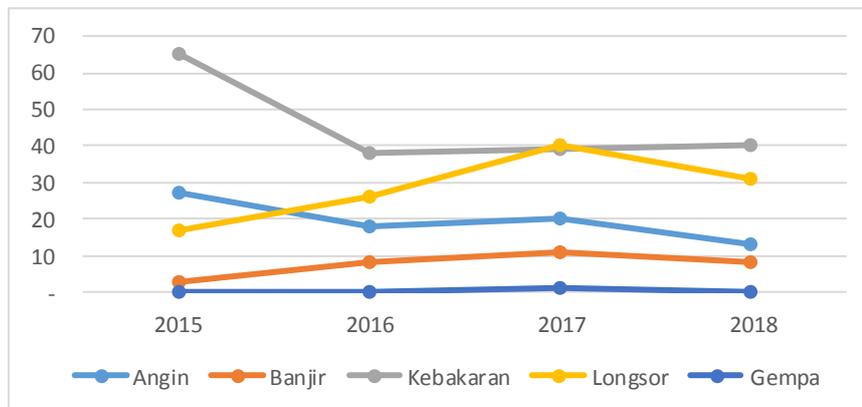
Tabel 3.22 Kejadian Bencana Alam Tahun 2018

No.	Bulan	Jumlah Kejadian (kali)	Terdampak							
			Jiwa		Rumah					
			Meninggal (org)	Luka (org)	Roboh (unit)	Rusak berat (unit)	Rusak Sedang (unit)	Rusak ringan (unit)	Terancam (unit)	Jumlah (unit)
1	ANGIN	13	-	-	2	2	13	21	-	38
2	KEBAKARAN	37	-	-	11	15	12	11	-	49
3	BANJIR	8	-	-	-	-	3	-	71	74
4	TANAH LONGSOR	31	4	9	-	10	18	9	39	76
5	GEMPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KEKERINGAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	92	4	9	13	27	46	41	110	237

Sumber : BPBD Kabupaten Purbalingga

Bencana pada Tahun 2015 – 2018 disajikan pada grafik sebagai berikut :

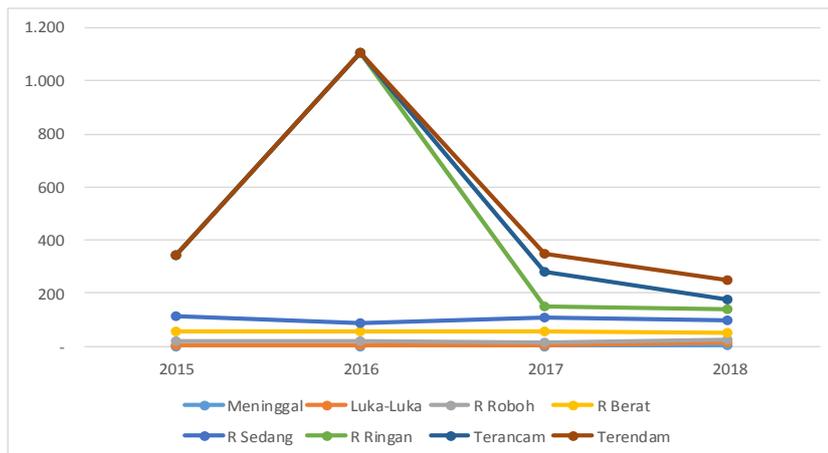
Grafik 3.3 Kejadian Bencana Tahun 2015 - 2018



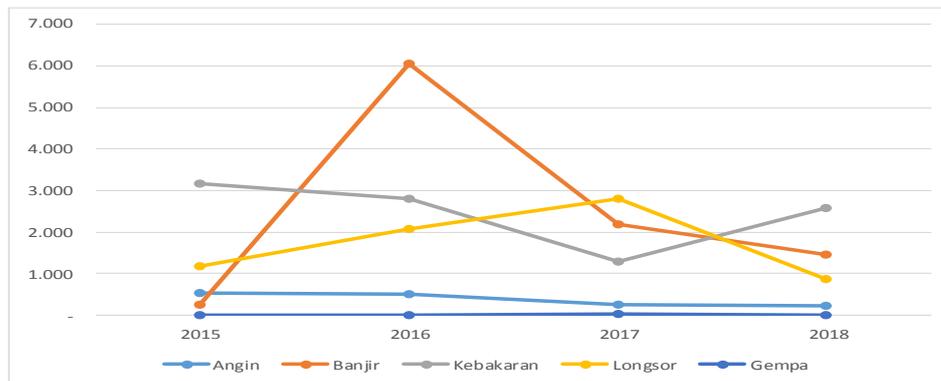
Dampak dari kejadian bencana tersebut mengakibatkan kerusakan rumah di sekitar wilayah yang terkena bencana. Rumah yang terdampak bencana sebanyak 237 unit, terbagi menjadi beberapa kriteria yaitu roboh, rusak berat, rusak sedang, rusak ringan dan terancam. Nilai kerugian yang dialami sebesar Rp. 5.324.053.750,-.

Berikut disajikan grafik dampak dan kerugian akibat bencana sebagai berikut :

Grafik 3.4 Dampak Bencana Tahun 2015 - 2018



Grafik 3.5 Kerugian Bencana Tahun 2015 - 2018



Dari grafik dampak dan kerugian bencana tersebut, tampak bahwa korban terdampak dari bencana di wilayah Kabupaten Purbalingga semakin menurun, sehingga beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan waspada bencana cukup berhasil.

Upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menangani korban bencana sebagai berikut :

Tabel 3.23 Bantuan Bencana Tahun 2018

NO	BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH KERUGIAN	JUMLAH PENERIMA BANTUAN	
				JUMLAH KK	BESAR BANTUAN
1	ANGIN	13 Kali	Rp. 235.450.000,-	23 orang	Rp 45.250.000,-

NO	BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH KERUGIAN	JUMLAH PENERIMA BANTUAN	
				JUMLAH KK	BESAR BANTUAN
2	KEBAKARAN	37 Kali	Rp. 2.581.460.000,-	38 orang	Rp. 170.200.000,-
3	BANJIR	8 Kali	Rp. 1.469.143.750,-	3 orang	Rp. 6.000.000,-
4	TANAH LONGSOR	31 Kali	Rp. 1.038.000.000	35 orang	Rp. 144.700.001,-
5	GEMPA	-	Rp. -	-	-
6	KEKERINGAN	1 Kali	Rp. -	30 Desa (15 Kec)	Rp. 478.030.324,- /3018 tangki
	TOTAL	89 Kali	Rp. 5.144.053.750	99 orang	Rp. 366.150.000,-

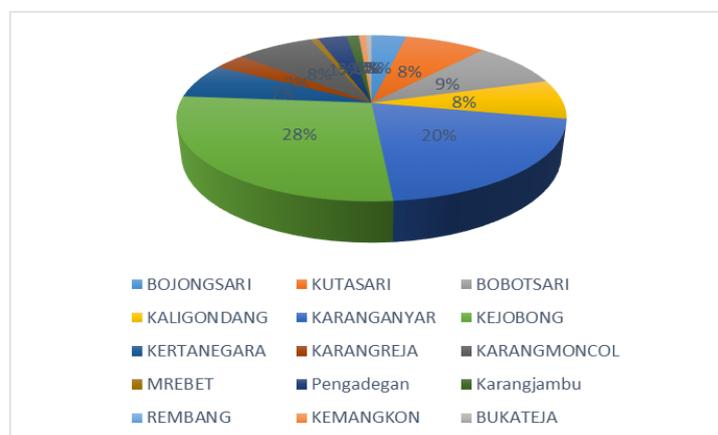
Sumber : BPBD Kabupaten Purbalingga

Bantuan kepada korban bencana diberikan dengan kriteria sebagai berikut :

- Bantuan uang yang diberikan kepada korban yang mengalami dampak kerugian berat/ sedang sejumlah 99 orang dengan total bantuan uang sebesar Rp. 366.150.000,- yang berasal dari APBD, PMI dan Baznas.
- Bantuan logistik diberikan kepada seluruh korban terdampak bencana baik berat, sedang maupun ringan sejumlah 123 orang dengan total bantuan senilai Rp. 577.236.000,- .

Untuk bencana kekeringan yang melanda 75 Desa di 15 Kecamatan wilayah Kabupaten Purbalingga, telah dilaksanakan dropping air bersih sebanyak 3.018 tangki senilai Rp. 478.030.324,-.

Grafik 3.6 Bantuan Bencana Kekeringan Tahun 2018





Selanjutnya berdasarkan perhitungan tersebut, maka realisasi cakupan korban bencana yang tertangani adalah :

Tabel 3.24 Realisasi Korban Bencana yang Tertangani

NO	JUMLAH KORBAN BENCANA (BERAT/SEDANG/RINGAN)	JUMLAH KORBAN BENCANA YANG TERTANGANI	REALISASI %
1	127	123	96,85

Dari total korban bencana sebanyak 127 orang, hanya 123 korban yang diberi bantuan baik berupa uang maupun logistik. Adapun sebanyak 4 orang tidak diberi bantuan karena hanya terdampak bencana dengan kategori rusak ringan yang berasal dari keluarga mampu secara ekonomi.

Pada tahun 2018 juga diberikan bantuan bagi korban bencana yang terdampak tahun 2017 sebanyak 36 orang dengan bantuan sebesar Rp. 201.500.000,-. Hal ini disebabkan bencana terjadi pada akhir tahun anggaran, sehingga pemberian bantuan tidak dapat diberikan pada tahun 2017.

Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan bencana secara umum adalah:

a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat, antara lain yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Wilayah Serang Kecamatan Karangreja, yang memiliki potensi tanah longsor maupun terdampak letusan Gunung Slamet;
- 2) Simulasi Penanganan Bencana di wilayah Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan tema "Terbentuknya Desa Yang Siap Evakuasi Mandiri". Dalam kegiatan ini juga melibatkan masyarakat, serta Tim Penyelamat yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan;
- 3) Pelatihan dan Sosialisasi Budaya Sadar Bencana di wilayah Karanganyar dan Kertanegera.

Selanjutnya kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergiliran dengan kelompok sasaran adalah daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Purbalingga.

- b. Melakukan koordinasi dengan pihak teknis terkait dalam mengupayakan pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanganan bencana;
- c. Melaksanakan monitoring daerah potensi bencana terutama pada daerah-daerah yang sering terkena bencana;
- d. Melakukan pendataan laporan masyarakat yang terkena bencana sebagai rujukan upaya pencegahan selanjutnya;
- e. Menyalurkan bantuan kepada korban bencana;
- f. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana;
- g. Melaporkan kejadian bencana ke tingkat provinsi (BPBD Provinsi Jateng) dan ke BNPB di Jakarta.

Selanjutnya untuk penanganan bencana kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Grafik 3.7 Cakupan Pencapaian Penanganan Bahaya Kebakaran



Kejadian kebakaran di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,1% dibandingkan kejadian di tahun 2017, yaitu dari 38 (tiga puluh delapan) kejadian kebakaran sedangkan di tahun 2018 terjadi 40 (empat puluh) kejadian kebakaran. Adapun penanganan kebakaran tahun 2018 hanya mencapai target sebesar 90%, dikarenakan dari 40 kejadian hanya teratasi 36 kejadian. Selanjutnya dari 40



kejadian, 38 korban terdampak yang mendapatkan penanganan atau bantuan dari BPBD Kabupaten Purbalingga dengan memprioritaskan korban terdampak dengan rusak berat atau sedang.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mengurangi resiko bencana kebakaran antara lain melalui sosialisasi penanganan bahaya kebakaran yang ditujukan kepada petugas fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Purbalingga yaitu Rumah Sakit dan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, warga masyarakat dengan kelompok sasaran ibu – ibu PKK, Ibu Rumah Tangga, serta bagi karyawan – karyawan perusahaan. Selain itu juga dilaksanakan pemantauan ketersediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) pada Perusahaan – perusahaan, Rumah Sakit, Ruko-ruko dan pembentukan Kader Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran bagi Pemuda dan Ormas sebanyak 85 Orang.

Adapun beberapa kendala dan hambatan dalam penanganan bahaya kebakaran antara lain :

1. Belum ada pemetaan daerah rawan kebakaran seperti jumlah kepadatan penduduk, kerentanan bangunan, luas kawasan pemukiman, jumlah perusahaan, jumlah perumahan dll;
2. Belum terpenuhinya cakupan pelayanan bencana kebakaran (Pos Wilayah Manajemen Kebakaran) dengan tingkat waktu tanggap (segera dan cepat 7,5 Km ditempuh waktu 15 menit) ;
3. Presentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi belum memadai;
4. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter per Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) belum memadai;
5. Jumlah Pos Pemadam Kebakaran yang ada baru 3 (tiga), adapun satu Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Rembang belum beroperasi dikarenakan belum adanya dukungan personel, anggaran dan sarana prasarananya (baru tersedia bangunan gedung).

Adapun solusi guna mengatasi kendala/permasalahan tersebut di atas perlu di upayakan melalui :



1. Pembentukan 5 (Lima) Pos Pemadam Kebakaran, yaitu :
 - a. Pos Induk Pemadam kebakaran karena saat ini masih menggunakan Aset Milik BPBD Purbalingga;
 - b. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Karangjambu;
 - c. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Bukateja
 - d. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kaligondang; dan
 - e. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kejobong
2. Melaksanakan pemetaan Tibumtranmas berbasis Sistem Informasi Geospasial (SIG) pada tahun 2019 seperti Luas Permukiman, Kepadatan Penduduk, Jumlah Perusahaan, Penyebaran Hydrant dll.;
3. Mewujudkan implementasi inovasi Laporan Kebakaran BERNIK (Berbasis Nomor Induk Kependudukan), diharapkan dengan inovasi tersebut masyarakat akan lebih berperan secara langsung dan berdampak pada percepatan melakukan tindakan antisipasi dan penanganan gangguan yang timbul di masyarakat.
4. Mengusulkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pembentukan UPTD Pemadam Kebakaran sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Program yang mendukung Sasaran Tertanganinya Korban Bencana adalah :

- a. Program Fasilitasi, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Bencana
- b. Program Penanggulangan Bencana
- c. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
- d. Program Penanggulangan Bencana Kebakaran

**Misi 3 :**

“MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MANUSIA UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK “

SASARAN 6 :

MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Ketahanan Pangan* mendapatkan nilai capaiannya sebesar 99,62% dengan kategori berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan*

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target Akhir
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	N/A	83,34	85,21	85,82	85,5	99,62	87,64

Pada tahun 2018 terjadi kenaikan produksi padi sebesar 6.429 ton GKG atau sebesar 2,52%. Produksi jagung mengalami penurunan sebesar 456 ton Pipilan Kering atau sebesar 1,14 %. Produksi kedelai mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 10.249 ton biji kering atau sebesar 4.555,11 %. Produksi Daging tahun 2018 mengalami kenaikan 1.230,99 ton atau sebesar 8,41%.

Tabel 3.26 *Produktifitas Pertanian*

Uraian	Produksi	Tahun 2017	Tahun 2018
Produksi Padi	- Luas Panen	42.647,2 Ha	42.346,2 Ha
	- Produktivitas (GKG)	53,95 Kw/Ha	61,67 Kw/Ha



Uraian	Produksi	Tahun 2017	Tahun 2018
	- Produksi (GKG)	234.999 Ton	261.140 Ton
	- Produksi Beras	145.519,37 Ton	165.041,07 Ton
Produksi Jagung	- Luas Panen	8.530,5 Ha	6.858,4 Ha
	- Produksi (pipilan kering)	51.477 Ton	39.674 Ton
	- Produktivitas	60,34 Kw/Ha	57,85 Kw/Ha
Produksi Kedelai	- Luas Panen	84,1 Ha	8.419,4 Ha
	- Produksi (wose kering)	124 Ton	10.474 Ton
	- Produktivitas	14,74 Kw/Ton	12,44 Kw/Ton
Produksi Daging		13.721,1 Ton	15.864,99 Ton

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

Produksi daging pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.230,99 ton atau sebesar 7,76%. Kenaikan produksi daging disebabkan adanya kenaikan pemotongan hewan yang signifikan pada hari raya Qurban dan hari raya lainnya juga adanya kenaikan konsumsi masyarakat untuk pemenuhan protein yang berasal dari daging ayam potong/broiler dan kecenderungan harga daging yang relatif stabil dan terjangkau masyarakat.

Tabel 3.27 Rekapitulasi Produksi Ternak

Jenis Ternak	Produksi Daging 2017 (Kg)	Produksi Daging 2018 (Kg)
Sapi Potong	1.097.800	1.276.600
Kerbau	1.500	1.600
Kambing	724.740	761.100
Domba	132.560	149.400
Kelinci	1.460	1.800
Ayam layer	161.141	52.000
Ayam broiler	9.848.430	10.888.500
Ayam buras	1.370.132	2.643.400
Itik	118.260	54.200
Burung puyuh	114.673	3.890
Angsa	30.660	900
Entog	219.000	30.800



Merpati	730	800
Jumlah	13.721.090	15.864.990

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

Secara umum ketahanan pangan Kabupaten Purbalingga cukup baik dari sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Pada sistem ketersediaan pangan berdasarkan hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 produksi komoditas pangan utama menunjukkan surplus apabila dibandingkan dengan konsumsi penduduknya. Untuk komoditas beras mengalami surplus sebanyak 78.582 ton. Namun demikian terdapat beberapa komoditas yang produksinya lebih sedikit dibandingkan dengan konsumsinya.

Tabel 3.28 Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

No	Kelompok Bahan Pangan	Kebutuhan/ Tahun (ton)	Kebutuhan/ bulan (ton)	Kebutuhan/ harian (ton)
1	Padi-padian (beras, jagung)	111.722	9.489	306
2	Umbi-umbian	26.572	2.257	73
3	Pangan Hewani	29.101	2.472	80
4	Minyak dan Lemak	9.901	841	27
5	Buah/Biji berminyak	903	77	2
6	Kacang-kacangan	10.670	906	29
7	Gula	8.329	707	23
8	Sayuran dan buah	88.876	7.548	243
9	Lain-lain	-	-	-

Sumber : DKPP Kabupaten Purbalingga

Tabel 3.29 Kebutuhan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

No	Kelompok Bahan Pangan	Produksi (ton)	Kebutuhan/ Tahun (ton)	Surplus/ Minus
1	Padi-padian (beras, jagung)	190.304	111.722	78.582
2	Umbi-umbian	72.939	26.572	46.367
3	Pangan Hewani	32.687	29.101	3.586
4	Minyak dan Lemak	16.631	9.901	6.730
5	Buah/Biji berminyak	12.641	903	11.736
6	Kacang-kacangan	8.795	10.970	-1.875



No	Kelompok Bahan Pangan	Produksi (ton)	Kebutuhan/ Tahun (ton)	Surplus/ Minus
7	Gula	56.631	8.329	48.302
8	Sayuran dan buah	71.991	88.876	-16.885
9	Lain-lain	-	-	-

Sumber : DKPP Kabupaten Purbalingga

Neraca bahan makanan sebagaimana tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : Produksi padi-padian Kabupaten Purbalingga dikurangi jumlah yang dibutuhkan masih surplus sebanyak 78.682 ton. Ketersediaan padi-padian sangat aman. Demikian pula umbi-umbian masih mengalami surplus sebanyak 46.367 ton ini juga akibat tingkat konsumsi masyarakat terhadap umbi-umbian masih rendah. Pangan hewani sangat cukup dengan surplus 3.586 ton, sebaliknya angka konsumsi pangan hewani masih baru pada besaran skor 14 dari 24 skor ideal, hal ini dikarenakan pangan hewani masih dirasa mahal. Minyak dan lemak juga kondisi surplus sebanyak 6.730 ton. Dari segi konsumsi, kebutuhan minyak dan lemak juga sudah mencukupi skor 5. Buah dan biji berminyak seperti kelapa, kemiri dsb kondisinya surplus mencapai 11.738 ton, meskipun konsumsi masyarakat masih kurang. Kacang-kacangan minus 1.875 ton, meskipun tidak kekurangan karena adanya pasokan dari luar daerah. Tetapi dilihat dari produksi daerah masih kekurangan. Keberadaan gula masih surplus 48.302 ton. Utamanya adalah gula kelapa dengan berbagai varian dan juga gula tebu. Adapun Sayur dan buah-buahan mengalami defisit 16.885 ton dengan membandingkan produksi dan konsumsi, tetapi pada kenyataannya dengan masuknya pasokan buah dan sayuran dari luar daerah sangat mencukupi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nilai negatif (defisit) ini dikarenakan melihat sisi produksi buah dan sayuran dari lokal.

Dari sisi cadangan pangan masyarakat, berdasarkan hasil pendataan lumbung pangan di Kabupaten Purbalingga jumlahnya masih banyak, lumbung yang masih aktif, berkembang dan dikelola oleh masyarakat berjumlah 144 unit pada 75 desa/kelurahan. Lumbung pangan masyarakat tersebut berupa lumbung desa, lumbung kelompok tani, lumbung RT, lumbung RW, lumbung dusun dan lumbung mardilayon. Secara umum pengelolaannya bersifat sederhana dan bersifat sosial untuk simpan pinjam gabah, dengan aset rata-rata setiap lumbung berkisar 5 ton gabah.



Pada sistem distribusi pangan, secara umum distribusi pangan berjalan lancar. Demikian juga dari akses dan harga pangan relatif stabil. Hanya beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan pada saat-saat tertentu dan bahan pangan yang masih mengalami ketergantungan pada impor.

Pada sistem konsumsi pangan, langkah yang telah ditempuh adalah peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan. Hal tersebut dapat diukur dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang menunjukkan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Hasil survei konsumsi pangan Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2018, skor PPH adalah 85,5, sebagaimana tabel 3.13 Angka tersebut menunjukkan bahwa pola keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat tergolong relatif cukup baik, walaupun belum mencapai angka yang ideal yaitu 100. Konsumsi pangan yang masih kurang diantaranya bersumber dari kelompok pangan hewani.



Tabel 3.30 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita /Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	910,8	3.421,2	79,3	152,1	0,5	39,7	76,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	79,4	96,3	2,2	4,3	0,5	1,1	2,1	2,5	2,1
3	Pangan Hewani	87,0	174,5	4,0	7,8	2,0	8,1	15,5	24,0	15,5
4	Minyak dan Lemak	29,6	267,2	6,2	11,9	0,5	3,1	5,9	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	2,7	16,1	0,4	0,7	0,5	0,2	0,4	1,0	0,4
6	Kacang-kacangan	31,9	79,8	1,8	3,5	2,0	3,7	7,1	10,0	7,1
7	Gula	24,9	91,9	2,1	4,1	0,5	1,1	2,0	2,5	2,0
8	Sayur dan Buah	265,7	127,7	3,0	5,7	5,0	14,8	28,4	30,0	28,4
9	Lain-lain	47,7	39,6	0,9	1,8	-	-	-	-	-
	Total		4.314,3	100,0	191,7		71,7	137,5	100,0	85,5

Sumber : DKPP Kabupaten Purbalingga



Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menemukan pola penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2018 sebesar 85,5 dari tahun 2017 sebesar 85,21 dan 2016 sebesar 83,34. Dari 9 komponen bahan makanan yang dikonsumsi bisa kita ukur skor PPH konsumsi rata - rata Masyarakat Purbalingga. Konsumsi beras sudah mencukupi, dengan skor 25 dari 25 yang dipersyaratkan. Konsumsi umbi - umbian sudah mencapai 2,1 dari 2,5 yang dipersyaratkan. Pangan hewani baru mencapai skor 15,5 dari 24 skor yang dipersyaratkan.

Konsumsi minyak sudah mencapai skor 5 dari skor 5 yang dipersyaratkan. Konsumsi biji - bijian sudah mencapai 0,4 dari skor 1 yang dipersyaratkan. Konsumsi kacang - kacangan sudah mencapai skor 7 dari skor 10 yang dipersyaratkan. Konsumsi gula sudah mencapai skor 2 dari skor 2,5 yang ideal. Konsumsi sayur - sayuran sudah mencapai skor 24 dari skor 30 yang dipersyaratkan.

Itu artinya konsumsi masyarakat Purbalingga yang masih kurang adalah konsumsi pangan hewani dan kacang - kacangan. Dari skor PPH yang terlihat bahwa Target 2018 adalah sebesar 85,82 namun tercapai 85,5. Dari skor pola pangan harapan diatas bisa terlihat bahwa angka konsumsi protein hewani masih kurang. Oleh sebab itu perlu adanya intervensi terhadap peningkatan angka konsumsi hewani.

Kendala yang dihadapi antara lain :

Belum optimalnya upaya pemenuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih di bawah standar pola pangan harapan.

Dalam rangka pemenuhan pangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan terobosan - terobosan sebagai berikut :

1. Mengadakan kegiatan pembagian Raskin untuk rakyat Miskin.
2. Meningkatkan kegiatan Gemar ikan dengan pemberian makanan tambahan anak sekolah berbasis ikan dan Kegiatan Penganeekaragaman konsumsi pangan Untuk B2SA juga ditingkatkan lagi dengan menu berbasis ikan.



Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Status Pangan Masyarakat adalah :

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat
- c. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
- d. Program Pengembangan Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan
- e. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- f. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan
- g. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura
- h. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan
- i. Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair
- j. Program Pengembangan Budidaya Peternakan
- k. Program Pengembangan, Pengolahan, dan Pemasaran Produk Peternakan

SASARAN 7 :

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI

Hasil evaluasi pada sasaran strategis Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni mendapatkan nilai capaiannya sebesar 100,87% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31 *Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni*

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target Akhir RPJMD
Persentase rumah layak huni	persen	88,58	93,28	91,33	93,74	102,64	93,9

Kebutuhan rumah layak huni tidak hanya dicukupi melalui perbaikan fisik rumah, namun juga perlu dilengkapi dengan ketersediaan akan akses sarana prasarana yang



menunjang antara lain dengan adanya akses air minum dan sanitasi limbah rumah tangga, sehingga diharapkan dengan ketersediaan sarana prasarana tersebut akan meningkatkan kualitas rumah layak huni yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat.

Jumlah kepala keluarga yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 sebanyak 324.529 KK, yang terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah rumah tangga yang sudah mempunyai rumah sebanyak 246.669 KK atau 76,01% dan yang belum mempunyai rumah sebanyak 77.860 KK atau 23,99%.

Pada tahun 2018 dari jumlah rumah sebanyak 246.669 rumah yang sudah masuk kategori rumah layak huni sebanyak 231.236 rumah atau 94,74% dari jumlah seluruh rumah yang ada. Pencapaian ini juga telah mencapai 99,83% dari rencana target kinerja pada akhir RPJMD pada tahun 2021 sebesar 93,9%. Dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang merupakan program Kemenpera untuk mendorong Pemda dalam memfasilitasi penyelenggaraan perumahan swadaya serta membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat menempati rumah dan lingkungan yang layak huni. Disamping bantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga mengeluarkan kebijakan di sektor perumahan dan permukiman yaitu program pengembangan dan peningkatan kualitas perumahan dengan Kegiatan Fasilitasi Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni. Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendorong peningkatan jumlah rumah layak huni sebanyak 3.617 rumah dengan rincian sejumlah 1.518 rumah yang bersumber dari dana APBD kabupaten, bersumber dari dana APBD Provinsi sejumlah 672 rumah, bersumber dari Dana Desa sebanyak 1.414 rumah dan bantuan dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebanyak 13 rumah.

Table 3.32 Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

Uraian	Satuan	2016	2017	2018
Pemugaran rumah tidak layak huni	Buah	2.150	5.602	3.617

Sumber : DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga



Kendala dalam pelaksanaan adalah :

- a. Tingkat gotong royong sebagian masyarakat sudah menurun sehingga kesulitan mencari tenaga kerja/ tukang.
- b. Tradisi yang diyakini sebagian masyarakat tentang perhitungan waktu untuk memulai rehab rumah, akibatnya waktu pelaksanaan rehab rumah tidak sesuai rencana.

Upaya yang dilaksanakan adalah :

- a. Memberikan sosialisasi/ informasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap warga yang membutuhkan bantuan termasuk dalam pelaksanaan rehab RTLH
- b. Memberikan perhatian lebih guna percepatan pelaksanaan rehab rumah untuk wilayah masyarakat yang memegang tradisi perhitungan waktu

Strategi untuk pencapaian sasaran tersebut dengan melakukan sosialisasi arti pentingnya rumah layak huni yang juga merangkul para *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam pemugaran RTLH.

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni adalah :

- a. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
- b. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
- c. Program Catur Tertib Pertanahan

SASARAN 8 :

KETERSEDIAAN RUMAH

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Ketersediaan Rumah* mendapatkan nilai capaian sebesar 94,34% dengan kategori berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33 *Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan Rumah*

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target akhir RPJMD
Persentase Rumah Per KK	Tahun	80,12	78,55	84,6	76,01	94,34	89,1

Jumlah kepala keluarga yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 sebanyak 324.529 KK, yang terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah rumah tangga yang sudah mempunyai rumah sebanyak 246.669 KK atau 76,01% dan yang belum mempunyai rumah sebanyak 77.860 KK atau 23,99%. Pada tahun 2018, jumlah keluarga yang sudah mempunyai rumah sebanyak 246.669 KK atau 76,01% dari total seluruh kepala keluarga. Target yang ditentukan pada tahun 2018 sebesar 80,57% kepala keluarga sudah memiliki rumah sendiri. Capaian ini sudah melampaui target akhir yang ditentukan RPJMD 2016 – 2021 sebesar 89,1% dengan asumsi satu rumah ditempati oleh 1,32 KK.

Tabel 3.34 *Kepemilikan Rumah*

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Kepemilikan Rumah
1	KEMANGKON	21,661	18.173
2	BUKATEJA	25,559	20.569
3	KEJOBONG	17,244	12.830
4	KALIGONDANG	22,065	16.302
5	PURBALINGGA	19,997	14.524
6	KALIMANAH	18,671	14.716
7	KUTASARI	20,643	15.247
8	MREBET	25,302	18.509
9	BOBOTSARI	18,020	12.234
10	KARANGREJA	14,009	10.080
11	KARANGANYAR	13,276	9.477
12	KARANGMONCOL	18,002	13.362
13	REMBANG	21,346	19.715



No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Kepemilikan Rumah
14	BOJONGSARI	19,968	14.736
15	PADAMARA	14,894	10.773
16	PENGADEGAN	13,603	10.917
17	KARANGJAMBU	8,390	6.083
18	KERTANEGARA	11,879	8.442
Jumlah		324,529	246.669

Sumber : DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga

Hambatan yang mempengaruhi kepemilikan rumah antara lain :

- Tingkat kemampuan dan pendapatan masyarakat serta kepemilikan lahan guna membangun rumah yang layak bagi mereka.
- Penambahan keluarga baru yang masih tinggal dengan orang tua mereka
- Terbatasnya lahan yang digunakan untuk membangun perumahan.

Solusi untuk meningkatkan kepemilikan rumah di Purbalingga adalah :

- Membantu kepemilikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembangunan perumahan bersubsidi.

Tabel 3.35 Data Perumahan Bersubsidi

No	Perumahan	Bentuk Rumah (tapak/ Susun)	Tipe (LB/LT)	Jumlah (unit)	
				MBR	Non MBR
1	2	5	7	8	9
1	Perumahan Nayaka Estate	Tapak	tipe 30	2	
1	Perumahan Citra Perwira Karangjambe	Tapak	Tipe 30 dan tipe 38	44	19
2	Perumahan Toyareja Permai	Tapak	Tipe 36		53
3	Perumahan Griya Romansa	Tapak	Tipe 36 dan tipe 45	32	4
4	Pesona Puri Toyareka	Tapak	Tipe 30	166	



No	Perumahan	Bentuk Rumah (tapak/ Susun)	Tipe (LB/LT)	Jumlah (unit)	
				MBR	Non MBR
1	2	5	7	8	9
5	Perumahan Citra Perwira Karangjambe	Tapak	Tipe 30	23	
6	Perumahan Grand Hayata	Tapak	Tipe 47, Tipe 54 dan Tipe 74		30
7	Perumahan Puri Kirana Asri	Tapak	Tipe 40 dan tipe 50		27
8	Perumahan Grand Harmoni Kedungjati	Tapak	Tipe 32 dan tipe 36	24	
9	Perumahan Grand Taman Mutiara	Tapak	tipe 45, tipe 60 dan tipe 85		75

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Purbalingga

- b. Fasilitasi pembangunan Rusunawa.
- c. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d. Penunjang bantuan stimulan perumahan swadaya.

Program yang mendukung capaian sasaran adalah :

1. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman.
2. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

**Misi 4 :**

***“MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN
DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT”***

SASARAN 9 :

MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat* mendapatkan nilai capaian sebesar 95,36% dengan kategori berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.36 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat*

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target akhir RPJMD
Rata - rata lama sekolah	Tahun	6,85	6,85	7,33	6,87	93,72	7,92
Harapan lama sekolah	Tahun	11,93	11,94	12,3	11,94	97,07	12,9
Rata-rata <i>Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat</i> 95,36							

1. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang ditempuh. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk



menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP 9 tahun dan seterusnya.

Tabel 3.37 Rata- rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target akhir RPJMD
Rata - rata lama sekolah	Tahun	6,85	6,85	7,33	6,87	93,72	7,92

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya berhasil, karena mencapai 93,72% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah adalah 6,87 tahun. Pencapaian ini juga telah mencapai 86,74% dari rencana target kinerja pada akhir RPJMD pada tahun 2021 yaitu rata-rata lama sekolah sebesar 7,92 tahun. Realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,02 tahun dari tahun 2017. Itu artinya penduduk di Kabupaten Purbalingga rata-rata hanya sekolah kelas 1 SMP.

Sedangkan apabila dilihat dari data angka penduduk umur 6 – 16 tahun yang tidak bersekolah menurut jenis kelamin, rata-rata anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Tabel 3.38 Jumlah Penduduk Usia 7-16 Tahun Yang Tidak Bersekolah per Kecamatan

Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
KEMANGKON	1,864	5.52%	1,750	5,59%	3,614
BUKATEJA	3,100	9.18%	2,893	9,24%	5,993
KEJOBONG	1,747	5.17%	1,661	5,31%	3,408
KALIGONDANG	2,697	7.99%	2,393	7,64%	5,090
PURBALINGGA	2,134	6.32%	1,982	6,33%	4,116
KALIMANAH	1,762	5.22%	1,647	5,26%	3,409
KUTASARI	2,179	6.45%	2,183	6,97%	4,362
MREBET	2,924	8.66%	2,568	8,20%	5,492



Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
BOBOTSARI	1,788	5.29%	1,674	5,35%	3,462
KARANGREJA	1,400	4.15%	1,318	4,21%	2,718
KARANGANYAR	887	2.63%	849	2,71%	1,736
KARANGMONCOL	1,365	4.04%	1,154	3,69%	2,519
REMBANG	2,088	6.18%	1,927	6,16%	4,015
BOJONGSARI	2,442	7.23%	2,264	7,23%	4,706
PADAMARA	1,278	3.78%	1,250	3,99%	2,528
PENGADEGAN	1,579	4.68%	1,463	4,67%	3,042
KARANGJAMBU	1,223	3.62%	1,138	3,64%	2,361
KERTANEGARA	1,317	3.90%	1,190	3,80%	2,507
Jumlah	33,774	51.90%	31,304	48.10%	65,078

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Apabila dilihat data di eks Karesidenan Banyumas, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2018 angka rata-rata lama sekolah Purbalingga diperingkat ketiga sebesar 6,87. Angka tersebut masih di bawah Kabupaten Banyumas sebesar 7,4 dan kabupaten Cilacap sebesar 6,91 dan masih dibawah rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,27. Capaian rata-rata lama sekolah tahun 2015-2018 menurut kabupaten/kota se eks Karesidenan Banyumas dilihat dalam tabel berikut:

Table 3.39 Rata-Rata Lama Sekolah Eks Karsidenan Banyumas

Kabupaten	Rata-Rata Lama Sekolah			
	2015	2016	2017	2018
Cilacap	6.48	6.58	6.90	6.91
Banyumas	7.31	7.31	7.39	7.40
Purbalingga	6.84	6.85	6.86	6.87
Banjarnegara	5.90	6.17	6.26	6.27
Provinsi Jawa Tengah	6.93	7.03	7.15	7.27

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga



2. Harapan lama sekolah

Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 3.40 Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target akhir
Harapan lama sekolah	Tahun	11,93	11,94	12,3	11,94	97,07	12,9

Untuk mewujudkan indikator harapan lama sekolah tahun 2018, dari target 12,3 tahun terealisasi 11,94 tahun atau 97,07% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang tinggi. Dengan capaian ini pula, telah mencapai 92,55% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Angka Harapan lama Sekolah Purbalingga sebesar 11,94 tahun, artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk (usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah 11,94 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh jenjang pendidikan hingga SMA.

Angka HLS Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sama dengan tahun 2017. Dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 angka HLS Kabupaten Purbalingga terdapat kenaikan. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran serta dari pihak pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu adanya program beasiswa, dana biaya operasional sekolah (BOS) dan program pemerintah lainnya yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua siswa.



Akses pendidikan juga bisa digambarkan oleh beberapa data lain seperti Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Selain itu, juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau, seperti data tentang rasio antara jumlah sekolah dengan jumlah penduduk atau sarana dan prasarana pendidikan yang lain. Bagian berikut akan menguraikan situasi untuk beberapa aspek tersebut di atas

1. Angka Partisipasi Kasar :
 - a. SD/MI tahun 2018 sebesar 107,01%, mengalami penurunan sebesar 2,90% dari capaian tahun 2017 sebesar 109,91%;
 - b. SMP/MTs tahun 2018 sebesar 102,36%, mengalami penurunan sebesar 4,92% dari capaian tahun 2017 sebesar 97,44%.
2. Angka Partisipasi Murni:
 - a. SD/MI Tahun 2018 sebesar 94,37 %, mengalami penurunan sebesar 0,97% dari capaian tahun 2017 sebesar 95,34%;
 - b. SMP/MTs tahun 2018 sebesar 72,03%, mengalami penurunan sebesar 1,70% dari capaian tahun 2017 sebesar 73,73%.
3. Tingkat kelulusan:
 - a. SD/MI mencapai 100%;
 - b. SMP juga sebesar 100%.

Tabel 3.41 APK dan APM Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2018

Uraian	Satuan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
- SD/MI	Persen	108,89	110,34	109,91	107,01
- SMP/MTs	Persen	99,8	100,36	102,36	102,36
Angka Partisipasi Murni (APM)					
- SD/MI	Persen	90,89	92,61	95,34	94,37
- SMP/MTs	Persen	69,30	69,40	73,73	72,03

Sumber : DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga

Besaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk jenjang SD/MI Rp 800.000,- /peserta didik/ tahun, sedangkan untuk jenjang SMP/MTS Rp 1.000.000,-/peserta



didik/tahun. Hal yang juga mendukung ketersediaan dan perbaikan yang dicapai dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat Purbalingga salah satunya adalah perpustakaan antara lain kantor Perpustakaan Umum, perpustakaan di kantor desa, Sekolah, Kantor/ Instansi Pemerintah serta Rumah Ibadah. Selain perpustakaan yang berada di kantor-kantor juga diadakan layanan perpustakaan keliling yang menyasar ke desa-desa yang belum *tercover* oleh perpustakaan atau belum mendirikan dan di tempat-tempat umum yang memang menjadi pusat berkumpulnya massa.

Tabel 3.42 Besaran BOS SD dan SMP (ribu rupiah), jumlah SD dan SMP

Uraian	Satuan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
BOS SD	Rupiah	61.131.200	60.360.200	60.032.480	58.854.240
BOS SMP	Rupiah	33.711.000	33.439.000	33.453.800	32.923.200
Jumlah SD	Sekolah	467	465	465	650
Jumlah SMP	Sekolah	77	77	76	117

Sumber : DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga

Bagian penting dari perluasan akses pendidikan adalah ketersediaan sarana Pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah yang layak bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Data dalam tabel 3.43 di bawah ini menunjukkan bahwa untuk jenjang SD/MI, jumlah gedung sekolah adalah 650 unit. Jumlah ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 terdapat 467 gedung, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 terdapat Gedung SD/ MI sebanyak 467. Penurunan yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017 dikarenakan adanya sekolah yang penggabungan sekolah dengan alasan kurangnya kuota anak didik. Untuk jenjang SMP/ MTs pada tahun 2018 terdapat 117 gedung sekolah. Jumlah ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 dan 2016 terdapat 77 gedung sekolah. Pada tahun 2018, rasio gedung sekolah SD/ MI sebesar 70/10.000 penduduk meningkat dari tahun 2017 sebesar 51/10.000 penduduk. Sedangkan untuk rasio Gedung SMP/ MTs sebesar 25/10.000 penduduk meningkat dari tahun 2017 sebesar 17/10.000 penduduk.



Table 3.43 Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Uraian	Satuan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Jumlah SD/ MI	Sekolah	467	465	465	650
Jumlah SMP/ MTs	Sekolah	77	77	76	117

Sumber : DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga

Tabel 3.44 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Purbalingga

Jenjang pendidikan	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3
SD/MI		
Jumlah Gedung sekolah	465	650
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	91.401	93.445
Rasio (Per 10.000)	51	70
SMP/ MTs		
Jumlah Gedung sekolah	76	117
Jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 tahun	44.201	45.899
Rasio (Per 10.000)	17	25

Sumber : DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga

Permasalahan dalam urusan pendidikan secara umum :

1. Banyaknya penduduk usia kurang dari 15 tahun yang lebih memilih bekerja di sektor non formal dikarenakan angka kemiskinan yang masih tinggi dan belum sadarnya warga akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi.
2. Tingkat ekonomi masyarakat, setelah banyaknya pabrik-pabrik rambut berdiri di Purbalingga hingga ke desa-desa (plasma) dan membuka peluang kerja bagi anak usia sekolah untuk bekerja. Hal ini menjadikan banyak masyarakat atau orang tua yang hanya menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang SD/ Sederajat atau SMP/ Sederajat saja. Kemudian anak-anak tersebut sudah diharuskan bekerja untuk meringankan beban orang tua.
3. Minat yang kurang pada anak untuk bersekolah, sehingga mereka lebih memilih untuk keluar dari bangku sekolah. Hal ini disebabkan banyak faktor antara lain



pergaulan yang kurang baik, anak yang merasa tidak mampu (tidak pintar) dan tidak naik kelas sehingga mereka minder untuk melanjutkan sekolah.

Solusi untuk mengatasinya adalah :

1. Dengan adanya program Wajib Belajar 9 tahun, diharapkan agar anak usia 7-15 tahun untuk bersekolah mencapai jenjang SMP/ sederajat.
2. Pendekatan terhadap orang tua dan anak untuk menyadarkan mereka pentingnya sekolah minimal hingga jenjang Sekolah Menengah (SM) untuk masa depan yang lebih baik.
3. Fasilitasi bantuan biaya sekolah melalui dana BOS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
4. Pemberian Bantuan Sosial Bea Siswa Kurang Mampu bagi peserta didik dengan program Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS)
5. Untuk mengurangi kenakalan atau pergaulan yang kurang baik, pihak sekolah menerapkan AKPS (Angka Kredit Pelanggaran Siswa) secara arif, bijaksana dan tegas, yang bertujuan membentuk siswa bisa disiplin, berakhlak baik dan berprestasi serta dukungan orang tua terhadap penerapan AKPS oleh sekolah.

Program yang mendukung untuk untuk mencapai Sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat antara lain :

- a. Program Pendidikan Usia Dini
- b. Program Pendidikan Dasar
- c. Program Fasilitasi Akses Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi
- d. Program Pendidikan Non Formal
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- g. Program Wajar Dikdas 9 Tahun
- h. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah
- i. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

**SASARAN 10 :*****MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT***

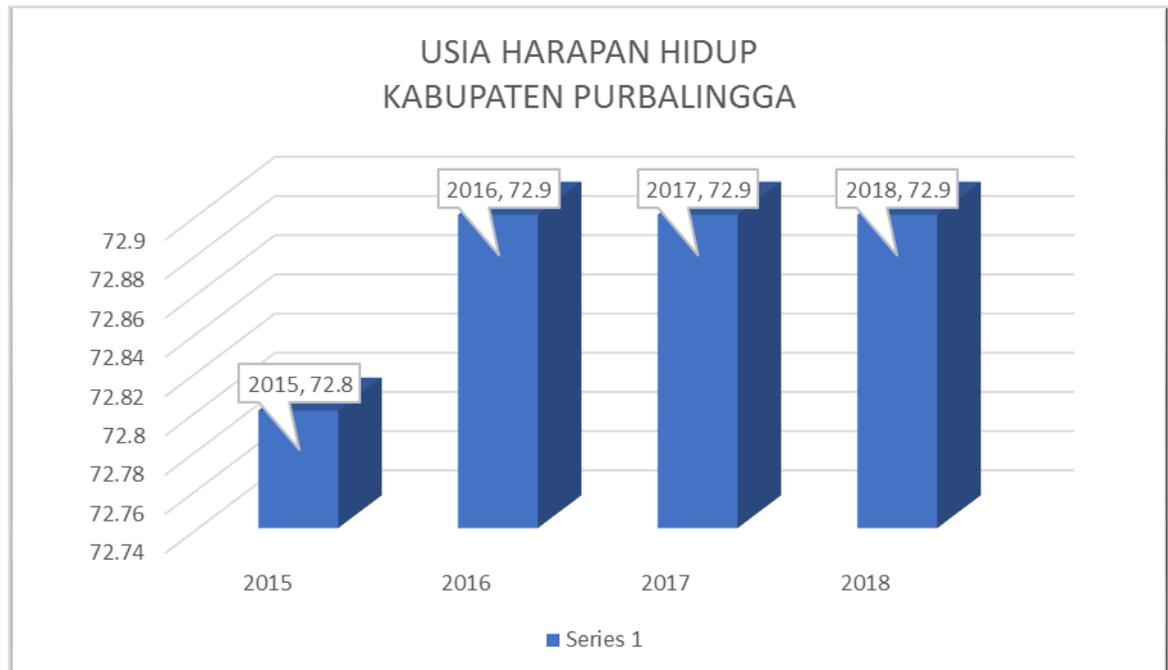
Usia Harapan Hidup (UHH) atau *Expectation of Life (Eo)* merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Peningkatan UHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Tabel 3.45 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	CAPAIAN %
Usia Harapan Hidup	Tahun	72,8	72,9	72,9	73,1	72,91	99,79

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* mendapatkan nilai capaian 99,79% dengan kategori berhasil. Pada tahun 2015 capainnya sebesar 72,8 dan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebesar 72,91. Ini menunjukkan bahwa umur harapan hidup penduduk Kabupaten Purbalingga dari lahir hingga meninggal mencapai 72 tahun 7 bulan. Capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup di Indonesia yang baru mencapai rata – rata 71, 11 tahun (BPS) diperhitungkan dari rata – rata usia harapan hidup laki – laki sebesar 69,16 tahun dan usia harapan hidup perempuan sebesar 73,06 tahun.

Grafik 3.8 Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2018



Sumber : Rilis BPS per Oktober 2018

Salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengadakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Tujuan GERMAS diantaranya menurunkan resiko penyakit menular dan tidak menular yang menimbulkan kematian maupun kecacatan, menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk dan pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit. GERMAS dimulai dengan 3 fokus kegiatan, yaitu meningkatkan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah serta deteksi dini penyakit tidak menular. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka Germas adalah :

- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan;
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat



Guna mendukung pencapaian indikator tersebut, hal-hal yang dilakukan antara lain dengan :

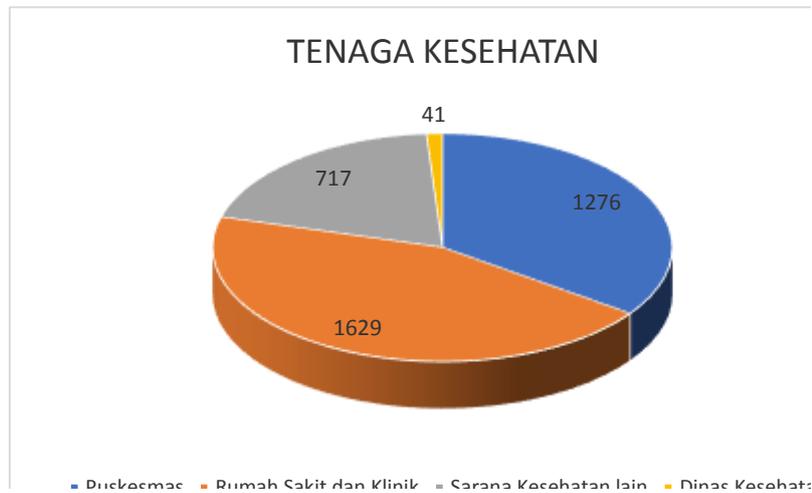
1. Tenaga Kesehatan

Untuk mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan telah dilakukan pemenuhan kebutuhan dengan menempatkan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Kabupaten baik sebagai PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Honor Daerah. Adapun jenis tenaga kesehatan yang ada dikelompokkan menjadi 8 profesi kesehatan yaitu :

- a. Tenaga Medis (Dokter umum, Dokter Gigi , Dr/Drg Spesialis)
- b. Tenaga Keperawatan (Bidan, Perawat Umum & Perawat Gigi)
- c. Tenaga Kefarmasian (Apoteker) dan Asisten Apoteker (Tenaga Teknis Kefarmasian)
- d. Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan
- e. Tenaga Gizi (Nutritionis dan Dietisen)
- f. Tenaga Keterampilan Fisik (Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Akupuntur)
- g. Tenaga Keteknisian Medis
- h. Tenaga Kesehatan Lain (Pengelola Program)
- i. Tenaga Penunjang/ Pendukung Kesehatan (Non Kesehatan)

Persebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 dari 3.663 orang tenaga kesehatan yang ada, bekerja di unit kerja: Puskesmas sejumlah 1.276 orang (34,75%), Rumah Sakit dan Klinik sejumlah 1.629 orang (44,47%), sarana kesehatan lain 717 orang (19,57%) dan Dinas Kesehatan 41 orang (1,12%).

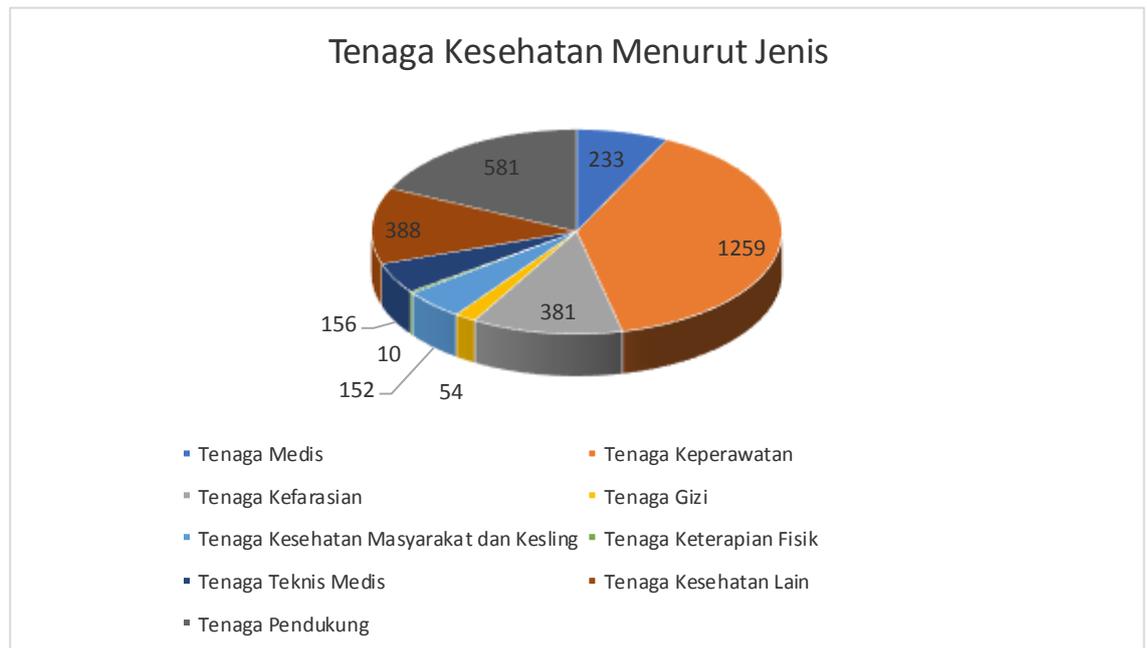
Grafik 3.9 Persebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja di Kabupaten Purbalingga



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Sedangkan persebaran tenaga kesehatan menurut jenisnya adalah sebagai berikut : tenaga medis sejumlah 233 orang (6,43%), tenaga keperawatan sejumlah 1.259 orang (47,15%), tenaga kefarmasian sejumlah 381 orang (10,51%), tenaga gizi sejumlah 54 orang (1,49%), tenaga kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan (Kesling) sebanyak 152 orang (4,19%), tenaga keterampilan fisik 10 orang (0,27%), tenaga teknis medis sejumlah 156 orang (4,30%), tenaga kesehatan lain 388 orang (10,71%) dan tenaga penunjang atau pendukung kesehatan sebanyak 581 orang (16,04%).

Grafik 3.10 Persebaran tenaga kesehatan menurut jenisnya di Kabupaten Purbalingga



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2018

a. Rasio Dokter Spesialis per-100.000 Penduduk.

Jumlah tenaga dokter spesialis di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 sejumlah 74 orang dengan Rasio perbandingan dokter Spesialis sebesar 8,07 per 100.000 penduduk. Artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 8 orang dokter spesialis. Rasio tersebut sudah sesuai target Indonesia Sehat sebesar 6 per 100.000 penduduk.

b. Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk.

Jumlah tenaga dokter umum yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 sejumlah 116 orang dengan rasio perbandingan tenaga dokter umum sebesar 12,66 per 100.000 penduduk. Artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 12 orang dokter umum. Rasio tersebut masih jauh di bawah target Indonesia Sehat sebesar 40 per 100.000 penduduk.



Tabel 3.46 Rasio Dokter

URAIAN	2015	2016	2017	2018
Jumlah Dokter Umum	94	108	142	116
Jumlah Dokter Spesialis	48	32	62	72
Jumlah Penduduk	931.129	950.452	955.865	985,543
Rasio Dokter Umum (per 100.000 penduduk)	10,51	11,96	15,72	12,66
Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	5,37	3,54	6,86	8,07

2. Sarana Kesehatan

a. Puskesmas

Di Kabupaten Purbalingga jumlah Puskesmas sebanyak 22 unit yang terdiri dari Puskesmas Non Rawat Inap 11 unit dan Puskesmas dengan Rawat Inap 11 unit. Puskesmas dengan Rawat Inap meliputi: Puskesmas Bukateja, Puskesmas Kejobong, Puskesmas Kalimanah, Puskesmas Padamara, Puskesmas Serayu Larangan, Puskesmas Bobotsari, Puskesmas Karangreja, Puskesmas Karangjambu, Puskesmas Karanganyar, Puskesmas Karangmoncol dan Puskesmas Rembang.

Pada akhir tahun 2018, telah terbangun satu Puskesmas Baru di Kecamatan Kemangkon, namun puskesmas tersebut belum dapat dioperasionalkan karena masih dalam tahap penyempurnaan dan pemenuhan sarana dan prasarananya.

Sebagai dukungan terhadap pemerataan akses pelayanan kesehatan masyarakat baik puskesmas non rawat inap maupun puskesmas rawat inap dibantu oleh adanya puskesmas pembantu yang berjumlah 48 unit dan puskesmas keliling yang berjumlah 22 unit.

Dengan jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 sebanyak 985,543 jiwa berarti 1 Puskesmas beserta jaringannya rata-rata melayani penduduk sebanyak 44.797 jiwa, atau rasionya adalah 2,5/ 100.000 penduduk. Padahal jika mengacu pada target Renstra Kemenkes 2014-2019,



pada akhir tahun 2019 target rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 3,5/100.000 penduduk. Maka untuk mencapai target tersebut Kabupaten Purbalingga masih kekurangan 7 puskesmas baru. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah puskesmas seperti pembangunan puskesmas baru maupun peningkatan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas induk.

b. Rumah Sakit.

Indikator perkembangan sarana Rumah Sakit (RS) dapat dilihat dari perkembangan fasilitas perawatan yang diukur dari banyaknya rumah sakit dan kapasitas tempat tidurnya serta rasio terhadap jumlah penduduk. Untuk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 jumlah Rumah Sakit Umum ada 4 unit yang terdiri dari: 1 unit RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata dan 3 unit RSU swasta yaitu RSU Nirmala, RSU Harapan Ibu dan RSU Siaga Medika yang semuanya merupakan Rumah Sakit tipe C. Selain itu di Kabupaten Purbalingga juga terdapat 2 Rumah Sakit Khusus yaitu 1 unit Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah (RSKBD) Panti Nugroho, 1 unit Rumah Sakit Ibu & Anak (RSIA) Ummu Hani yang kesemuanya telah mempunyai kemampuan pelayanan gawat darurat level satu.

c. Laboratorium

Laboratorium sebagai sarana pendukung pemeriksaan kesehatan sangat penting keberadaannya. Pada Tahun 2018, Laboratorium kesehatan tersedia 3 buah terdiri dari 1 laboratorium kesehatan daerah milik pemerintah dan 2 Laboratorium kesehatan swasta.

d. Apotek

Dalam rangka mendukung akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan Kabupaten Purbalingga didukung oleh kalangan swasta ditandai dengan banyaknya jumlah apotek yang ada. Sepanjang tahun 2018 jumlah apotek yang ada sebanyak 72 buah yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Purbalingga.



e. Klinik

Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga juga didukung oleh adanya klinik-klinik yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. Adapun klinik yang terdaftar pada Dinas Kesehatan sebanyak 25 Klinik yang terdiri dari 3 Klinik Utama, yang didukung dengan pelayanan Dokter Spesialis dan 22 Klinik Pratama.

f. Optik

Pelayanan kesehatan mata juga didukung dengan adanya optik. Pada tahun 2018 terdapat 7 Optik yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan.

g. Sarana Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Diantaranya melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) seperti : Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) KB – Kesehatan, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) sektor informal, Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Desa Siaga / Desa Sehat Mandiri (DSM)

➤ Posyandu KB- Kesehatan.

Posyandu KB Kesehatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh, dari dan untuk masyarakat. Sasaran Posyandu KB Kesehatan adalah Pasangan Usia Subur (PUS), Ibu Hamil, Bayi dan anak usia dibawah lima tahun (Balita) serta masyarakat umum. Sedangkan kegiatannya meliputi: pelayanan Keluarga Berencana (KB), pelayanan kesehatan Ibu dan anak (KIA), Imunisasi, Gizi, dan pencegahan Diare serta kegiatan lain sebagai upaya pengembangan Posyandu.

Di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 terdapat Posyandu KB Kesehatan sejumlah 1.215 Posyandu yang terdiri dari: Posyandu Mandiri sejumlah 853 (70,21%), Posyandu Purnama sejumlah 300 (24,69%), Posyandu Madya sejumlah 54 (4,44%), dan Posyandu Pratama sejumlah 3



(0.25%). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 1153 (94,90%) dari Posyandu yang ada merupakan Posyandu aktif yaitu Posyandu dengan tingkat Posyandu Mandiri dan tingkat Posyandu Purnama, Posyandu Madya dan Posyandu Pratama.

➤ Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)

PKD merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes), yang pada tahun 2009 jumlah PKD di Purbalingga bertambah dari 168 unit, menjadi 183 unit pada tahun 2010, tahun 2011 sebanyak 187 unit, tahun 2012 sebanyak 194 unit, tahun 2013 sebanyak 199 unit, tahun 2014 hingga 2018 sebanyak 199 unit. Dengan berkembangnya Polindes menjadi PKD maka fungsinya juga bertambah. Disamping pelayanan kesehatan ibu dan anak, juga sebagai tempat untuk memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan masyarakat, melakukan pembinaan kader, pemberdayaan masyarakat serta forum komunikasi pembangunan kesehatan di desa, serta sebagai tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar termasuk kefarmasian sederhana serta untuk deteksi dini dan penanggulangan pertama kasus gawat darurat.

Lebih jauh lagi PKD yang ada dijadikan sebagai gerbang untuk mewujudkan Desa Sehat Mandiri (DSM). Disamping bidan sebagai koordinator dalam mewujudkan DSM juga dibantu oleh tenaga pendamping DSM yang memiliki latar belakang pendidikan medis maupun paramedis.

Tabel 3.47 Layanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

URAIAN	2015	2016	2017	2018
Rumah Sakit Umum	3	3	4	4
Rumah Sakit Bersalin	1	1	1	1
Rumah Sakit Ibu dan Anak	1	1	1	1
Klinik Utama	-	3	3	3
Klinik Pratama	16	16	14	22
Puskesmas rawat inap	11	11	11	11
Puskesmas non rawat inap	11	11	11	11



URAIAN	2015	2016	2017	2018
Puskesmas pembantu	48	48	48	48
Puskesmas keliling	22	22	22	22
PKD	199	199	199	199
Posyandu	1.194	1.206	1.206	1.215
Posyandu lansia	475	475	475	475
Apotek	70	70	73	72
Laboratorium	3	3	3	3
Optik	7	7	7	7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Seiring dengan program nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang tercakup oleh program Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 740.673 (82.01%). Sedangkan sisanya 162.508 jiwa (17.99%) belum tercakup JKN. Peserta JKN terdiri atas Penerima Bantuan Iur (PBI) sebanyak 553.715 jiwa dan Non PBI 186.958 Jiwa.

Dari 162.508 jiwa yang belum tercakup JKN, sebanyak 86.955 Jiwa tercakup kepesertaan KPS dan sebanyak 19.200 Jiwa tercakup kepesertaan Jamkesda mampu, sedangkan sisanya perlu diklarifikasi lebih lanjut apakah mereka menggunakan jaminan kesehatan swasta (asuransi swasta) ataukah mereka belum mempunyai jaminan kesehatan sama sekali. Hal ini untuk memastikan mereka tercakup dalam program *Universal Health Coverage*, karena sesuai dengan program BPJS Kesehatan diharapkan pada akhir 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah tercover BPJS Kesehatan. Secara keseluruhan, cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu 93,76%.

Tabel 3.48 Peserta Jaminan Kesehatan

URAIAN	2015	2016	2017	2018
BPJS	613.168	690.885	740.673	740.673
BPJS PBI	486.871	528.158	553.715	553.715
BPJS Non PBI	126.297	162.727	186.958	186.958



URAIAN	2015	2016	2017	2018
Jamkesda	31.640	130.531	19.200	19.200

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Usia Harapan hidup antara lain :

1. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar 5,19 (76 kasus) per 1.000 kelahiran hidup dan dibanding dengan tahun 2017 Angka Kematian Neonatal mengalami penurunan dari 5,58 (80 kasus) per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian neonatal tertinggi terdapat di Puskesmas Bukateja dan Bobotsari sebanyak 6 Kasus, sedang terendah adalah Puskesmas Bojong dengan 0 Kasus.

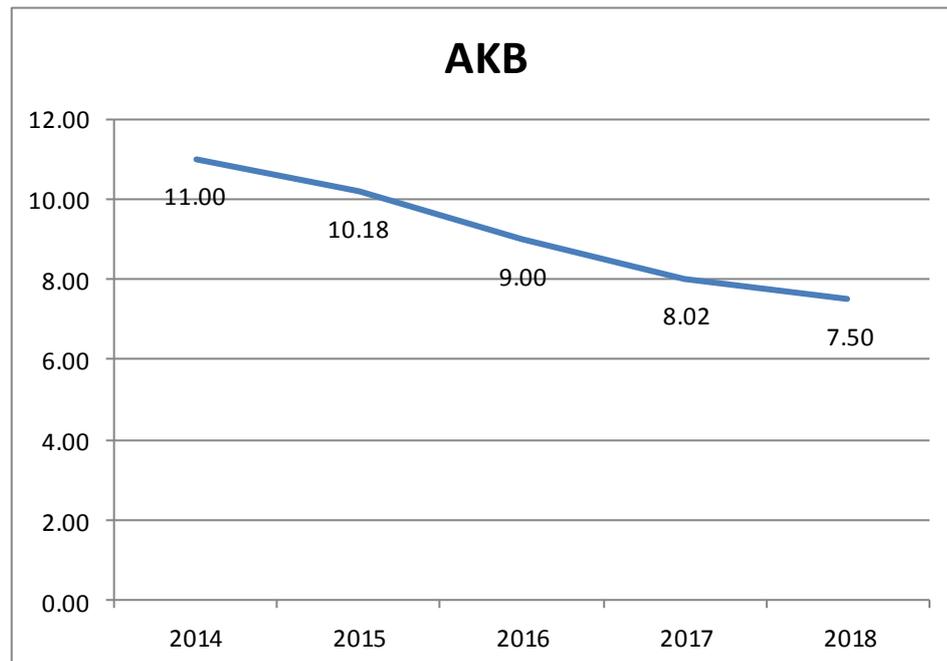
2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Berdasarkan laporan rutin, AKB Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar 7,5 (110 kasus) per 1.000 kelahiran hidup dan dibanding dengan tahun 2017 yaitu 8,03 per 1.000 kelahiran hidup (115 kasus) maka AKB mengalami penurunan. Jumlah kematian bayi tertinggi terdapat di Puskesmas Padamara, Bojongsari dan Karangreja sebanyak 8 Kasus, sedang terendah adalah Puskesmas Bojong yaitu tidak ada kasus (0 Kasus).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor akseptabilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah pola kehidupan tradisional yang bertentangan dengan kesehatan. Kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB. Trend Angka Kematian Bayi dalam 5 tahun terakhir cenderung menurun.



Grafik 3.11 Angka Kematian Bayi



3. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

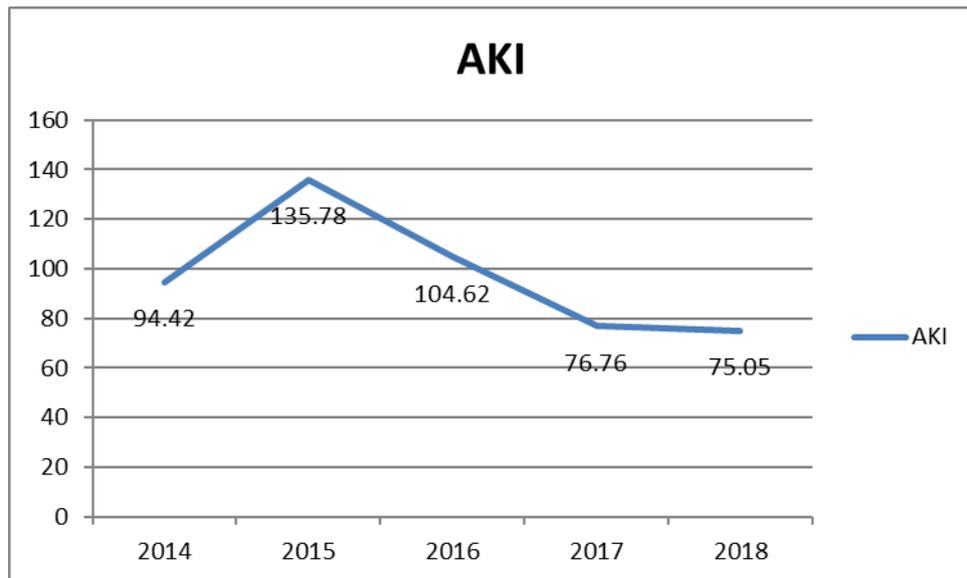
Angka Kematian ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar 75,1 per 100.000 kelahiran hidup (11 kasus). Dibanding dengan tahun 2017 dimana Angka Kematian Ibu sebesar sebesar 76,8 per 100.000 kelahiran hidup (11 kasus) maka angka kematian ibu tahun 2018 mengalami penurunan, walaupun dilihat dari jumlah kasus sama, namun total jumlah kelahiran hidup pada tahun 2018 lebih banyak.

Kasus kematian Ibu tertinggi terdapat di Puskesmas Karanganyar dan dan Karangmoncol masing-masing dengan 2 kasus kematian. Sedangkan kasus AKI lainnya ada di Puskesmas Kemangkong, Pengadegan, Purbalingga, Bojongsari, Kutasari, Serayu Larangan, Karangtengah masing-masing 1 kasus. Sedangkan di Puskesmas Bukateja, Puskesmas Kutawis, Puskesmas Kejobong, Puskesmas kaligondang, Puskesmas Kalikajar, Puskesmas Bojong, Puskesmas Kalimanah, Puskesmas Padamara, Puskesmas Mrebet, Puskesmas Bobotsari, Puskesmas karangreja, Puskesmas Karangjambu, dan Puskesmas Rembang tidak ada kasus kematian (0 kasus). Menurut waktu kejadian kematian ibu maternal terjadi pada saat hamil sejumlah 2 kasus, saat bersalin sejumlah 7 kasus dan saat nifas sejumlah 2 kasus.



Dalam 5 tahun terakhir, capaian AKI di Kabupaten Purbalingga tercatat mengalami penurunan walaupun sempat naik pada tahun 2015. Namun setelah itu, AKI konsisten mengalami penurunan dan menunjukkan kinerja yang cukup baik, sesuai dengan target yang direncanakan. Berikut grafik tren AKI dalam 5 tahun terakhir.

Grafik 3.12 Angka Kematian Ibu



4. Penyakit TB Paru

Menurut hasil Survei Kesehatan Nasional 2001, TB Paru menempati urutan ke 3 penyebab kematian umum. Selain menyerang Paru, Tuberculosis dapat menyerang organ tubuh yang lain. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan penyakit TBC di Kabupaten Purbalingga telah menunjukkan hasil yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka penemuan semua kasus TB pada tahun 2018 mencapai 44%, kurang dari target yang ditetapkan sebesar 52%. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 56%. Angka CNR (*Case Notification Rate*) tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga untuk seluruh kasus TB yaitu 126 per 100.000 penduduk. Capaian ini juga belum mencapai target yang direncanakan yaitu 130 per 100.000 penduduk, namun capaian ini meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2017 yaitu 116 per 100.000 penduduk.



Capaian indikator kinerja program pengendalian penyakit TB masih dibawah target baik indikator *Case Notification Rate* TB maupun angka penemuan kasus baru TB. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- Penemuan kasus TB masih bersifat *Pasif Case Finding*
- Masih kurangnya koordinasi dengan organisasi profesi kesehatan seperti IDI dan PPNI
- Belum berjalannya pelaksanaan strategi *Directly Observed Treatment Shortcourse* (DOTS) sebagai Program Nasional Pemberantasan TB di praktek swasta sehingga penderita TB yang ditangani tidak dapat dimasukan sebagai cakupan pemberantasan TB di Kabupaten Purbalingga
- Kegiatan aktif berbasis masyarakat dan keluarga belum berjalan dengan baik
- Penyebaran informasi masih belum maksiamal sehingga kesadaran masyarakat masih kurang untuk memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) bagi mereka yang memiliki gejala TB/ suspek TB
- Belum semua pasien yang diobati di Rumah Sakit ditangani dengan DOTS sehingga tidak bisa dimasukan dalam rekapitulasi laporan

Beberapa Upaya pemecahan masalah di atas sebagai berikut :

- Pelaksanaan *aktif case finding* ditingkatkan kepada sasaran khusus seperti pondok pesantren, dan kontak tracing penderita
- Penguatan jejaring layanan dan koordinasi dengan organisasi profesi kesehatan dan praktek dokter mandiri melalui sosialisasi Wifi TB
- Fasyankes Puskesmas merujuk ke Fasyankes yang punya alat TCM (RSUD)
- Kolaborasi Layanan dalam penemuan TB di Fasyankes (klinik lansia, klinik Sanitasi ,dll)
- Melaksanakan cleaning data TB di Rumah Sakit untuk mengkroscek data laporan Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT) dengan rekam medis
- Melaksanakan investigasi kontak dilakukan pada orang-orang dengan risiko TB , seperti perokok mantan penderita TB.



5. Demam Berdarah Dengue

Salah satu Penyakit yang tergolong Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang selama ini masih terus muncul sebagai penyakit yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Ada beberapa Daerah yang menjadi endemis kasus DBD karena setiap tahunnya pasti ada kasus ini seperti wilayah Kecamatan Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet bahkan kasus ini menimbulkan kematian pada beberapa penderita yang dimungkinkan karena terlambat dalam penanganan lanjutan di pelayanan kesehatan. Berdasarkan data kasus Demam Berdarah Dengue selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014 - 2018 menunjukkan jumlah kasus fluktuatif sebagai berikut :

Tabel 3.49 Kasus Demam Berdarah Dengue

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2014	360	-
2015	245	-
2016	268	4 orang meninggal
2017	191	4 orang meninggal
2018	190	3 orang meninggal

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Indikator kinerja program pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD adalah :

- Target angka kesakitan/ *Incident Rate* (IR) DBD tahun 2018 sebesar 23/100.000, sedangkan capaian : 21/100.000 penduduk.
- Target angka kematian/ *Case Fatality Rate* (CFR) Tahun 2018 sebesar 1%, sedangkan capaiannya 2%

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Farmasi



- b. Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia Lanjut
- c. Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan
- e. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Kesehatan Matra
- f. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
- g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- h. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- i. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
- j. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- k. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan

SASARAN 11 :

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

Hasil evaluasi pada Sasaran Strategis *Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat* mendapatkan nilai capaian sebesar 102,98% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.50 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*

Indikator	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target akhir
Keluarga sejahtera	%	75,1	76,05	78,01	78	80,29	102.98	81

Pada tahun 2018 berdasarkan hasil pendataan keluarga sebanyak 302.952 keluarga. Dari pendataan tersebut, jumlah keluarga sejahtera berjumlah 237.484 keluarga atau 78,39% dari jumlah keluarga seluruhnya. Capaian ini lebih besar dari pada target yang ditentukan sebesar 78%. Realisasi pada tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 78,01%, tahun 2016 sebesar 76,05% dan tahun 2015 sebesar 75,10%.



Keluarga sejahtera adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang sama, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan ketentraman hidup. Keluarga Sejahtera terdiri dari 4 tahapan keluarga atau 4 indikator, yaitu : Keluarga Sejahtera Tahap I atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*), Keluarga Sejahtera Tahap II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*), Keluarga Sejahtera Tahap III atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*develomental needs*), dan Keluarga Sejahtera Tahap III Plus atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*).

Data pencapaian Tahapan Keluarga Sejahtera hasil Pendataan Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga sebanyak 302.952 keluarga. Dengan menggunakan 21 indikator keluarga sejahtera yang dibedakan menjadi 5 tahapan yaitu :

1. Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 60.524 keluarga atau 19,97% dari jumlah keluarga yang ada, yaitu sebanyak 302.952 keluarga,
2. Keluarga Sejahtera Tahap I sebanyak 65.213 keluarga atau 21,52% dari jumlah keluarga yang ada, yaitu sebanyak 302.952 keluarga,
3. Keluarga Sejahtera Tahap II sebanyak 90.446 keluarga atau 29,85% dari jumlah keluarga yang ada, yaitu sebanyak 302.952 keluarga,
4. Keluarga Sejahtera Tahap III sebanyak 83.524 keluarga atau 27,57% dari jumlah keluarga yang ada, yaitu 302.952 keluarga,
5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus sebanyak 4.085 keluarga atau 1,34% dari jumlah keluarga yang ada, yaitu 302.952 keluarga.



Tabel 3.51 Data Keluarga Tahun 2018

No.	Kecamatan	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III Plus	Keluarga Sejahtera	Jumlah	Persentase%
1	2	3	4	5	6	7	8 - (4+5+6+7)	9	10
1.	Kemangkon	2.452	6.943	5.043	6.310	229	18.525	20.977	88,31
2.	Bukateja	4.770	4.490	6.769	6.462	560	18.281	23.051	79,30
3.	Kejobong	4.348	2.371	4.333	5.299	61	12.064	16.412	73,50
4.	Kaligondang	4.391	5.205	5.627	4.894	311	16.037	20.428	78,52
5.	Purbalingga	1.813	2.735	3.775	8.385	785	15.680	17.493	89,63
6.	Kalimanah	1.777	3.198	6.670	6.023	114	16.005	17.782	90,00
7.	Kutasari	3.661	7.140	5.779	2.560	127	15.606	19.327	80,74
8.	Mrebet	5.233	5.154	6.030	7.167	262	18.613	23.846	78,05
9.	Bobotsari	3.146	3.027	4.285	5.519	403	13.234	16.380	80,79
10.	Karangreja	3.340	3.932	3.580	2.741	196	10.449	13.789	75,77
11.	Karanganyar	2.893	2.578	3.854	2.153	36	8.621	11.514	74,87
12.	Karangmoncol	3.519	4.118	5.131	3.862	220	13.331	16.850	79,11
13.	Rembang	5.911	3.630	5.178	4.988	279	14.075	19.986	70,42
14.	Bojongsari	2.633	3.608	5.700	6.572	230	16.110	18.743	85,95
15.	Padamara	1.482	3.262	5.698	2.982	173	12.115	13.597	89,10
16.	Pengadegan	4.639	910	2.585	4.890	76	8.461	13.100	64,58
17.	Karangjambu	3.078	638	5.472	198	0	6.308	8.486	74,33
18.	Kertanegara	1.438	2.274	4.937	2.519	23	9.753	11.191	87,15
J U M L A H		60.524	65.213	90.446	83.524	4.085	243.268	302.952	80,29



Kendala yang di hadapi antara lain :

1. Proses penghimpunan data yang bersumber dari masing-masing kecamatan mengalami keterlambatan dalam pengumpulannya, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman kader untuk memahami indikator pendataan keluarga yang diharapkan.
2. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam meningkatkan ekonomi produktif.
3. Produktifitas ekonomi perempuan di Kabupaten Purbalingga masih minim.

Berdasarkan kendala yang dihadapi dari pendataan keluarga tersebut diatas, upaya yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam mendapatkan hasil dari pendataan keluarga yaitu:

1. Pelatihan teknis untuk petugas/ kader pendataan pada tingkat kecamatan dan selanjutnya dilanjutkannya untuk kader di tingkat desa/ kelurahan.
2. Memberikan pengertian kepada petugas/ kader pendataan yang ada di kecamatan agar dapat menyampaikan hasil pendataan dari masing - masing kecamatan secara tepat waktu.
3. Dilaksanaannya pelatihan dalam mengelola ekonomi produktif.
4. Melakukan pembinaan kepada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sehingga dapat lebih mandiri, inovatif dan kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada di sekitar menjadi nilai jual yang dapat meningkatkan pendapatan.

Dari upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai keluarga sejahtera diatas, maka solusi yang ditempuh untuk membantu upaya tersebut cepat terealisasi antara lain :

1. Dilaksanakan pendataan keluarga guna mengetahui kondisi tingkat kesejahteraan keluarga yang sebenarnya,
2. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan cakupan dan kualitas kelompok UPPKS guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam peningkatan ekonomi produktif. Pelaksanaan pelatihan dalam mengelola produk UPPKS dan dibuka pameran produk UPPKS guna sarana promosi produk UPPKS,



3. Membina kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak dan remaja dan juga meningkatkan kualitas keluarga lanjut usia.
4. Melaksanakan advokasi melalui gerak Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB dengan cara pemutaran film diselingi penyampaian pesan-pesan kepada masyarakat,
5. Metode penyampaian pesan melalui media radio juga dilakukan, tetapi metode ini kurang efektif karena hanya berupa pesan searah sehingga kurang mendapat tanggapan pendengar radio,
6. Melakukan Pembinaan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK – R). Kelompok ini berfungsi untuk sarana sosialisasi dan konseling bagi remaja dalam meningkatkan pengetahuan reproduksi remaja. Karena dengan meningkatkan pengetahuan reproduksi remaja dapat mencegah atau mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi. Karena tingkat kematangan usia perkawinan berpengaruh pada kualitas keluarga. Kelompok ini juga melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Generasi Berencana (GenRe) di sekolah – sekolah yang tujuannya untuk memotivasi siswa siswi lebih merencanakan masa depannya,
7. Program Kampung KB yang sarannya adalah rukun warga tertinggal / ranking kelasnya lebih rendah dari Rukun Warga lainnya di 18 Kecamatan Kabupaten Purbalingga. Untuk tahun 2018 sudah dicanangkan 36 Kampung KB untuk seluruh Kabupaten Purbalingga. 36 Kampung KB yang sudah dicanangkan yaitu sebagai berikut :
 - Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Bajong Rw. 05;
 - Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Talagening Rw. 11;
 - Kampung KB Kecamatan Bojongsari, Desa Bumisari Rw. 12;
 - Kampung KB Kecamatan Kemangkong, Desa Jetis Rw. 03;
 - Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Wirasaba Rw. 04;
 - Kampung KB Kecamatan Kejobong, Desa Langgar Rw. 01;
 - Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Brecek Rw. 04;
 - Kampung KB Kecamatan Purbalingga, Desa Toyareja Rw. 01;
 - Kampung KB Kecamatan Kalimanah, Desa Karangasari Rw. 05;
 - Kampung KB Kecamatan Kutasari, Desa Karangcegak Rw. 01;



- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Karangnangka Rw. 02;
- Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Palumbungan Rw. 02;
- Kampung KB Kecamatan Karangreja, Desa Gondang Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Karanganyar, Desa Brakas Rw. 02;
- Kampung KB Kecamatan Karangmoncol, Desa Baleraksa Rw. 09;
- Kampung KB Kecamatan Rembang, Desa Bantarbarang Rw. 08;
- Kampung KB Kecamatan Bojongsari, Desa Pekalongan Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Padamara, Desa Mipiran Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Pengadegan, Desa Pasunggingan Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Karangjambu, Desa Sirandu Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Kertanegara, Desa Kasih Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Kertanegara, Desa Langkap Rw 03 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Karanggedang Rw 02 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Tlagayasa Rw 07 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Pengadegan, Desa Pengadegan Rw 05 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Padamara, Desa Kalitinggar kidul Rw 01 dengan keterangan desa Gizi Buruk (Stunting)
- Kampung KB Kecamatan Karangreja, Desa Tlahab Kidul Rw 04 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Kutasari, Desa Candinata Rw 03 dengan keterangan desa Gizi Buruk (Stunting)
- Kampung KB Kecamatan Kemangkon, Desa plumutan Rw 05 dengan keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Sempor Lor Rw 02 dengan kategori desa keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Cilapar Rw 02 dengan kategori desa keterangan Gizi Buruk (Stunting);



- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Selaganggeng Rw 01 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Keradenan Rw 03 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Sangkanayu Rw 05 dengan kategori desa Gizi Buruk (stunting);
- Kampung KB Kecamatan Karangmoncol, Desa Sirau Rw 04 dengan kategori desa tertinggal;
- Kampung KB kecamatan Karangjambu, Desa Jinkang Rw 02 dengan keterangan desa tertinggal

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga adalah :

- a. Program Pemberdayaan Keluarga
- b. Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SASARAN 12 :

TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk* mendapatkan nilai capaiannya sebesar 113,06 persen dengan kategori berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.52 Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target akhir
Rata-rata angka kelahiran total / TFR	Per 1000 Wanita	2.1	2.08	1.96	2.25	1.99	113,06%	2



Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran atau fertilitas selain faktor mortalitas dan migrasi. Faktor fertilitas secara umum berkorelasi positif terhadap laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, pengendalian jumlah penduduk yang terkait faktor fertilitas dapat dilakukan melalui gerakan program Keluarga Berencana (KB). Meskipun pemakaian alat kontrasepsi bukan merupakan satu-satunya faktor yang secara langsung berpengaruh, namun diyakini bahwa faktor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan fertilitas. *Total Fertility Rate* (TFR) atau Angka Kelahiran Total mengindikasikan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur (15-49 tahun). Upaya menggerakkan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) diawali dengan menurunkan angka TFR. Upaya ini difokuskan pada kelahiran yang terjadi pada usia remaja yang menjadi penyumbang besar bagi kenaikan maupun penurunan TFR. Hal ini dikarenakan *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) dan *Total Fertility Rate* (TFR) memiliki hubungan yang negatif. Artinya, Semakin banyak Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi maka Angka Kelahiran Total (TFR) akan semakin rendah. Begitupula sebaliknya, semakin rendah CPR maka TFR akan semakin tinggi. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan terjadi hubungan positif diantara kedua parameter itu, dimana semakin tinggi CPR diikuti pula dengan semakin tingginya TFR, dan sebaliknya, semakin rendah CPR, diikuti semakin rendah TFR.

Pendataan keluarga tahun 2017 di Kabupaten Purbalingga Angka Kelahiran Total (TFR) menunjukkan angka sebesar 1.96, angka tersebut di dapatkan dari Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun sebanyak 187.043 dan Peserta KB Aktif pemakai alat kontrasepsi sebanyak 148.517 sehingga di dapatkan angka TFR tersebut. TFR di kabupaten purbalingga dapat dikategorikan kedalam kuadran IV dimana Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) banyaknya PUS pemakai alat kontrasepsi yang semakin tinggi maka akan berpengaruh pada Angka Kelahiran Total (TFR) yang semakin rendah. Namun berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2018 angka TFR menunjukkan peningkatan sebesar 0.03 % menjadi 1.99 angka tersebut di dapatkan dari Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun sebanyak 187.043 dan peserta KB aktif pemakai alat kontrasepsi sebanyak 147.650 atau sekitar 78.93 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak



189.818 dengan Angka Pemakai kontrasepsi (CPR) sebanyak 148.517 atau sekitar 78.24 dan pada tahun 2018 sebanyak 187.043 dengan Angka Pemakai kontrasepsi (CPR) sebanyak 147.650 atau sekitar 78.93 maka dikabupaten purbalingga terjadi penurunan angka untuk Pasangan Usia Subur yang berpengaruh kepada menurunnya angka pemakaian kontrasepsi sehingga akan berakibat meningkatnya angka TFR. Menurunnya angka pemakai kontrasepsi dapat di pengaruhi dari berbagai faktor salah satunya yaitu peserta yang *drop out* KB dengan alasan ingin anak lagi sehingga akan berpengaruh pada meningkatnya angka TFR yang dikategorikan kedalam kuadran keempat.

Kendala yang dihadapi :

1. Masih Tingginya angka Usia Kawin Pertama (UKP) yang idealnya jika usia wanita menikah berumur 20 tahun lebih dan jika laki laki berumur 25 tahun lebih. Sehingga masa Subur Pasangan Usia Subur tidak terlalu lama;
2. Belum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengatur Kelahiran dengan memakai alat kontrasepsi terutama Metode KB Jangka Panjang (MKJP);
3. Masih tingginya Angka *Drop Out* Pemakaian Alat Kontrasepsi

Upaya yang dilaksanakan.

1. Sosialisasi Meningkatkan Usia Kawin Pertama melalui Media KIE dan Kelompok Kegiatan Pusat Konseling Remaja (PIKR) jalur sekolah ataupun jalur masyarakat;
2. Sosialisasi Kepada Masyarakat untuk mengatur Angka Kelahiran.

Program yang mendukung Sasaran Meningkatkan Pelayanan Terhadap PMKS dan Kelompok Masyarakat Rentan Lainnya adalah :

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB
- b. Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB
- c. Program Pengendalian Penduduk



Misi 5 :

“MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI RAKYAT, DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, INDUSTRI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDISIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA”

SASARAN 13 :

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEMERATAAN EKONOMI, BERKURANGNYA ANGKA PENGANGGURAN, SERTA TERKENDALINYA ANGKA INFLASI

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi, Berkurangnya Angka Pengangguran, Serta Terkendalinya Angka Inflasi* mendapatkan nilai capaiannya sebesar 132,11 persen dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :



Tabel 3.53 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi, Berkurangnya Angka Pengangguran, Serta Terkendalinya Angka Inflasi

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target akhir
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,48	5,33	5,33	<5	6,06	93,80	<4
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen			4,78	>5	5,12	102,40	>5
Laju Inflasi	Persen	1,62	2,39	3,72	>5	3,01	166,11	<5
Angka Kemiskinan	Persen	19,70	18,98	18,80	16-18	15,62	166,11	13 - 15
							132,11	

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penganggur adalah angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan suatu pemborosan ekonomi yang sangat mahal karena tidak mempunyai mata pencaharian namun membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari (BPS). Selain itu penganggur memiliki potensi negatif yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial yang dapat mengganggu keamanan politik secara keseluruhan.

Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten Purbalingga untuk Tahun 2018 ditargetkan sebesar <5%. Jika dibandingkan dengan target tersebut, maka berdasarkan Data BPS Kabupaten Purbalingga untuk Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2018 adalah sebesar 6,06%, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang yang merupakan pengangguran (tidak bekerja, sedang mempersiapkan usaha, atau mencari pekerjaan) atau terjadi peningkatan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 angka

pengangguran terbuka tertinggi selama 5 tahun terakhir. Tahun 2016 dan 2017 angka pengangguran terbuka sebesar 5,33%. Capaian terhadap target akhir RPJMD 2016 – 2021 telah tercapai sebesar 66,06%

Table 3.54 Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten Purbalingga Tahun 2018

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target akhir
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,33	5,33	<5	6,06	93,80	<4

Di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 tercatat jumlah penduduk usia produktif sebesar 683.554 orang. Dari data tersebut, penduduk usia produktif yang sudah bekerja sebanyak 657.416 orang dan selebihnya sebanyak 26.138 orang masih belum bekerja. Angka pengangguran di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh kaum laki-laki sebanyak 17.545 orang atau 67,12 persen dan kaum perempuan sebanyak 8.593 orang atau 22,88 persen. Melihat tingkat pendidikan masyarakat, lulusan SMP kebawah merupakan penyumbang terbesar pengangguran di Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar 15.201 orang.

Gambar 3.2 Industri bulu mata dan rambut palsu



Permasalahan ketenagakerjaan ini disebabkan oleh :

- PHK pada perusahaan bulu mata dan angkatan kerja baru masih banyak yang belum terserap di lapangan kerja.
- Perusahaan-perusahaan yang ada milik asing dan minim bahan baku lokal sehingga mudah saja pabrik-pabrik asing ini berekspansi ke daerah lain atau



- negara lain yang memiliki kebijakan perburuahan lemah dan upah tenaga kerja murah.
- c. Belum tersedianya data Pengangguran di kabupaten Purbalingga secara rinci dan *update*.
 - d. Masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran.
 - e. Terbatasnya lapangan kerja khususnya yang menampung tenaga kerja laki-laki sehingga harus didukung dari sektor yang lain seperti investasi, pariwisata, pendidikan dan lainnya, tidak cukup hanya dari sisi pelatihan dan penempatan kerja saja.
 - f. Jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja.
 - g. Kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja.

Dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Purbalingga, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan Pelatihan kerja
 - a. Pelatihan yang berbasis kebutuhan masyarakat
Pelatihan pengolahan makanan, konveksi/garmen, potong rambut, rias manten, kerajinan, kapster salon dan lainnya. Pelatihan tersebut dilaksanakan di desa-desa di wilayah Kabupaten Purbalingga yakni di Kecamatan Karangjambu Desa Sanguwatang dan Jingsang; Kecamatan Purbalingga di Kelurahan Purbalingga Kidul; Kecamatan Kembangkon di Desa Gambarsari dan Kecamatan Padamara di Desa Mipiran. Peserta pelatihan dimaksud berjumlah 225 orang yang diharapkan mampu untuk berwirausaha sendiri.
 - b. Pelatihan berbasis kompetensi
Pelatihan klasikal yang berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah ditentukan dengan Instruktur yang memiliki kompetensi di bidang kejuruan meliputi kejuruan Las, Otomotif, Menjahit, PHP, TIK , Design Grafis, Teknik Pendinginan. Pelatihan berbasis kompetensi ini dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Purbalingga. Peserta pelatihan sejumlah 608 orang. Dengan pelatihan tersebut diharapkan



dapat membekali peserta untuk mendapatkan pekerjaan baik wirausaha maupun bekerja di Perusahaan.

- c. Pelatihan Pra Seleksi Pemagangan ke Luar Negeri (Jepang) melalui 2 jalur yakni Program *Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises* (IMM) melalui rekrutmen pemerintah dan *Sending Organization* (SO), melalui LPKS yang telah mendapatkan izin dari Kemnaker RI Peserta dilatih sebanyak 47 orang terdiri dari 20 orang mengikuti Program IMM (Rekrutmen melalui pemerintah) dan sebanyak 27 orang melalui program SO yang dilatih oleh LPKS.

2. Program penempatan kerja

Program Penempatan Kerja yang dimaksud adalah :

- a. Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) di wilayah kabupaten Purbalingga pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Purbalingga;
- b. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) di luar Provinsi Jawa Tengah seperti di Perkebunan Kelapa Sawit Pulau Kalimantan, Perusahaan Garmen di Kota/ Kabupaten Bandung Jawa Barat dan Transmigrasi ke Sijunjung, Provinsi Sumatera Utara;
- c. Antar Kerja Antar Negara (AKAN) seperti ke Negara Jepang, Taiwan, Hongkong, Malaysia dan Singapura;
- d. *Job Canvasing* ke Perusahaan-perusahaan di sekitar Kabupaten Purbalingga untuk mendapatkan data lowongan kerja sekaligus menempatkan melalui seleksi dan rekrutmen.;

Ada beberapa perusahaan dan Instansi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan seleksi seperti Alfamart, Indomart, BTPN, Optik Diamond dan PNM (Permodalan Nasional Madani). Pada tahun 2018 dari sejumlah pencari kerja sebanyak 16.115 orang yang telah ditempatkan sebanyak 7.599 orang, dengan rincian penempatan kerja di kabupaten Purbalingga (AKAL) sebanyak 7.350 orang, di luar kabupaten Purbalingga (AKAD) sebanyak 69 orang, dan di luar negeri (AKAN) sebanyak 180 orang.

Data pencari kerja dan penempatan kerja untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini .



Tabel 3.55 Jumlah Pencari Kerja dan Penempatan Kabupaten Purbalingga

NO	Bulan	Pencaria Kerja			Penempatan											
					AKAL			AKAD			AKAN			Jumlah		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	JANUARI	443	687	1.130	5	339	344	-	-	-	-	9	9	5	348	353
2	FEBRUARI	274	510	784	15	391	406	8	2	10	5	21	26	28	414	442
3	MARET	245	340	585	1	163	164	3	1	4	-	7	7	4	171	175
4	APRIL	250	273	523	-	131	131	-	-	-	4	12	16	4	143	147
5	MEI	489	687	1.176	3	250	253	-	-	-	1	9	10	4	259	263
6	JUNI	888	1.564	2.452	8	203	211	-	-	-	-	8	8	8	211	219
7	JULI	1.491	2.562	4.053	-	494	494	8	3	11	2	23	25	10	520	530
8	AGUSTUS	619	950	1.569	18	593	611			-	1	8	9	19	601	620
9	SEPTEMBER	649	919	1.568	156	596	752	-	-	-	5	15	20	161	611	772
10	OKTOBER	405	562	967	494	1.693	2.187	6	2	8	3	27	30	503	1.722	2.225
11	NOPEMBER	239	452	691	159	720	879	-	-	-	3	5	8	162	725	887
12	DESEMBER	233	401	634	199	719	918	16	20	36	-	12	12	215	751	966
	JUMLAH	6.225	9.907	16.132	1.058	6.292	7.350	41	28	69	24	156	180	1.123	6.476	7.599

Sumber: DINNAKER Kabupaten Purbalingga, 2018



2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel 3.56 *Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)*

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen			4,78	>5	5,12	102,40

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar 5,12 persen mengalami kenaikan sebesar 0,34 persen dari tahun sebelumnya yakni sebesar 4,78. Dari target yang ada pertumbuhan ekonomi telah melampaui target dengan tingkat capaian 102,4 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yaitu sebesar 12,39 persen. Salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya penggunaan *gadget handphone* di masyarakat. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Empat belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 5–12 persen. Sedangkan tiga lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu <5 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 meningkat dikarenakan adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Investasi di Kabupaten Purbalingga berupa pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan terutama disepanjang jalan utama, perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya dan pembayaran ganti untung lahan bandara. Peningkatan ekspor luar negeri utamanya dari hasil industri rambut, barang dari kayu dan knalpot. Hasil industri rambut merupakan komoditas unggulan yang di ekspor hingga Negara Korea.



Tigabelas belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 5-12 persen tersebut antara lain:

- a. Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 12,39 persen,
- b. Lapangan Usaha Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,75 persen,
- c. Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,70 persen,
- d. Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 8,06 persen,
- e. Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 8,74 persen,
- f. Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,43 persen,
- g. Lapangan Usaha pengadaan listrik sebesar 6,75 persen
- h. Lapangan Usaha Penyediaan akomodasi sebesar 6,46 persen.
- i. Lapangan Usaha transportasi dan Pergudangan sebesar 6,31 persen,
- j. lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran sebesar 6,18 persen.
- k. Lapangan Usaha Real Estate sebesar 6,08 persen,
- l. Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 5,64 persen, dan
- m. Lapangan Usaha Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah sebesar 6,25 persen.

Sedangkan empat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif <5 persen adalah

- a. Lapangan Pertambangan dan Penggalan sebesar 0,24 persen,
- b. Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,97 persen,
- c. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,53 persen,
- d. Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,84 persen.

Ada dua lapangan usaha yang memiliki peran penting dalam membentuk PDRB Kabupaten Purbalingga yakni lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha industri pengolahan. Peran lapangan usaha pertanian dalam pembentuk PDRB Kabupaten Purbalingga sebesar 27,27 persen sedangkan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 26,85 persen.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pertumbuhan ekonomi adalah

- a. Peran lapangan usaha yang masih menggantungkan ke Sumber Daya Alam (SDA) masih relatif tinggi.

- b. Produktivitas sektor pengolahan yang masih rendah karena faktor transformasi struktural dimana perubahan sosial tenaga kerja sektor pertanian ke sektor manufaktur sangat lambat.
- c. Banyaknya industri *foot lose* di Purbalingga yakni industri yang bahan bakunya masih tergantung pada wilayah lain seperti pabrik bulumata.

Hal yang dilakukan adalah

- a. Mengembangkan tatakelola pariwisata daerah, industri ini memberi efek multiplier yang luas dan dapat menjadi *prime mover* perekonomian daerah. Berkembangnya kepariwisataan akan dapat mengungkit pertumbuhan berbagai sektor ekonomi seperti sektor perhotelan dan restoran, sektor angkutan, sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian, dan sebagainya termasuk sektor-sektor informal. Besarnya potensi kepariwisataan Kabupaten Purbalingga terutama potensi alam yang tersebar di seluruh wilayah perlu didayagunakan secara optimal untuk pengembangan kepariwisataan baik melalui pengembangan obyek-obyek wisata baru oleh pemerintah kabupaten maupun melalui pengembangan desa wisata. Promosi investasi daerah terutama melalui investasi yang bahan baku lokal

Gambar 3.3 Wisata kabupaten purbalingga



- b. Usaha-usaha yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan di sektor pertanian adalah dengan memilih produk pertanian yang memiliki nilai tambah tinggi serta meningkatkan indeks pertanaman untuk meningkatkan produktivitas lahan.

Gambar 3.4 Pembangunan Daerah Irigasi Sungai



- c. Meningkatkan peran lapangan usaha diindustri pengolahan yakni dengan menciptakan *young enterprenuer* dan pembangunan *local branding* atau merk lokal Purbalingga untuk menjadi produk yang mendunia.
- d. Meningkatkan upaya promosi produk lokal, dengan orientasi substitusi produk luar dan juga berorientasi pada perdagangan antar daerah/pulau
- e. Mempermudah akses keuangan terhadap lembaga keuangan seperti Program Subsidi Bunga, Program **Kredit Mawar** dan lain-lain

Guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga, salah satu inovasi yang diluncurkan untuk mendukung berkembangnya UMKM di Kabupaten Purbalingga dengan meluncurkan Program **Kredit Mawar**. Program Kredit **MAWAR** yang merupakan akronim Melawan Rentenir itu diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kredit ini bisa dinikmati tanpa bunga alias bunga 0 persen, tapi membayar provisi sebesar 6 persen dimuka. Plafon kredit sebesar Rp 2,5 Juta untuk setiap pelaku UMKM dengan jatuh tempo satu tahun. Bila angsuran lancar, pelaku bisa kembali mengajukan kredit yang sama dengan plafon Rp15 Juta. Kredit Mawar bakal menjadi ‘gizi’ tambahan bagi pelaku UMKM. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten telah meluncurkan Program Subsidi Bunga yang berlangsung sejak tahun 2005 lalu. Program Subsidi Bunga merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan sejumlah perbankan di Purbalingga. Pelaku UMKM yang mengajukan kredit mendapat subsidi pembayaran bunga sebesar 50 persen.

Gambar 3.5 Kredit Mawar



3. Laju Inflasi

Tabel 3.57 Capaian indikator laju inflasi di Kabupaten Purbalingga

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target akhir
Laju Inflasi	Persen	1,62	2,39	3,72	<5	3,01	166,11	<5

Laju Inflasi adalah persentase selisih Indeks Harga Konsumen (IHK) dari dua periode waktu. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah perbandingan nilai konsumsi bulan berjalan dengan nilai konsumsi dasar pada periode yang telah ditentukan dikalikan seratus. IHK berguna untuk mengukur dari waktu ke waktu, perubahan pengeluaran/biaya dari sekeranjang tetap (*fixed basket*) barang dan jasa (paket komoditas) yang biasa dibeli oleh mayoritas rumah tangga, dengan kualitas dan kuantitas dari *basket* yang



dianggap konstan pada tahun dasar. Indeks tersebut semata-mata mencerminkan perubahan harga, yang didesain sebagai ukuran dari dampak perubahan harga pada pembelian barang konsumsi dan jasa, di antara rumah-tangga-rumah-tangga di masing-masing kota. Indeks Harga Konsumen atau *Consumer Price Index* tidak sama dengan Indeks Biaya Hidup (IBH) atau *Cost of Living Index* (COLI), karena IBH mengukur perubahan biaya untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama, yang dialami rumah tangga pada periode dasar. Tingkat kepuasan dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup, keberadaan barang dan jasa baru, serta bertambahnya kekayaan. Karena tidak ada cara yang obyektif untuk menentukan tingkat kepuasan mutlak/absolut, maka IBH tidak dapat dihitung. Untuk sementara IHK dapat mengaproksimasikan IBH, asalkan paket komoditas dan kepuasan dianggap tidak berubah. Dalam upaya menjaga relevansi IHK dan untuk mencerminkan pola pengeluaran rumah tangga yang terbaru, paket komoditas IHK dan diagram timbang IHK direvisi secara berkala menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH). Kebanyakan negara-negara memakai siklus lima tahunan untuk memperbaharui tahun dasar IHK. Laju inflasi/deflasi setahun (*Year on Year Inflation*) adalah persentase selisih indeks harga konsumen (IHK) bulan m pada tahun y terhadap IHK bulan m tahun $(y-1)$, yang berarti merupakan laju inflasi/deflasi dari bulan $(m + 1)$ pada tahun $(y-1)$ hingga bulan m pada tahun y .

Kondisi perekonomian Kota Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 apabila ditinjau dari perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara umum, terlihat lebih stabil apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Kondisi ini dapat dilihat dari pergerakan indeks harga konsumen dari bulan ke bulan yang cenderung stabil, menunjukkan relatif stabilnya harga barang dan jasa yang beredar, sehingga inflasi tahunan yang dicapai lebih rendah dari tahun sebelumnya.

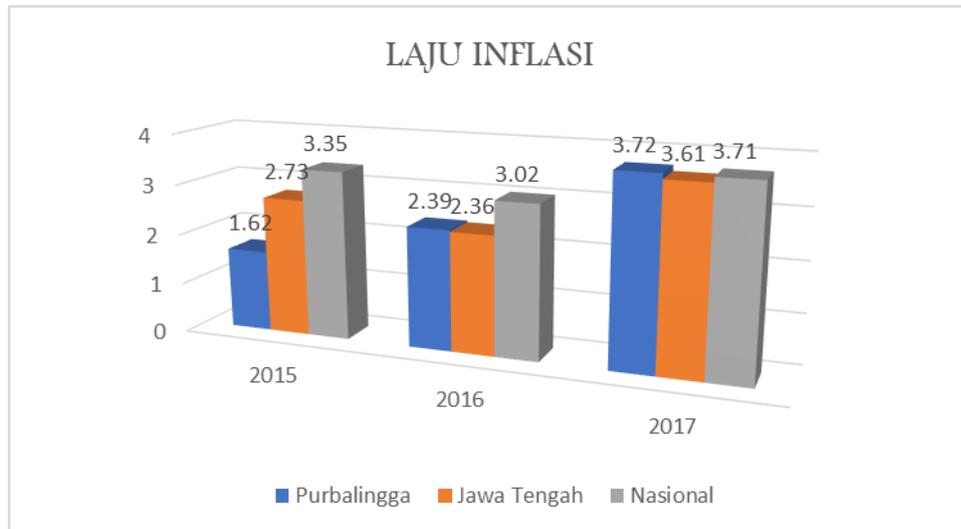
Gambar 3.6 Aktivitas jual beli di Pasar



Selama tahun 2018, inflasi *year on year* (yoy) tahun 2018 secara umum mencapai 3,28 persen. Apabila dibandingkan dengan inflasi *year on year* tahun 2017 terjadi penurunan, karena inflasi *year on year* tahun 2017 sebesar 3,71%. Persentase perubahan indeks harga konsumen di masing-masing kelompok pengeluaran dari yang terbesar sampai terkecil adalah sebagai berikut: kelompok bahan makanan mengalami inflasi 5,02%; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bangunan mengalami inflasi 3,33%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi 2,67%; kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan inflasi 2,57%; kelompok sandang mengalami inflasi 2,41%; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami inflasi 2,25%; serta kelompok kesehatan mengalami inflasi 2,23%.

Pada tahun 2015 inflasi Kabupaten Purbalingga sebesar 1,62% lebih rendah dibandingkan provinsi sebesar 2,73 persen dan nasional 3,35%. Pada tahun 2016 laju inflasi Kabupaten Purbalingga meningkat menjadi 2,39 lebih tinggi dibandingkan inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,36 persen dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,02%. Pada tahun 2017, inflasi di Kabupaten Purbalingga sebesar 3,72%. Kondisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,61% dan inflasi nasional sebesar 3,71%.

Grafik 3.13 Perbandingan laju inflasi Purbalingga, Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan yang dialami dalam pengendalian inflasi adalah komponen tertinggi penyumbang inflasi dari tahun ke tahun adalah kelompok makanan dan minuman, dan kelompok ini sangat terasa pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat purbalingga yang masih banyak berada dibawah dan sekitar garis kemiskinan. Upaya yang dilaksanakan dalam pengendalian inflasi di daerah adalah

- a. Mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk mengkoordinasikan seluruh pengambil kebijakan di level daerah dalam pengendalian inflasi.
- b. Melakukan pasar murah pada hari-hari besar
- c. Membagikan bahan pangan berupa beras dan daging agar masyarakat yang menurun daya belinya masih mampu bertahan untuk tidak jatuh miskin

4. Angka kemiskinan

Tabel 3.58 Capaian Indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target 2021
Angka Kemiskinan	Persen	18,98	18,80	16-18	15,62	166,11	13-15



Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.

Penghitungan kemiskinan pada dasarnya dapat menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendapatan, namun di negara berkembang seperti Indonesia, pencatatan pendapatan tidak semudah di negara maju yang mampu melaporkan catatan pendapatan penduduknya dengan baik, oleh karena itu pencatatan data pengeluaran cenderung lebih menggambarkan kondisi ekonomi/daya beli sebuah rumah tangga.

Secara umum, pada periode tahun 2016 – 2018 tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Pada tahun 2017 kemiskinan Kabupaten Purbalingga 18,8 persen menurun menjadi 15,62 persen atau dengan tingkat capaian 108,83 persen. Penurunan kemiskinan ini diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Pada tahun 2018, capaian kinerja terhadap target akhir yang di tetapkan pada akhir RPJMD 2016 – 2021 sudah mencapai 83,22 persen.

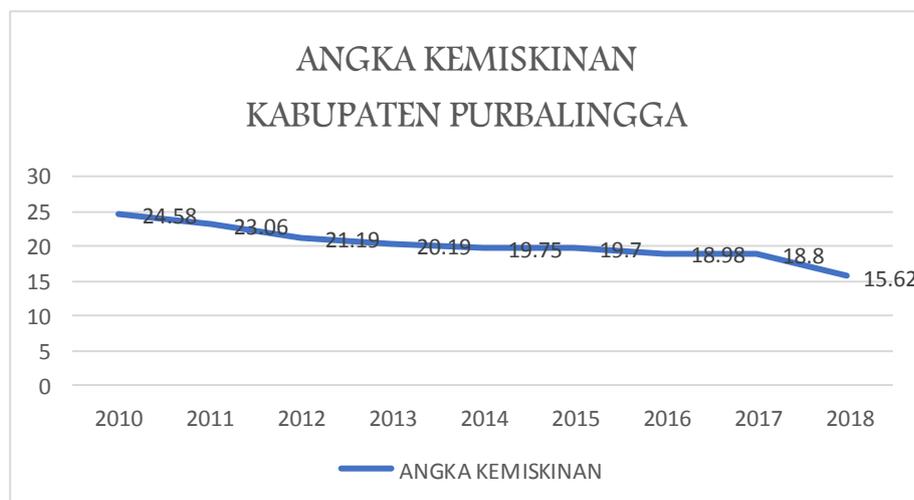
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 sebesar 171.880 jiwa (18,80%), dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 313.343,- perkapita perbulan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 176.490 jiwa (19,70%), maka jumlah penduduk miskin telah menurun sekitar 0,9 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,01 persen dan Nasional 10,12 persen. Kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagi berikut :

Table 3.59 Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan dan Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 - 2018

Karakteristik Kemiskinan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk miskin (ribu)	176,04	176,49	171,78	171,88	144.16
Persentase penduduk miskin	19,75	19,70	18,98	18,80	15,62
Garis kemiskinan (Rp./kp/bln)	275.022	283.366	301.862	313.343	324.343

Dengan menggunakan dasar penghitungan sementara proyeksi dari BPS maka diperoleh persentase tingkat kemiskinan tahun 2018 sebesar 15,62%, lebih rendah dari tahun sebelumnya..

Grafik 3.14 Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga



Berdasarkan hasil analisis atas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, maka dapat diambil beberapa catatan penting sebagai berikut :

- Beban pengeluaran masyarakat miskin didominasi oleh pengeluaran pangan (terutama beras) serta rokok. Pengeluaran non pangan terbesar adalah biaya personal pendidikan dan perbaikan rumah.



- b. Pada BDT 2015 menunjukkan jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan pangan keluarga berupa Beras Miskin (Raskin) mencapai sebanyak 104.711 keluarga, dari jumlah total sasaran penerima manfaat sebanyak 117.646 KK. Total penduduk miskin BDT 2015 sebanyak 117.652 KRT. Tahun 2018, penerima Beras Sejahtera (Rastra) mencapai 133.922 keluarga. Dengan demikian, semua Rumah Tangga (RT) penduduk miskin mendapatkan rastra, ada kelebihan dari jumlah penduduk miskin BDT 2015 yaitu sekitar 16.270 RT.
- c. Jumlah penduduk miskin BDT 2015 sebanyak 457.640 jiwa, jumlah sasaran penerima jaminan kesehatan sebanyak 117.646 jiwa dan yang belum menerima sebanyak 24.785. Tahun 2018 yang sudah menerima jaminan kesehatan sebanyak 646.400. Dengan demikian catatan pentingnya adalah, jumlah penduduk penerima jaminan kesehatan tahun 2018 sudah melebihi jumlah penduduk miskin hasil BDT 2015.
- d. Berdasarkan BDT 2015, jumlah RTLH di Kabupaten Purbalingga mencapai 73.247 unit. Bantuan RTLH selama tahun 2015–2018 sebanyak 13.354 unit. Masih ada bantuan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan subsidi listrik namun sarasannya tidak ditemukan. Catatan penting atas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yaitu masih banyaknya rumah tidak layak huni yang belum terselesaikan mencapai sekitar 81,77 persen.
- e. Berdasarkan BDT 2015, jumlah rumah tangga yang belum memiliki tempat Buang Air Besar (BAB) sebanyak 39.126. Tahun 2018, rumah tangga yang mendapatkan fasilitas BAB sebanyak 4.130 rumah tangga. Dengan demikian menjadi catatan penting adalah masih banyak rumah tangga miskin yang belum memiliki jamban sehat, ada sekitar 89,44% yang masih belum menerima program dimaksud.
- f. Pada BDT 2015 menunjukkan jumlah penerima PKH sebanyak 12.440 orang/KK dari jumlah sasaran sebanyak 117.645 orang/KK. Pada tahun 2018, penerima PKH di Kabupaten Purbalingga mencapai 339.994 orang/KK. Dengan demikian jumlah penerima PKH jika dibandingkan dengan hasil BDT 2015 sudah melebihi jumlah sasaran yang ditemukan. Apabila dibandingkan dengan seluruh penduduk miskin BDT 2015 sebanyak



457.640 jiwa, maka yang belum/tidak menerima PKH sekitar 25,71% atau sekitar 117.646 jiwa/KK.

- g. Jumlah penerima KUR berdasarkan BDT 2015 adalah sebanyak 3500 jiwa. Pada tahun 2018, penerima akses pembiayaan mencapai 995 jiwa. Sementara itu yang mendapatkan pendidikan keterampilan ditahun 2018 sebanyak 608 jiwa. Dengan demikian menjadi catatan penting adalah jumlah penerima manfaat untuk akses pembiayaan pengembangan usaha menurun dan penerima keterampilan hanya bersumber dari APBN. Menunjukkan intervensi untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin kategori rendah.

Guna menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga salah satu inovasi yang dilaksanakan adalah dengan program **RANTANG BERKAH** yaitu pemberian makanan siap santap setiap hari sejumlah 2 porsi kepada para lansia kurang mampu dan sebatangkara. Penerima manfaat rantang berkah sejumlah 305 orang lansia yang terbagi di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Rembang, Kaligondang, Bukateja dan Kemangkon. Guna mendukung program rantang berkah juga bekerjasama dengan pemilik warung UMKM sebagai penyedia rantang berkah

Di Kabupaten Purbalingga jumlah lansia yang tercatat lebih dari 7.000 orang, namun yang miskin dan sebatang kara kurang lebih 1.500 orang dan untuk saat ini dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga baru dapat menangani 305 orang lansia kurang mampu sebatang kara di 7 kecamatan. Terinci penerima rantang berkah di tiap kecamatan adalah Kecamatan Kemangkon sebanyak 78 orang, Mrebet sebanyak 67 orang, Kutasari sebanyak 51 orang, Kaligondang sebanyak 44 orang, Bukateja sebanyak 24 orang, Rembang sebanyak 23 orang dan Bojongsari sebanyak 18 orang.

Penerima rantang berkah telah melalui seleksi dari tim kabupaten yang terdiri dari unsur kecamatan sampai dengan desa yang juga mengikutsertakan tokoh masyarakat di wilayah tersebut dan diharuskan datang langsung melaksanakan survei ke rumah masing-masing penerima manfaat rantang berkah untuk mengetahui layak atau tidaknya orang tersebut mendapatkan rantang berkah

Gambar 3.7 Penerima program rantang berkah



Langka-langkah kebijakan baik secara umum maupun terhadap intervensi program dan kegiatan dalam rangka peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas koordinasi tim pengendali inflasi daerah, mendorong struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, khususnya untuk komoditas kebutuhan pokok masyarakat serta mengelola dampak dari penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
 - 1) Perbaikan kualitas sarana perdagangan terutama pasar rakyat.
 - 2) Peningkatan kegiatan operasi pasar khususnya operasi pasar bahan pokok masyarakat.
 - 3) Penyusunan *Roadmap* Pengendalian Inflasi
 - 4) Penyusunan laporan hasil analisis permasalahan ekonomi sektor riil untuk memberikan rekomendasi kebijakan pengendalian pangan di daerah.
- b. Melakukan integrasi program bantuan Rastra bagi penduduk miskin antara pemerintah pusat dan daerah yang difokuskan pada mekanisme pemberian bantuan.
 - 1) Bantuan Rastra Purbalingga (Rasbanga) yang meliputi bantuan beras dan daging diberikan kepada masyarakat miskin dengan volume yang sama dengan yang diberikan oleh pemerintah pusat.



- 2) Mekanisme bantuan pangan daging dilakukan dengan pemusatan alokasi berdasarkan kecamatan yang dikoordinasikan oleh panitia kurban daerah sehingga dapat memperluas cakupan sasaran bantuan.
- c. Memperluas kebijakan jaminan perlindungan kesehatan dari penduduk miskin menjadi seluruh penduduk miskin Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target Universal Health Coverage (UHC).
 - 1) Perbaikan layanan kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah terjauh, antara lain peningkatan layanan kesehatan kelas 3 di rumah sakit dan perluasan Puskesmas PONEB
 - 2) Penyediaan satu bidan satu desa
 - 3) Penyediaan ambulan 24 jam setiap desa terjauh dari pusat layanan kesehatan
- d. Perluasan cakupan akses rumah tangga terhadap tempat tinggal yang layak dengan sasaran rumah tangga memiliki rumah tidak layak huni pada prioritas 2 dalam BDT 2015.
 - 1) Pengembangan sistem aplikasi data rumah layak huni.
 - 2) Penyediaan anggaran bantuan RTLH yang memadai sesuai kebutuhan rehab rumah layak huni berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
 - 3) Bantuan sosial rumah layak huni melalui CSR daerah.
- e. Penyusunan kebijakan integrasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui intervensi APBDes dengan mekanisme peraturan bupati. Intervensi program dan kegiatan melalui APBDes dengan :
 - 1) Program Desa Tuntas Buta Aksara
 - 2) Program 100% Desa Terang
 - 3) Program Desa Tuntas Pendidikan Dasar
 - 4) Program Pendampingan RTLH melalui "Satu Desa 3 Bantuan RTLH"
 - 5) Program Hantar Pangan Bagi Lansia
 - 6) Program Desa ODF.

Program yang dilakukan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah adalah :

- a. Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja
- b. Program Kemitraan, Promosi dan Pemasaran Produk UMKM



- c. Program Pengembangan, Peningkatan Produktivitas dan daya saing produk UMKM
- d. Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- e. Program Promosi pemasaran potensi dan fasilitasi investasi
- f. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- g. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
- h. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- i. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- j. Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata
- k. Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair
- l. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan
- m. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura
- n. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan
- o. Program Pengembangan Budidaya Peternakan
- p. Program Pengembangan, Pengolahan, dan Pemasaran Produk Peternakan
- q. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
- r. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri
- s. Program Pembinaan Peningkatan Ketrampilan dan penempatan Kerja
- t. Program Peningkatan Perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial
- u. Program Ketrasmigrasian
- v. Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- w. Program Promosi pemasaran potensi dan fasilitasi investasi
- x. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
- y. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Misi 6 :

“MEWUJUDKAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG SEHAT DAN MENARIK UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MELALUI GERAKAN MASYARAKAT, YANG DIDUKUNG DENGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR/ SARANA PRASARANA KEWILAYAHAN YANG MEMADAI”

SASARAN 14 :***MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN***

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Kawasan Permukiman* mendapatkan nilai capaian sebesar 240,74% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.60 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Capaian %	Target Akhir
Luasan Kawasan Kumuh	Persen	1.16	0.47	0.27	0,65	0	240,74	0

Capaian tersebut diperoleh dari target penanganan luasan kawasan kumuh sebesar 65 persen dari total persentase luasan kumuh sebesar 0,04165 atau 21,053 Ha dan tertangani 100 persen, sehingga kawasan kumuh yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 643/351 Tahun 2014 pada Tahun 2018 tercapai 0 Ha.

Tabel 3.61 Lokasi Kumuh Kabupaten Purbalingga

No	Nama kawasan	Profil permukiman kumuh				Kategori
		Luas Kumuh (Ha)	Jumlah bangunan (Unit)	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah KK (KK)	
1	Purbalingga Wetan	8,15	309	1.302	448	Kumuh Ringan
2	Purbalingga Lor	4,85	94	433	106	Kumuh Ringan
3	Purbalingga Kidul	2,22	75	333	116	Kumuh Sedang
4	Kembaran Kulon	6,39	230	981	258	Kumuh Ringan
5	Kandanggampang	10,78	299	1.282	344	Kumuh Ringan
	TOTAL	32,39	1.007	4.308	1.272	

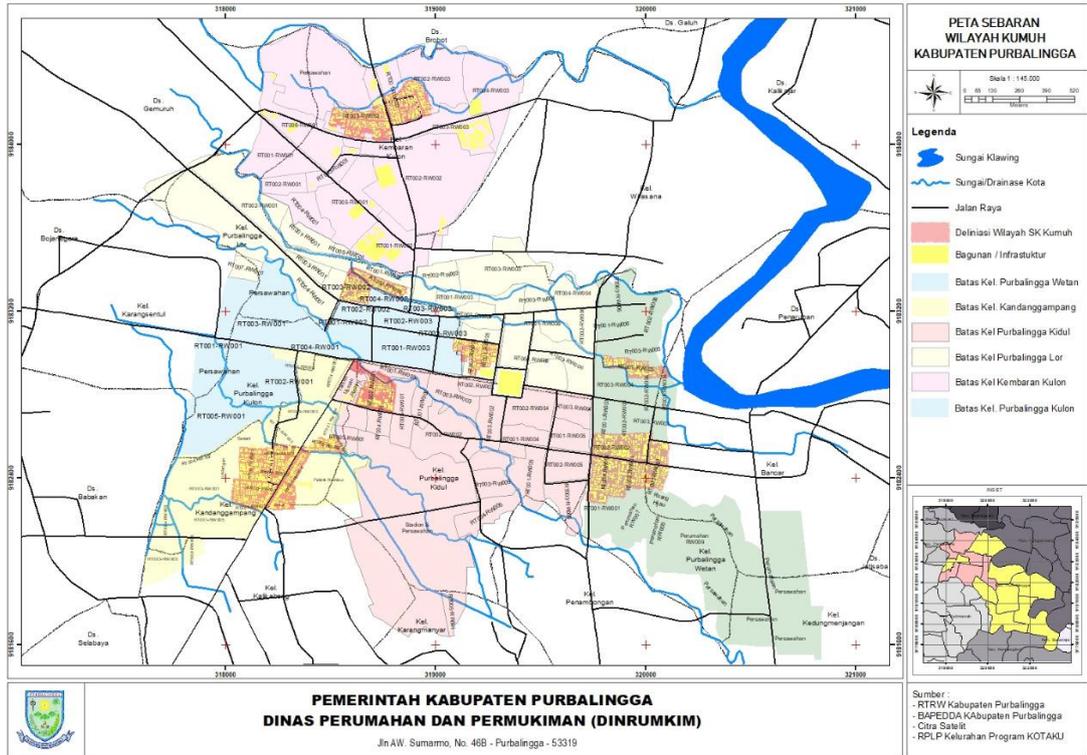
Sumber: DINRUMKIM Kab. Purbalingga, 2018

Table 3.62 Lokasi Kawasan Kumuh

No	KELURAHAN	RT	PERMUKIMAN KUMUH (Ha)			
			2015	2016	2017	2018
1	Kandanggampang	RT 1/RW1	0.82	0.82	0.82	0.00
2	Kandanggampang	RT 1/RW2	1.87	1.87	1.87	1.87
3	Kandanggampang	RT 1/RW4	0.13	0.13	0.00	0.00
4	Kandanggampang	RT 2/RW1	0.85	0.85	0.00	0.00
5	Kandanggampang	RT 2/RW2	0.79	0.79	0.00	0.00
6	Kandanggampang	RT 2/RW4	0.59	0.59	0.00	0.00
7	Kandanggampang	RT 3/RW1	1.85	1.85	0.00	0.00
8	Kandanggampang	RT 3/RW2	1.33	1.33	0.00	0.00
9	Kandanggampang	RT 3/RW4	2.55	2.55	2.55	2.55
10	Kembaran Kulon	RT 1/RW3	1.12	0.00	0.00	0.00
11	Kembaran Kulon	RT 2/RW3	2.05	0.00	0.00	0.00
12	Kembaran Kulon	RT 3/RW2	3.22	0.00	0.00	0.00
13	Purbalingga Kidul	RT 2/RW1	2.22	2.22	2.22	0.00
14	Purbalingga Lor	RT 2/RW2	2.15	0.00	0.00	0.00
15	Purbalingga Lor	RT 2/RW5	2.70	0.00	0.00	0.00
16	Purbalingga Wetan	RT 1/RW5	6.25	0.00	0.00	0.00
17	Purbalingga Wetan	RT 2/RW1	0.90	0.00	0.00	0.00
18	Purbalingga Wetan	RT 2/RW2	1.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL KUMUH		32.39	13.00	7.46	4.42

Sumber: DINRUMKIM Kab. Purbalingga, 2018

Gambar 3.8 Lokasi Kawasan Kumuh

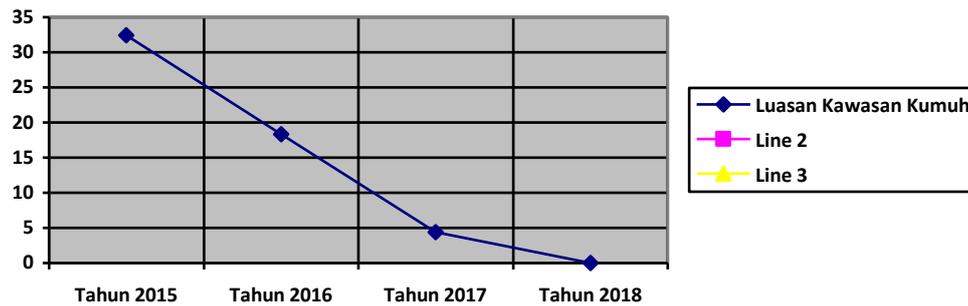


Kawasan kumuh perkotaan pada tahun 2015 seluas 32,39 Ha, selanjutnya secara bertahap luasan kawasan kumuh sampai dengan tahun 2017 berkurang menjadi 4,42 Ha, dan di tahun 2018 tercapai 0 Ha.

Tabel 3.63 Perkembangan Luasan Kawasan Kumuh

Indator Kinerja	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	32,39	18,3	4,42	0

Grafik 3.15 Perkembangan Luasan Kawasan Kumuh



Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri PU dan PR Nomor 14 Tahun 2016 telah dilaksanakan analisa data *baseline* permukiman tahun 2017 yang mengukur 7 Aspek 19 Kriteria dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.64 Data Baseline KOTAKU Tahun 2017 Kabupaten Purbalingga

ASPEK	KRITERIA	PERSENTASE %
1	2	3
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	41,68
	Kepadatan Bangunan	0,00
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	25,75
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	8,18
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	22,19
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	6,85
	Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	0,49
Kondisi Drainase	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,00
	Ketidaktersediaan Drainase	29,44
	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Kota	3,12
	Tidak Terpeliharanya Drainase	38,15

ASPEK	KRITERIA	PERSENTASE %
1	2	3
	Kualitas Kontruksi Drainase	20,89
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	10,97
	Prasarana dan Sarana Pengelolan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	35,71
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	17,89
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	51,92
	Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	17,89
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Proteksi Kebakaran	41,33
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	54,69
	Rata – rata Kekumuhan Sektoral	17,02
	BATAS AMBANG TINGKAT KEKUMUHAN	
	71 – 95 : Kumuh Berat	
	45 – 70 : Kumuh Sedang	
	19 – 44 : Kumuh Ringan	
	< 19 Dinyatakan Tidak Kumuh	

Sumber: DINRUMKIM Kab. Purbalingga, 2018

Hasil analisa tabel tersebut, permasalahan utama permukiman kumuh di Kawasan Kumuh Perkotaan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Bangunan tidak teratur di sempadan sungai baik tidak sesuai dengan aturan kawasan perlindungan setempat sempadan sungai maupun bangunan tidak menghadap ke sungai
2. Tidak terpeliharanya saluran drainase sehingga kotor dan berbau

3. Tidak ada instalasi pengolahan limbah rumah tangga atau langsung dibuang ke saluran drainase maupun ke sungai
4. Masih banyak yang tidak memiliki *septictank* terutama permukiman di dekat sungai sehingga langsung dibuang ke sungai
5. Sistem pengelolaan persampahan yang masih belum memadai sebagian besar tidak terangkut ke TPS minimal 2 kali dalam seminggu, sebagian lainnya dibuang ke halaman, kebun dan sempadan sungai
6. Tidak tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menangani kawasan kumuh antara lain melalui kegiatan "KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)" yang telah dilaksanakan oleh masing – masing kelurahan yang terdata kumuh dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.65 Data Hasil Inventarisasi Investasi Kegiatan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Lingkungan 2016-2018 Permukiman Kumuh Kawasan Kandangampang

Jenis Infrastruktur	Konstruksi	Lebar (m)	Panjang (m)	(Unit)
RTLH	Gedung			10
DRAINASE	U 30		906,2	
JALAN	PAVING		2,000.60	
SANTASI	JAMBAN			11
Jalan Paving Blok			455.40	
Drainase Lingkungan			440.00	

Sumber: DINRUMKIM Kab. Purbalingga, 2018

Tabel 3.66 Data Hasil Inventarisasi Investasi Kegiatan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Lingkungan 2016-2018 Permukiman Kumuh Kawasan Kembaran Kulon

Jenis Infrastruktur	Konstruksi	Lebar (m)	Panjang (m)	(Unit)
PENYEDIAAN AIR BERSIH	PAM			40
JAMBAN SEHAT	BETON			35
JALAN	BETON	1.50	683	
DRAINASE	BETON	0.30	930	
REHAB RUMAH ALADIN	BATA			2
Jalan Beton			135	
Pemasangan Jaringan PDAM				58
Jamban				28

Sumber: DINRUMKIM Kab. Purbalingga, 2018

Tabel 3.67 Data Hasil Inventarisasi Investasi Kegiatan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Lingkungan 2016-2018 Permukiman Kumuh Kawasan Purbalingga Wetan

Jenis Infrastruktur	Konstruksi	Lebar (m)	Panjang (m)	Unit
GEROBAK SAMPAH	BESI			1
BAK SAMPAH 3R	FIBER			20
DRAINASE	BETON	0.3	50.00	
JALAN	PAVING	1.5	200.00	
GEROBAK SAMPAH	BESI			1
Jalan Beton			394.00	
Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)				60
Sambungan Rumah				8
Drainase Lingkungan			10.00	

Sumber: DINRUMKIM Kab. Purbalingga, 2018

Tabel 3.68 Data Hasil Inventarisasi Investasi Kegiatan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Lingkungan 2016-2018 Permukiman Kumuh Kawasan Purbalingga Kidul

Jenis Infrastruktur	Konstruksi	Lebar (m)	Panjang (m)	(Unit)
Pembangunan Rumah	Gedung			2.00
Sanitasi	Jamban			25.00
Persampahan	Bak Sampah			75.00
Pembangunan Jalan	Beton		247.00	
Pembangunan Drainase	Beton U		260.00	
Jalan Beton	Beton	1.50	73.00	40.00
Drainase	Beton		300.00	
Apar				10.00

Sumber: DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, 2018

Tabel 3.69 Data Hasil Inventarisasi Investasi Kegiatan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Lingkungan 2016-2018 Permukiman Kumuh Kawasan Purbalingga Lor

Jenis Infrastruktur	Konstruksi	Lebar (m)	Panjang (m)	(Unit)
JALAN BETON	BETON	1.50	65.00	20.00
REHAB RUMAH ALADIN	BATU BATA			1.00
DRAINASE	BETON	0.30	111.00	
JALAN BETON	BETON	1.50	127.00	22.00
DRAINASE	BETON	0.30	110.00	

Sumber: DINRUMKIM Kab. Purbalingga, 2018

Selanjutnya berdasarkan analisa data KOTAKU 2017, selain 6 kelurahan yang ditetapkan menjadi kawasan kumuh, terdata 39 desa/kelurahan di 3 Kecamatan yaitu Purbalingga, Padamara dan Kalimanah yang berpotensi kumuh sebagai berikut :



Tabel 3.70 Desa/ Kelurahan Potensi Kumuh

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	POTENSI KUMUH
1.	Bancar	Purbalingga	Tidak Kumuh
2.	Bojong	Purbalingga	Kumuh Ringan
3.	Wirasana	Purbalingga	Tidak Kumuh
4.	Jatisaba	Purbalingga	Kumuh Ringan
5.	Kedungmenjangan	Purbalingga	Kumuh Ringan
6.	Kembaran Kulon	Purbalingga	Kumuh Ringan
7.	Penambongan	Purbalingga	Kumuh Ringan
8.	Toyareja	Purbalingga	Kumuh Ringan
9.	Bojanegara	Padamara	Kumuh Ringan
10.	Dawuhan	Padamara	Kumuh Ringan
11.	Gemuruh	Padamara	Kumuh Ringan
12.	Kalitinggar Kidul	Padamara	Kumuh Ringan
13.	Kalitinggar	Padamara	Kumuh Ringan
14.	Karanggambas	Padamara	Kumuh Ringan
15.	Karangjambe	Padamara	Kumuh Ringan
16.	Karangpule	Padamara	Tidak Kumuh
17.	Karangsantul	Padamara	Kumuh Ringan
18.	Padamara	Padamara	Kumuh Ringan
19.	Prigi	Padamara	Kumuh Ringan
20.	Purbayasa	Padamara	Kumuh Ringan
21.	Sokawera	Padamara	Kumuh Ringan
22.	Babakan	Kalimanah	Kumuh Ringan
23.	Blater	Kalimanah	Kumuh Ringan
24.	Grecol	Kalimanah	Kumuh Ringan
25.	Jompo	Kalimanah	Kumuh Ringan
26.	Kalikabong	Kalimanah	Tidak Kumuh
27.	Kalimanah Kulon	Kalimanah	Kumuh Ringan
28.	Kalimanah Wetan	Kalimanah	Kumuh Ringan
29.	Karangmanyar	Kalimanah	Tidak Kumuh



NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	POTENSI KUMUH
30.	Karangpetir	Kalimanah	Kumuh Ringan
31.	Karangsari	Kalimanah	Kumuh Ringan
32.	Kedungwuluh	Kalimanah	Kumuh Ringan
33.	Klapasawit	Kalimanah	Kumuh Ringan
34.	Manduraga	Kalimanah	Kumuh Ringan
35.	Mewek	Kalimanah	Kumuh Ringan
36.	Mipiran	Kalimanah	Kumuh Ringan
37.	Rabak	Kalimanah	Kumuh Ringan
38.	Selabaya	Kalimanah	Kumuh Ringan
39.	Sidakangen	Kalimanah	Tidak Kumuh

Sumber: DINRUMKIM Kab. Purbalingga, 2018

Kendala dan hambatan dalam penyelesaian penanganan kawasan kumuh :

1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap aspek dan kriteria yang dapat menumbuhkan potensi kumuh seperti aspek pengelolaan air limbah, persampahan.
2. Masih belum terpadunya rencana penanganan kawasan kumuh baik Pemerintah, Masyarakatupun pihak terkait lainnya.

Adapun solusi yang harus ditempuh sebagai upaya pencegahan timbulnya kawasan kumuh adalah :

1. Meningkatkan keterpaduan antara pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya terutama dalam kebijakan, program, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;
2. Sinkronisasi dan integrasi rencana penataan lingkungan permukiman dalam RPJMDes, Renja Kelurahan/Renstra Kecamatan terutama di Desa/Kelurahan yang berpotensi kumuh dengan Renstra OPD terkait dan RPJMD.

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman adalah :

1. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
2. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

3. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Kebakaran

SASARAN 15 :

MENINGKATNYA KUALITAS DESA

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya kualitas desa* mendapatkan nilai capaiannya sebesar 97,92% dengan kategori Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.71 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Capaian %	Target Akhir RPJMD
Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,6394	-	-	0,6681	0,6542	97,92	0,7089

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur dan mengetahui status kemajuan dan kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Selanjutnya Klasifikasi Status Desa dari hasil perhitungan IDM dimaksud terdiri dari :

- a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.

- b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah *Desa* yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ($<$) dari 0,4907.

Berdasarkan hasil pengukuran IDM Kabupaten Purbalingga, diperoleh Status Desa pada tahun 2015 dan 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.72 Data Indeks Desa Membangun Kabupaten Purbalingga

Tahun	Jumlah Desa	IKS	IKE	IKL	IDM
2015	42	0,6817	0,5992	0,6375	0,6394
2018	224	0,7391	0,5940	0,6386	0,6542

Sumber: Dinpermasdes Kb. Purbalingga, 2018

Tabel 3.73 Status Perkembangan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2018

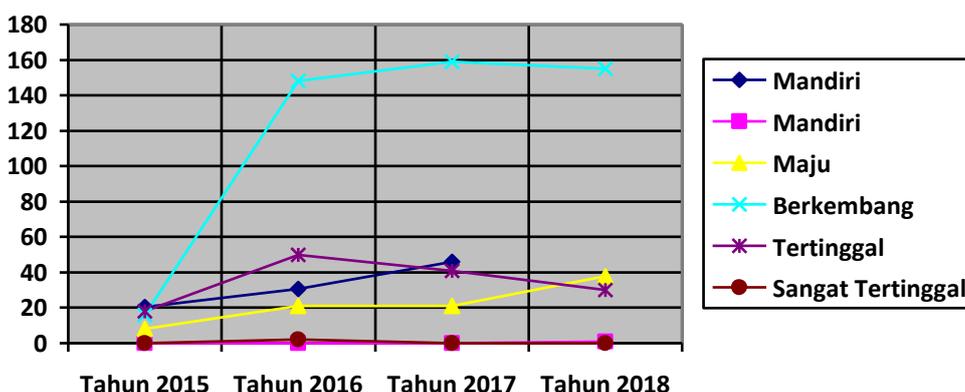
NO	STATUS	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018
1	Mandiri	0	0	0	1
2	Maju	8	21	21	38
3	Berkembang	16	148	159	155
4	Tertinggal	18	50	41	30
5	Sangat Tertinggal	0	2	0	0
	JUMLAH	42	221	221	224

Sumber : Kemendes PDT dan Kemenkeu

Dari tabel tersebut dapat di jelaskan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 data diperoleh dari dua sumber, yaitu tahun 2015 dan 2018 berasal dari hasil pengukuran IDM yang dirilis oleh Kementerian Desa, sedangkan tahun 2016 dan 2017 diperoleh data dari Kementerian Keuangan yang dijadikan dasar perhitungan Dana Desa.

Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan status desa di kabupaten Purbalingga terlihat peningkatan kualitas desa yang cukup signifikan, yang dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 3.16 Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2015 - 2018



Selanjutnya, berdasarkan data tahun 2018, di wilayah Kabupaten Purbalingga masih terdapat 30 (tiga puluh) desa tertinggal yang tersebar pada beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut ;

Tabel 3.74 Desa Tertinggal Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

NO	KECAMATAN	DESA
1.	Kemangkon	Senon
2.	Kemangkon	Kalialang
3.	Kemangkon	Majasem
4.	Bukateja	Cipawon
5.	Bukateja	Karangnangka



NO	KECAMATAN	DESA
6.	Kejobong	Krenceng
7.	Kejobong	Pandansari
8.	Kejobong	Timbang
9.	Kejobong	Nangkod
10.	Kejobong	Pangempon
11.	Kaligondang	Pagerandong
12.	Kutasari	Limbangan
13.	Kutasari	Cendana
14.	Kutasari	Karangjengkol
15.	Mrebet	Tangkisan
16.	Bobotsari	Banjarsari
17.	Bobotsari	Gunungkarang
18.	Bobotsari	Palumbungan Wetan
19.	Karanganyar	Buara
20.	Karanganyar	Lumpang
21.	Karanganyar	Jambudesa
22.	Karanganyar	Maribaya
23.	Karanganyar	Kalijaran
24.	Karanganyar	Kaliori
25.	Karangmoncol	Sirau
26.	Rembang	Gunungwuled
27.	Pengadegan	Panunggalan
28.	Pengadegan	Tumanggal
29.	Karangjambu	Danasari
30.	Karangjambu	Jingkang

Sumber: Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga

Komponen IDM Kabupaten Purbalingga yang dinilai masih rendah adalah Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang berada pada skor "0,5940", sehingga perlu adanya langkah – langkah yang strategis untuk mendorong bertambahnya nilai IKE melalui upaya peningkatan pemenuhan indikator Dimensi Ekonomi yang meliputi :



- a. Meningkatkan keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.
- b. Menyediakan pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen);
 - 2) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan
 - 3) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
- c. Menyediakan akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik.
- d. Memudahkan akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
 - 2) Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
 - 3) Akses penduduk ke kredit.
- e. Mengembangkan Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi); dan
- f. Meningkatkan keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum);
 - 2) Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu); dan
 - 3) Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah).

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka meningkatkan kualitas desa yaitu sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 93.058.519.000,-, sedangkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan



dan Belanja Daerah Kabupaten sebesar Rp. 199.934.262.000,- yang dialokasikan kepada 224 desa di Kabupaten Purbalingga.

- b. Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga maupun dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui alokasi bantuan Gubernur Jawa Tengah (Bantuan Gubernur).

Pada tahun 2018, fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus ditujukan antara lain untuk peningkatan sarana dan prasarana perdesaan pada 31 desa, rintisan Desa Berdikari sebanyak 2 desa, serta biaya operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bantuan Ketahanan Masyarakat Desa.

- c. Fasilitasi Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Gotong Royong dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Gotong Royong dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan rangkaian kegiatan yang menonjolkan sisi kegotongroyongan masyarakat desa/ kelurahan untuk meningkatkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan BBGRM dan GEBRAK Gotong Royong Tahun 2018 dilaksanakan di 16 (enam belas) lokasi desa di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi Desa Karangbawang, Serayu Karanganyar, Serang, Ponjen, Nangkasawit, Cendana, Tumanggal, Limbasari, Siwarak, Karangaren, Dagan, Pekalongan, Candiwulan, Tegalpingen, Mergasana dan Kalialang.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa gerakan gotong royong masyarakat untuk pembangunan sarana prasarana fisik, PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk), penanaman bibit pohon untuk penghijauan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan pemberian bingkisan untuk masyarakat kurang mampu dari berbagai pihak dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan.

- d. Bupati Tilik Desa

Bupati Tilik Desa merupakan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di desa yang bertujuan meninjau sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Pada tahun 2018 Bupati Tilik Desa dilaksanakan di 6 (enam) desa yaitu Desa Nangkod, Pekalongan, Candiwulan, Tegalpingen, Mergasana dan Kalialang.



e. Fasilitasi BUMDes

Kabupaten Purbalingga memiliki 172 BUMDes yang terdata, namun hanya 50 BUMDes yang dinilai aktif. Selanjutnya dalam rangka pengembangan BUMDes, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyiapkan 8 tahap rencana aksi yaitu :

Tahap 1 yaitu tahap persiapan meliputi penyiapan peraturan hukum tentang BUMDes serta menyusun petunjuk pelaksanaan operasional BUMDes melalui Peraturan Bupati.

Tahap 2 yaitu identifikasi potensi yang diperlukan dalam pembentukan unit usaha BUMDes.

Tahap 3 yakni pembentukan BUMDes dan operasionalisasi di semua tingkatan sebagai proses penguatan kelembagaan.

Tahap 4 yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar berjiwa *entrepreneur*.

Tahap 5 sampai dengan 8 yakni, menyiapkan akses permodalan antar lain pengalokasian dalam Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) bekerjasama dengan BUMD, perbankan atau yang lain. Membangun diversifikasi usaha dan jejaring usaha serta penguatan. Kemudian, monitoring dan evaluasi dan terakhir adalah kemandirian.

Pada tahun 2018 Kabupaten Purbalingga telah berada pada tahap ke-6, dengan mengoptimalkan peran pemerintah desa agar bekerjasama dengan penuh inovasi dan kreatif membangun budaya kerja dan perusahaan melalui BUMDes.

f. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pembangunan kawasan perdesaan memberikan ruang bagi desa untuk bekerjasama dalam membentuk pertumbuhan ekonomi baru. Melalui pembangunan kawasan perdesaan diharapkan desa – desa di wilayah Kabupaten Purbalingga berpeluang menjadi kawasan ekonomi baru.

Kawasan perdesaan wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi :

- Kawasan perdesaan Kecamatan Karangreja yang meliputi 7 desa dengan potensi yang dikembangkan adalah agrobisnis dan pariwisata.
- Kawasan Kagem Bobotani Kecamatan Bojongsari yang meliputi 4 desa dengan potensi pengembangan agrobisnis, usaha tani dan wisata.



- Kawasan Perdesaan Kecamatan Karanganyar yang meliputi 13 desa, dalam hal ini mengkhususkan bergerak dalam bidang pemenuhan kebutuhan air bersih/air minum.
 - Kawasan Perdesaan Kecamatan Kutasari yang meliputi 14 desa bergerak dalam bidang Agribisnis, wisata dan pendidikan.
- g. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang ditujukan bagi desa – desa yang berpotensi untuk saling bersinergi dalam rangka memberikan manfaat bersama bagi desa desa yang berdekatan dalam satu kawasan. Pada tahun 2018, dilaksanakan fasilitasi di 4 (empat) kecamatan yaitu :
- Kecamatan Pengadegan yaitu desa Pengadegan dan desa Karangjoho.
 - Kecamatan Kejobong yaitu Langgar dan Kedarpan.
 - Kecamatan Kutasari yaitu desa Karangcegak dan Desa Candinata.
 - Kecamatan Karangreja yaitu desa Kutabawa dan Serang.

h. Pengembangan potensi desa wisata

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, maka perlu dikembangkan potensi desa seperti halnya potensi wisata alam atau budaya. Pemerintah Kabupaten Purbalingga berupaya untuk membangun desa wisata rintisan yang diawali 10 (sepuluh) desa yaitu : Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari, Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang, Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja, Desa Serayu Larangan Kecamatan Mrebet, Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari, Desa Wanogara Wetan dan Gunung Wuled Kecamatan Rembang, serta Desa Sirau dan Pepedan di Kecamatan Karangmoncol. Beberapa desa juga mengembangkan wisata di wilayahnya secara mandiri, yaitu Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari, Desa Gunung Wuled Kecamatan Rembang dan Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut adalah :

1. Masih belum meratanya kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Desa, sehingga kurang optimal dalam mendukung upaya – upaya peningkatan kualitas desa ;
2. Belum berkembangnya Sistem Informasi Desa (SID) yang diharapkan dapat mempermudah dalam penyampaian informasi maupun melihat data kemajuan desa



3. Peran serta maupun swadaya masyarakat yang belum optimal dalam rangka mendukung program-program pemberdayaan pembangunan di wilayah desanya
4. Belum tersinerginya pengembangan wilayah perdesaan dengan Perangkat Daerah terkait khususnya yang menangani infrastruktur, pengembangan ekonomi, pengembangan pertanian, pemasaran produk dan lain-lain ;
5. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Desa untuk mengembangkan inovasi baru dalam rangka mengelola potensi desa.

Adapun solusi guna mengatasi kendala/permasalahan tersebut di atas perlu diupayakan perbaikan – perbaikan melalui :

1. Peningkatkan kapasitas SDM Aparatur Desa melalui Bimtek/Diklat maupun sosialisasi terkait administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pemberdayaan masyarakat ;
2. Penerapan SID oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memberikan contoh yang baik (best practise) penerapan SID, serta melaksanakan pelatihan IT kepada aparatur pemerintahan desa;
3. Sosialisasi di tingkat desa maupun kecamatan dengan melibatkan tokoh masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka mendorong/meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat terhadap program-program pemberdayaan yang memerlukan dukungan warga masyarakat demi terlaksananya pembangunan desa.
4. Peningkatan fungsi Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terintegrasi dari tingkat desa sampai dengan kabupaten.
5. Pemerintah Kabupaten melalui OPD terkait turut serta mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan pemetaan potensi desa, mendesign inovasi pengembangan desa, meningkatkan kualitas dan kemampuan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan umum, pelatihan tenaga kerja, penyuluhan dan kegiatan stimulasi, maupun mendorong terbentuknya manajemen pengelolaan potensi desa yang baik misalnya melalui pemberdayaan BUMDes, dll.
6. Peningkatan peran Pemerintah Kecamatan untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Desa adalah :

- a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat
- b. Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat
- c. Program Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Wisata
- d. Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
- e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan
- f. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan
- g. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

SASARAN 16 :

KETERSEDIAANNYA AIR PERMUKAAN UNTUK PERTANIAN PADA JARINGAN IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 / 1998 tentang irigasi, bahwa Irigasi ialah usaha untuk penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Irigasi juga termasuk dalam pengertian drainase yaitu : mengatur air berlebih dari media tumbuh tanaman atau petak agar tidak mengganggu pertumbuhan maupun produksi tanaman. Berdasarkan cara pengaturan, pengukuran aliran air dan lengkapnya fasilitas yang dimiliki, sistem jaringan dapat dipilahkan menjadi tiga macam, yaitu ;

- a. Sistem Irigasi Teknis

Salah satu prinsip sistem irigasi teknis adalah pemisahan sistem jaringan pembawa dan sistem jaringan pemutus. Sistem jaringan irigasi teknis ini disebut juga manajemen gabungan antara pemerintah dan petani, karena pemerintah bertanggung jawab didalam sistem jaringan utama dimulai dari bangunan pengambilan sampai dengan saluran tersier sepanjang 50 m di hilir bangunan

sadap tersier, sedangkan petani bertanggung jawab atas sistem jaringan di dalam petak tersier.

b. Sistem Irigasi Semi Teknis

Sistem irigasi semi teknis ini sudah lebih maju karena fasilitasnya sudah lengkap serta bangunannya juga permanen akan tetapi sistem jaringan pembagian airnya masih serupa dengan sistem irigasi sederhana.

c. Sistem Jaringan Irigasi Sederhana

Digolongkan sebagai sistem jaringan irigasi sederhana karena, fasilitas (bangunan) yang ada tidak permanen dan fungsinya masih sangat sederhana.

Menurut kewenangan pengelolaan irigasi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mempunyai kewenangan mengelola untuk luas areal irigasi kurang dari 1.000 Ha dan tugas pembantuan dari provinsi atau pusat

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Ketersediaannya Air Permukaan Untuk Pertanian pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder* mendapatkan nilai capaiannya sebesar 163,61% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.75 Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaannya Air Permukaan Untuk Pertanian pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Capaian %	Target akhir
Cakupan air irigasi	Persen	68,33	68,33	70,00	43,8	71,66	163,61	48.2

Cakupan air irigasi yaitu membandingkan antara debit *netto* bendung dibagi dengan luas areal daerah irigasi dikali dengan seratus akan mendapatkan presentase dari cakupan air irigasi. Cakupan air irigasi pada tahun 2015 adalah 13.091,34 Ha atau 68,33 persen, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 13.091,34 Ha atau 68,33 persen sama dengan cakupan air irigasi pada tahun 2015. Pada tahun 2017 cakupan air irigasi dengan realisasi sebesar 13.411,30 Ha atau 70,00%. Tahun 2018 cakupan air irigasi yang ditarget yaitu sebesar 8.391,64 Ha atau 43,8 persen sedangkan

realisasinya mencapai 13.729,34 atau 71,66 persen. Capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 163,61 persen hal ini menunjukkan bahwa capaiannya sangat tinggi

Tabel 3.76 Cakupan Air Irigasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Debit Air Irigasi Liter/Detik	Persentase	Ket
1	Purbalingga	763	602,01	78,90	
2	Kalimanah	1.164	946,33	81,30	
3	Padamara	2.489	2.125,61	85,40	
4	Kutasari	1.501	1.370,41	91,30	
5	Bojongsari	1.220	1.128,50	92,50	
6	Mrebet	1.922	1.583,73	82,40	
7	Bobotsari	1.248	990,91	79,40	
8	Karangreja	637	415,32	65,20	
9	Karangjambu	986	549,20	55,70	
10	Karanganyar	1.920	1.271,04	66,20	
11	Kertanegara	1.426	932,60	65,40	
12	Karangmoncol	1.089	737,25	67,70	
13	Rembang	1.884	923,16	62,80	
14	Pengadegan	44	19,01	43,20	
15	Kaligondang	811	509,31	49,00	
16	Kemangkon	55	44,11	80,20	
JUMLAH		19.159	14.148,5	71,66	

Sumber: DPUPR Kabupaten Purbalingga, 2018

Manajemen irigasi adalah suatu bentuk pengelolaan eksploitasi dan distribusi air irigasi terutama di daerah yang kering atau yang memiliki periode musim kelangkaan air dengan tujuan meningkatkan produksi tanaman pertanian. Air irigasi di Kabupaten Purbalingga paling tinggi persentasenya yaitu pada daerah Kecamatan Bojongsari mencapai 92,50 persen karena di daerah tersebut mempunyai banyak sumber air yang menjadi andalan untuk mengairi sawah. Sedangkan pada urutan ke dua yaitu Kecamatan Kutasari dengan persentase cakupan air irigasi sebesar 91,30 persen, untuk Kecamatan Padamara termasuk kecamatan dengan

presentase cakupan air irigasi mencapai 85,40 persen karena daerah tersebut juga mempunyai mata air untuk mengalir sawah dengan sistem irigasi baik irigasi teknis maupun irigasi semi teknis. Daerah yang tidak ada cakupan air irigasi yaitu Kecamatan Kejobong karena pada daerah tersebut tidak ada sumber mata air yang bisa digunakan untuk mengairi, itulah sebabnya di Kecamatan Kejobong tidak ada sawah atau kebanyakan daerahnya kering. Kecamatan Bukateja tidak ada Daerah Irigasi karena masuk ke Daerah Irigasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.77 Kondisi Bangunan Irigasi Kewenangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Tingkat Jaringan			Kondisi Saluran		
			Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
1	Purbalingga	763	703	60	0	65	20	15
2	Kalimanah	1.164	626	511	27	56	19	25
3	Padamara	2.489	1.086	789	614	47	23	30
4	Kutasari	1.501	1.106	16	379	47	22	31
5	Bojongsari	1.220	290	705	225	46	23	31
6	Mrebet	1.922	692	315	915	43	21	36
7	Bobotsari	1.248	718	252	278	44	18	38
8	Karangreja	637	0	116	521	43	21	36
9	Karangjambu	986	0	0	986	40	22	39
10	Karanganyar	1.920	437	535	948	41	21	37
11	Kertanegara	1.426	0	233	1.193	38	20	42
12	Karangmoncol	1.089	0	541	548	43	19	38
13	Rembang	1.884	0	562	1.322	41	20	39
14	Pengadegan	44	0	0	44	60	20	20
15	Kaligondang	811	430	264	117	48	21	31
16	Kemangkon	55	55	0	0	60	25	15
Jumlah/Total		19.159	6.143	4.899	8.117	11.922,3	5.598,6	9.484,2
Rata-rata						46,8	22,0	37,2

Sumber: DPU-PR Kabupaten Purbalingga, 2018



Pada tahun 2018 bangunan pengairan ditargetkan untuk bisa menjadi baik yaitu sebesar 43,8 persen, akan tetapi setelah melaksanakan semua kegiatan yang ada di bidang sumber daya air pencapaian target lebih dari yang telah ditetapkan yaitu sebesar 46,8 persen. Persentase kenaikan realisasinya lebih tinggi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 106,85 persen. Kondisi bangunan irigasi yang paling baik yaitu Kecamatan Purbalingga sebesar 65 persen, Kecamatan Pengadegan dan Kecamatan Kemangkon mempunyai bangunan irigasi yang kondisinya baik sebesar 60 persen, sedangkan Kecamatan Kalimanah mempunyai kondisi bangunan irigasi yang baik sebesar 56 persen sebagai urutan ketiga. Kecamatan Karangjambu sebagai kecamatan yang kondisi bangunan irigasinya paling sedikit dalam kondisi baik hanya sebesar 40 persen selebihnya sebesar 60 persen pada kondisi sedang dan rusak.

Sebagai upaya memelihara saluran irigasi di Kabupaten Purbalingga, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin Irigasi
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Partisipatif (PPSIP),
3. Rehabilitasi Bendung Karangmiri Desa Kalijaran,
4. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Condong,
5. Fasilitasi Komisi Irigasi,
6. Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi Kedungjeruk Kecamatan Kemangkon
Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi Brunyah Kecamatan Padamara
7. Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi Bataputih Kecamatan Mrebet,
8. Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi Ponjen Kecamatan Karanganyar,
9. Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi Jambean II Kecamatan Karangreja,
10. Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi Cibaya Kecamatan Karangreja,
11. Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi Bedagas Kecamatan Pengadegan,
12. Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi Curug I Kecamatan Padamara,
13. Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi Candinata Kecamatan Kutasari,
14. Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi Irigasi Andong Kecamatan Mrebet
15. Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi Jaha II Kecamatan Kertanegara.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyediakan air irigasi :

Sebagai Kabupaten yang sebagian besar penduduknya bekerja dalam sektor pertanian, maka pembangunan irigasi sangatlah penting. Ada banyak sekali permasalahan yang timbul dalam usaha pembangunan fasilitas irigasi ini baik faktor alam maupun manusianya. Berikut adalah beberapa permasalahan irigasi yang ada di Kabupaten Purbalingga.

1. Fluktuasi ketersediaan jumlah air.

Secara umum kebutuhan air akan meningkat drastis pada musim kemarau padahal jumlah air yang tersedia pada musim kemarau bisa dibilang sedikit. Pada musim penghujan terjadi hal yang sebaliknya, jumlah air sangat melimpah hingga harus dibuang melalui saluran drainase. Tantangannya adalah bagaimana cara menyimpan jumlah air yang berlebihan saat musim penghujan untuk di distribusikan pada musim kemarau.

2. Peran Petani Pemakai Air

Faktor yang paling utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan irigasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Perilaku petani (selaku SDM) dalam memandang air yang masih bersifat sosial (*bebas*), Perilaku petani dalam mengelola sarana dan prasarana irigasi masih minim (*rasa memiliki sangatlah kurang*), SDM petani kita masih rendah, sebagian besar petani di Kabupaten Purbalingga kurang bekerjasama dalam pengelolaan irigasi. Salah satu contoh kurang peduli warga adalah dalam menjaga kebersihan saluran irigasi, kurang pedulinya warga terhadap keberadaan sampah yang berada pada saluran irigasi dapat menyebabkan jaringan irigasi tidak bekerja dengan lancar bahkan bisa mendatangkan bencana banjir.

3. Pemeliharaan Berkala

Pemeliharaan berkala irigasi kurang mendapat perhatian yang serius tercermin dari anggaran yang tersedia masih sedikit dibandingkan dengan luas areal persawahan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam memelihara ketersediaan air irigasi yaitu :

1. Fluktuasi ketersediaan jumlah air ini menjadi persoalan tersendiri karena air pada musim penghujan banyak sedangkan pada musim kemarau sedikit, guna mengatasinya dibutuhkan anggaran yang besar untuk membangun embung yang



banyak sehingga bisa menampung air pada musim penghujan dan mengalihkan pada musim kemarau, langkah yang dilakukan dengan bekerja sama dengan dinas pertanian untuk menggalakkan lagi Program Reboisasi agar air hujan dapat ditampung oleh akar-akar dari pohon-pohon besar sehingga pada musim kemarau tidak terjadi kekeringan

2. Faktor yang paling utama untuk pemeliharaan irigasi adalah Para Petani Pemakai Air (P3A). Langkah yang dilakukan yaitu mengaktifkan kembali peran P3A yaitu dengan cara swadaya memelihara saluran yang langsung ke sawah mereka secara mandiri. Mereka juga harus ikut bertanggungjawab, jika ada kerusan ringan maka harus segera diperbaiki secara mandiri. Sedangkan jika terjadi kerusan berat diharapkan segera melapor kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga supaya bisa segera ditangani sehingga kerusakan yang terjadi tidak meluas.
3. Dalam pemeliharaan irigasi hal hal yang telah dilakukan untuk mempertahankan dan memperpanjang umur bangunan irigasi di Kabupaten Purbalingga dengan cara antara lain :
 - Mengecat pintu air.
 - Menggali endapan lumpur.
 - Memperbaiki sayap dan tembok saluran.
 - Memperbaiki dan mengecat rumah bangunan bagi.
 - Meninggikan tanggul saluran.
 - Mengganti pintu air yang rusak.
 - Perbaiki akibat bencana alam secara permanen.

Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pencapaian cakupan air irigasi yaitu Dinas Pertanian karena pada Dinas tersebut mengelola bidang kehutanan yang secara tidak langsung menangani program reboisasi yaitu penanaman kembali hutan yang sudah gundul menjadi hijau kembali, maka secara tidak langsung hutan yang hijau akan dapat menahan air hujan di musim hujan dan pada akhirnya pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan.

Program yang mendukung pemenuhan cakupan air irigasi yaitu : Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan.

SASARAN 17 :***TERWUJUDNYA PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG***

Penyelenggaraan penataan ruang yaitu kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengawasan penataan ruang adalah salah satu upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya dalam mewujudkan Tertib tata ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Izin pemanfaatan ruang termasuk izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang* mendapatkan nilai capaiannya sebesar 89,88% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.78 *Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang*

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Capaian %	Target akhir
Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukan	Persen	47,79	63,5	43,6	84	75,50	89,88	89



Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan pada tahun 2015 dari target yang telah ditentukan mencapai angka sebesar 47,79 persen, sedangkan pada tahun 2016 dari target yang telah ditetapkan memperoleh angka capaian sebesar 63,5 persen. Capaian pada tahun 2015 dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 terjadi peningkatan capaian yaitu sebesar 15,71 persen. Tahun 2017 pemanfaatan ruang sesuai peruntukkan mencapai sebesar 43,6 persen jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 19,90 persen. Untuk tahun 2018 dari target yang telah ditentukan sebesar 84 persen sedangkan realisasi capaian kurang dari target yang telah ditentukan yaitu hanya sebesar 75,50 persen atau hanya realisasinya hanya 89,88 persen dapat dikatakan realisasi capaian kurang dari 100 persen. Capaian tahun 2018 sebesar 75,50 persen ini lebih tinggi bila dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 43,6 persen atau terjadi kenaikan capaian realisasi sebesar 173,17 persen.



Tabel 3.79 Permohonan Rekomendasi / Informasi Kesesuaian Tata Ruang Tahun 2018

No	Bulan	Permohon	Rekomendasi BKPRD		ITR WIUP (Tambang Galian C)	Informasi ITR		Jumlah
			Sesuai	Tidak Sesuai		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Januari	14	7	3	3	1	0	14
2	Februari	14	9	1	1	3	0	14
3	Maret	23	12	6	3	1	1	23
4	April	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	5	2	3	0	0	0	5
6	Juni	9	5	2	1	1	0	9
7	Juli	9	4	3	2	0	0	9
8	Agustus	12	8	3	0	1	0	12
9	September	11	6	2	3	0	0	11
10	Oktober	10	6	2	0	2	0	10
11	November	16	9	2	2	3	0	16
12	Desember	28	15	7	3	1	2	28
JUMLAH		151	83	34	18	13	3	151
JUMLAH YANG SESUAI								114
JUMLAH PEMOHON								151
PERSENTASE YANG SESUAI								75,50

Sumber: DPU-PR Kabupaten Purbalingga, 2018



Sesuai dengan permohonan rekomendasi atau kesesuaian selama setahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 ada sebanyak 151 pemohon. Urutan pertama pemohon yang paling banyak terjadi pada bulan Desember 2018 dengan jumlah sebanyak 28 dan yang sesuai hanya 19 pemohon atau sekitar 67,86 persen. Urutan kedua pemohon terbanyak pada bulan Maret 2018 sebanyak 23 pemohon tetapi yang sesuai hanya ada sekitar 16 pemohon atau sebanyak 69,57 persen, sedangkan pada urutan ketiga terbanyak pemohon rekomendasi atau informasi kesesuaian tata ruang pada bulan November 2018 sebanyak 16 pemohon dengan pemohon yang sesuai ada 14 atau sebanyak 87,50 persen. Bulan Februari terjadi pemohon terbanyak yang kesesuaiannya sangat tinggi mencapai 92,86 persen dari jumlah pemohon sebanyak 14 dan yang sesuai ada 13 pemohon.

Kendala yang dihadapi dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Purbalingga adalah.

1. Proses revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga memerlukan waktu yang cukup lama, karena kendala regulasi dan prosedur.
 - 1) Kendala Regulasi.
 - a) Peninjauan kembali dan review RTRW yang sudah dilakukan Bappeda Purbalingga pada tahun 2016 harus diulang, karena terbitnya Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali (PK) RTRW.
 - b) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah disusun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 harus disusun kembali sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
 - c) Sistematika penyusunan materi teknis dan Raperda RTRW harus disesuaikan dengan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.



2) Kendala Prosedur

Persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN terhadap revisi RTRW yang dilakukan hampir serempak se-Indonesia menyebabkan proses asistensi semakin lama.

2. Belum tersusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Bobotsari. Hal ini menyebabkan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Purbalingga belum dilaksanakan dengan baik.
3. Terbatasnya anggaran untuk sosialisasi kepada masyarakat.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Purbalingga adalah.

1. Melaksanakan revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga dengan melengkapi persyaratan administrasi pengajuan persetujuan substansi revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017, antara lain:
 - Konsultasi Publik 1 dan 2 (26 April dan 25 Juli 2017)
 - Padu serasi dengan Kabupaten yang berbatasan (16 Mei 2017)
 - Peninjauan Kembali (12 Juli 2017)
 - SK Bupati tentang Rekomendasi Revisi RTRW (15 Juli 2017)
 - Sudah mendapatkan Rekomendasi Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 1 Maret 2018
 - Sudah mendapatkan Rekomendasi Badan Informasi Geospasial pada tanggal 23 Mei 2018
2. Menyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai syarat menyusun dokumen RTRW
3. Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.
4. Selama belum tersusun Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Bobotsari, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kabupaten Purbalingga menggunakan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dalam memberikan pertimbangan teknis kesesuaian ruang.

5. Melakukan sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat melalui Kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) dan jasa konsultasi lainnya.

Program yang mendukung sasaran Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah

SASARAN 18 :

MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KONEKTIFITAS WILAYAH

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Pemerintahan dalam pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.



Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya aksesibilitas dan konektifitas wilayah* mendapatkan nilai capaiannya sebesar 109,18% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.80 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan konektifitas wilayah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Capaian %	Target akhir
Panjang jalan kondisi mantap	Persen	69,64	94,87	84,83	78,32	85,51	109,18	82,15

Pada tahun 2016, panjang jalan kabupaten sepanjang 784,233 km dan pada tahun 2017 ada penambahan jalan Kabupaten sebesar 103,854 km. Pada tahun 2017 sesuai dengan surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 621/22/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Purbalingga sepanjang 888,087 km.

Pada tahun 2015, jalan di Kabupaten Purbalingga yang dapat dikatakan kondisi baik atau mantap sepanjang 612.892,59 km atau 69,64%. Pada tahun 2016 jalan di Kabupaten Purbalingga dalam kondisi baik atau mantap meningkat menjadi sepanjang 834,938,54 atau 94,87%. Sedangkan pada tahun 2017 ada penurunan capaian panjang jalan dalam kondisi baik atau mantap menjadi sebesar 746.577,80 atau 84,83%. Dari panjang jalan kabupaten sepanjang 888,087 km yang ada di 18 Kecamatan, pada tahun 2018 jalan dalam kondisi baik atau mantap terealisasi sebesar 95,51% atau sepanjang 759,384 km dari target yang telah ditentukan sebesar 78,32% dan persentase realisasinya sebesar 109,18%.

Table 3.81 Panjang jalan di Kabupaten Purbalingga

No	Kecamatan	Panjang Jalan (km)	Jalan Kondisi Baik (Km)	Persentase
1	Purbalingga	64,562	56.726	85,58
2	Kalimanah	35,489	31.133	89,76
3	Padamara	33,742	28.867	83,03



No	Kecamatan	Panjang Jalan (km)	Jalan Kondisi Baik (Km)	Persentase
4	Kutasari	44,448	35.292	76,13
5	Bojongsari	44,999	34.995	77,18
6	Kaligondang	68,428	51.182	69,14
7	Bukateja	61,049	49.474	64,44
8	Kejobong	61,766	48.951	76,69
9	Kemangkon	59,927	53.879	88,29
10	Mrebet	64,336	60.972	92,81
11	Bobotsari	26,090	25.177	87,50
12	Karanganyar	37,097	31.825	86,74
13	Karangreja	44,015	38.315	90,05
14	Karangjambu	35,511	29.106	73,03
15	Kertanegara	20,793	20.793	100,00
16	Karangmoncol	70,894	64.894	91,02
17	Rembang	71,654	57.424	76,95
18	Pengadegan	43,287	37.792	86,75
	Jumlah	888,087	759,384	85,51

Sumber: DPU-PR Kabupaten Purbalingga, 2018

Panjang jalan yang masuk dalam kategori jalan kabupaten sepanjang 888,087 km. sedangkan panjang jalan dengan kondisi jalan baik sepanjang 759,384 kilometer. Kondisi jalan dalam keadaan baik di Kabupaten Purbalingga terdapat di 3 Kecamatan yang mempunyai kondisi jalan baik paling besar yaitu urutan pertama pada Kecamatan Kertanegara dengan panjang jalan 20,793 kilometer dengan kondisi baik sebesar 100,00 persen. Kecamatan dengan peringkat kedua dengan persentase kondisi jalan baik ada di Kecamatan Mrebet dari panjang jalan 64.336 kilometer terdapat jalan kondisi baik sepanjang 60,972 kilometer atau sebesar 92,81 persen. Peringkat ketiga kecamatan dengan kondisi jalan baik yaitu Kecamatan Karangmoncol dengan panjang jalan 70,894 kilometer terdapat jalan kondisi baik sepanjang 64,894 kilometer atau sebesar 91,02 persen.



Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga ada yang mempunyai lebar 5,5 meter. Pada tahun 2016 jalan yang lebarnya minimal 5,5 sepanjang 89,798 kilometer, bertambah 11,061 kilometer atau terealisasi sebesar 11,45 persen dari panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Panjang jalan yang mempunyai lebar minimal 5,5 meter pada tahun 2017 sepanjang 117,116 kilometer atau 13,19 persen. Pada tahun 2018, jalan yang mempunyai lebar minimal 5,5 meter sepanjang 180,426 kilometer atau 20,32 persen. Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan tahun 2017 meningkat 7,13 persen atau ada penambahan panjang jalan sepanjang 63,310 kilometer.

Tabel 3.83 Lajur Jalan Minimal 5,5 meter

Panjang Jalan Kabupaten (PJK) Purbalingga	Realisasi 2016		Realisasi 2017		Target Tahun 2018		Realisasi Tahun 2018	
	Panjang Jalan Minimal (PJM) 5,5 meter	Persen (PJM/ PJK Th 2016)	Panjang Jalan Minimal 5,5 meter	Persen (PJM/ PJK Th 2017)	Panjang Jalan Minimal 5,5 meter	Persen (PJM/ PJK Th 2018)	Panjang Jalan Minimal 5,5 meter	Persen (PJM/ PJK Th 2018)
888.087 km	89,798 km	11,45	117,116 km	13,19	141,561 km	15,94	180,426 km	20,32

Sumber: DP- PR Kabupaten Purbalingga, 2018

Tabel 3.84 Jaringan Jalan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Lebar Lebih Dari 5,5 Meter

NO	KECAMATAN	PANJANG JALAN	JALAN LEBAR LEBIH 5,5 M	PERSENTASE
1	Kecamatan Purbalingga	64.562	30.328	3,41
2	Kecamatan Kalimanah	35.489	16.597	1,87
3	Kecamatan Padamara	33.742	10.732	1,21
4	Kecamatan Kutasari	44.448	13.202	1,49
5	Kecamatan Bojongsari	44.999	3.896	0,44
6	Kecamatan Kaligondang	68.428	11.147	1,26
7	Kecamatan Bukateja	61.049	17.568	1,98
8	Kecamatan Kemangkon	61.766	13.220	1,49
9	Kecamatan Kejobong	59.927	4.833	0,54



NO	KECAMATAN	PANJANG JALAN	JALAN LEBAR LEBIH 5,5 M	PERSENTASE
10	Kecamatan Mrebet	64.336	12.761	1,44
11	Kecamatan Bobotsari	26.090	9.509	1,07
12	Kecamatan Karanganyar	37.097	-	-
13	Kecamatan Karangreja	44.015	12.680	1,43
14	Kecamatan Karangjambu	35.511	-	-
15	Kecamatan Kertanegara	20.793	-	-
16	Kecamatan Karangmoncol	70.894	16.205	1,82
17	Kecamatan Rembang	71.654	7.748	0,87
18	Kecamatan pengadegan	43.287	-	-
JUMLAH		888.087	180.426	20,32

Sumber: DP- PR Kabupaten Purbalingga, 2018

Pada tahun 2018 lebar jalan yang lebih dari 5,5 meter bertambah 7,13 persen dari 13,19 persen pada tahun 2017 menjadi 20,32 persen pada tahun 2018. Kecamatan Purbalingga yang paling banyak persentase lebar jalan lebih dari 5,5 meter yaitu sebanyak 3,41 persen pada tahun 2018 meningkat dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya sebesar 3,39 persen. Kecamatan Bukateja menjadi kecamatan yang mempunyai lebar jalan lebih dari 5,5 meter urutan kedua yaitu sebesar 1,98 persen pada tahun 2018 sedangkan pada tahun 2017 hanya sebesar 1,27 persen menempati urutan ke tiga setelah Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Kemangkon. Ada 4 kecamatan yang lebar jalannya tidak ada lebih dari 5,5 meter yaitu Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Kertanegara dan Kecamatan Pengadegan.

Jembatan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari jalan. Jembatan mempunyai fungsi meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang permukaannya lebih rendah. Pada tahun 2016 di Kabupaten Purbalingga mempunyai panjang jembatan dalam kondisi baik sebesar 96,03 persen, sedangkan pada tahun 2017 panjang jembatan dalam kondisi baik sebesar 95,58 persen, terjadi penurunan panjang jembatan dalam kondisi baik sebesar 0,45 persen. Pada tahun 2018 panjang jembatan dalam kondisi baik sebesar 96,23 persen.

Tabel 3.85 Panjang Jembatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
		Realisasi		Realisasi		Target		Realisasi	
		Satuan	%	Satuan	%	Satuan	%	Satuan	%
1	Panjang Jembatan Kabupaten	2.870,60		3.635,40		3.635,40		3.629,20	
2	Baik Sekali	2.756,50	96,03	3.474,60	95,58	3.427,28	94,00	3.492,40	96,23
3	Rusak	114,10	3,97	112,80	3,10	208,12	6,00	112,80	3,11
4	Rusak Berat	-	-	48,00	1,32	-	-	24,00	0,66
5	Runtuh	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: DP- PR Kabupaten Purbalingga, 2018

Kabupaten Purbalingga mempunyai jembatan sepanjang 3.629,20 meter. Pada tahun 2018 panjang jembatan dalam kondisi baik ada 3.492,40 atau sebesar 96,23 persen, jembatan dalam kondisi rusak sepanjang 112,80 meter dengan persentase sebesar 3,11 persen, sedangkan jembatan dalam kondisi rusak berat sepanjang 24 meter atau sebesar 0,66 persen.

Kendala dalam pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten antara lain :

1. Struktur tanah

Struktur tanah yang tidak stabil mengakibatkan tanah mudah bergerak, di Kabupaten Purbalingga terdapat di Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja dan Karangjambu. Tanah yang mudah bergerak terutama pada musim penghujan berakibat pada badan jalan yang mudah retak dan longsor.

2. Volume dan beban kendaraan

Faktor penyebab kerusakan yang paling sering dianggap menjadi masalah adalah arus lalu lintas yaitu volume dan beban kendaraan yang setiap hari melintas pada ruas jalan tersebut.

3. Peralatan pendukung pemeliharaan jalan

Kekurangan peralatan untuk pemeliharaan jalan terutama pada pemeliharaan rutin jalan. Peralatan yang kurang, antara lain mesin gilas *mobile* yang dapat



digunakan pada semua medan jalan, terutama pada jalan yang memiliki kemiringan (curam).

4. Drainase jalan

Sebagian besar jalan di Kabupaten Purbalingga dalam kondisi baik, akan tetapi jalan tersebut belum didukung oleh drainase yang baik sehingga pada musim penghujan banyak jalan yang tergenang air bahkan mengalami banjir.

5. Keluhan masyarakat terhadap proyek pelebaran jalan yang mengganggu aktifitas masyarakat untuk sementara waktu.

6. Adanya keberatan dari masyarakat yang terdampak secara material dari proyek pelebaran jalan dan ada juga warga masyarakat yang mencari untung dari kompensasi proyek tersebut.

7. Jembatan dengan kategori rusak berat tidak bisa ditangani dengan kegiatan pemeliharaan rutin jembatan namun harus ditangani melalui kegiatan lainnya.

Langkah-langkah yang dilakukan pemelihara jalan dan jembatan di kabupaten Purbalingga antara lain :

1. Volume kendaraan setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang signifikan cara untuk mengatasinya antara lain yaitu dengan membangun jembatan baru dan peningkatan jalan sehingga ruas yang ada akan berkurang bebannya karena ada pengalihan arus lalu lintas, seperti jalur dari Purbalingga ke Kecamatan Karangmoncol yang sebelumnya melewati Kecamatan Rembang saat ini dialihkan melalui jembatan Tegalpingen Kecamatan Pengadegan ke Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol sehingga beralih ke jalur yang lebih pendek atau dekat.
2. Untuk peralatan pendukung pemeliharaan rutin jalan pada tahun 2018 telah mendapat tambahan peralatan, antara lain *baby roller*, *elektric jack hammer*, sepeda motor, mesin bor, mesin gerinda dan mesin las listrik.
3. Dilaksanakan pembangunan dan pemeliharaan drainase untuk memperlancar air terutama air hujan agar jalan yang ada lebih tahan lama dan tidak mudah rusak.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk segera melaporkan kerusakan jalan dan jembatan melalui media sosial seperti facebook, twitter dan website MATUR BUPATI agar secepatnya dapat ditangani.
5. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelebaran jalan, memasang rambu-rambu dan tulisan peringatan bahwa ada perbaikan jalan.



6. Melakukan sosialisasi pada masyarakat terdampak secara material dari proyek pelebaran jalan agar berperan serta dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, khususnya dalam hal ganti rugi agar tidak mencari keuntungan pribadi.
7. Melakukan survei lapangan dan mengusulkan anggaran sesuai dengan mekanisme penganggaran sehingga jembatan dapat segera diperbaiki dan tidak terjadi kerusakan yang lebih parah.

Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektifitas wilayah adalah :

1. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

SASARAN 19 :

MENINGKATNYA AKSES AIR BERSIH

Air bersih adalah air yang dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi dan melakukan aktifitas sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Ditinjau dari segi kualitas, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya kualitas fisik yang terdiri atas pH, kesadahan dan sebagainya serta kualitas biologi dimana air terbebas dari mikroorganisme yang menyebabkan terjadinya penyakit. Agar kelangsungan hidup manusia dapat berjalan lancar, air bersih harus tersedia dalam jumlah yang memadai sesuai dengan aktifitas manusia pada tempat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Akses Air Bersih* mendapatkan nilai capaiannya sebesar 99,55% dengan kategori berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.86 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Air Bersih

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian %	Target akhir
Cakupan pelayanan air bersih	Persen	78,55	82,78	87,60	94,25	90,43	95,95	100

Jumlah rumah di Purbalingga sebanyak 246.669 rumah. Pada tahun 2018, jumlah rumah yang terlayani air bersih sebanyak 223.161 rumah atau 90,43% dari seluruh rumah yang ada. Realisasi ini sudah mencapai 90,43% dari target akhir yang ditetapkan oleh RPJMD 2016 – 2021 sebesar seluruh rumah terlayani air bersih. Realisasi ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pelayanan air bersih di Purbalingga dilakukan oleh PDAM sebanyak 28.613 rumah, non PDAM sebanyak 92.362 rumah dan non perpipaan sebanyak 102.186 rumah. Total sambungan rumah pada tahun 2018 sebanyak 1.628 Sambungan Rumah (SR) terdiri dari :

1. Fasilitasi Pamsimas dengan alokasi kegiatan pada 9 wilayah kecamatan yang meliputi 20 desa dengan total sambungan sebanyak 809 SR;

Table 3.87 Lokasi Pamsimas di Kabupaten Purbalingga

No.	Kecamatan	Desa
1.	Bojongsari	- Banjaran - Kajongan - Beji
2.	Kutasari	- Karangjengkol
3.	Mrebet	- Mrebet - Lambur - Pagerandong - Serayu Larangan
4.	Padamara	- Kalitinggar - Prigi - Mipiran



No.	Kecamatan	Desa
5.	Bobotsari	- Dagan - Tlagayasa - Karangtalun
6.	Karanganyar	- Kabunderan
7.	Rembang	- Bodas - Makam - Panusupan
8.	Bukateja	- Kedungjati
9.	Karangmoncol	- Granting

Sumber: Dinrumkim Kabupaten Purbalingga, 2018

2. Hibah Air Minun Pedesaan berlokasi di 6 kecamatan yang meliputi 9 desa dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 484 SR;

Table 3.88 Hibah Air Minun Pedesaan di Kabupaten Purbalingga

No.	Kecamatan	Desa
1.	Mrebet	- Serayu Larangan - Bojong
2.	Karanganyar	- Darma
3.	Rembang	- Tanalum
4.	Kemangkon	- Kemangkon - Bokol
5.	Kutasari	- Karangcegak
6.	Karangreja	- Tlahab Kidul

Sumber: Dinrumkim Kabupaten Purbalingga, 2018

3. SIPAS yang berasal dari dana DAK tersebar di 8 wilayah kecamatan yang meliputi di 14 desa dengan total sambungan sebanyak 335 SR.

Table 3.89 SIPAS di Kabupaten Purbalingga

No.	Kecamatan	Desa
1.	Kejobong	- Langar - Kerenceng - Pangempon
2.	Kemangkon	- Pelumutan - Kalialang
3.	Pengadegan	- Karangjoho - Tumanggal
4.	Bukateja	- Karangcengis - Karangnangka
5.	Bojongsari	- Metenggeng
6.	Karangreja	- Tlahab Lor
7.	Karangmoncol	- Pepedan
8.	Rembang	- Wlahar - Sumampir

Sumber: Dinrumkim Kabupaten Purbalingga, 2018

Kendala yang dihadapi antara lain :

- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang terkendala medan yang sulit dijangkau;
- Kesulitan dalam mencari sumber air bersih dan terbatasnya debit air dari sumber mata air yang ada;
- Pengelolaan Pamsimas oleh masyarakat belum optimal.

Upaya yang dilakukan adalah :

- Memanfaatkan dan mengembangkan jaringan dari sumber mata air yang telah dibangun;
- Menggali sumber mata air baru yang dapat dimanfaatkan;
- Memetakan wilayah yang rawan yang kekeringan;
- Penguatan kelembagaan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat.

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Akses Air Bersih adalah :

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan
2. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Misi 7 :

“MEWUJUDKAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP”

SASARAN 20 :

TERKENDALINYA PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup* berdasarkan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mendapatkan nilai capaian sebesar 103,41% atau memenuhi target kinerja tahun 2018. Capaian kualitas lingkungan hidup pada tahun 2017 sebesar 43,6, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 66,70 atau naik sebesar 52,98% dari tahun sebelumnya. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.90 Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Capaian %	Target akhir
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	47,79	63,5	43,6	64,5	66,70	103,41	63,5

Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah :



1. Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter *TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform*,
2. Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : *SO₂* dan *NO₂*, dan
3. Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Analisis Indeks Kualitas Air sungai, Kualitas Udara Ambien, dan Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Purbalingga, masing-masing dengan bobot 30% untuk IKA, 30% untuk IKU, dan 40% untuk IKTL. Dengan nilai IKA sebesar 68, nilai IKU 82,1458, dan IKTL sebesar 54,15; maka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebesar 66,70 dengan klasifikasi Cukup Baik.

1. Kualitas Air Sungai

Kualitas air sungai merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air sungai seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut.

PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j.

Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan menetapkan titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan pada sungai-sungai potensial dan dianggap mewakili. Pengukuran tiap sampel dilakukan untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, *Fecal Coli* dan *Total Coliform*. Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PIj (indeks pencemaran) adalah sebagai berikut:

- a. IKA = 100, untuk $PIj \leq 1$,
- b. IKA = 80, untuk $PIj > 1$ dan $PIj \leq 4,67$
- c. IKA = 60, untuk $PIj > 4,67$ dan $PIj \leq 6,32$

- d. IKA = 40, untuk $P_{ij} > 6,32$ dan $P_{ij} \leq 6,88$
- e. IKA = 20, untuk $P_{ij} > 6,88$

Selanjutnya Nilai IKA setiap dihitung dari rata-rata IKA semua sampel dalam kabupaten tersebut.

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Purbalingga paling sedikit dilakukan dalam setahun untuk lima sungai berbeda (Sungai Gemuruh, Gintung, Gringsing, Klawing dan Pekacangan) dan pada tiga lokasi badan sungai (hulu, tengah, hilir) sehingga setidaknya ada 15 sampel (data) kualitas air sungai setiap tahunnya.

Tabel 3.91 Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kabupaten Purbalingga

No.	Nama Sungai	Hulu	Tengah	Hilir
1.	Sungai Gemuruh	1,84 (IKA = 80)	2,87 (IKA = 80)	1,54 (IKA = 80)
2.	Sungai Gintung	2,15 (IKA = 80)	2,35 (IKA = 80)	2,21 (IKA = 80)
3.	Sungai Gringsing	1,54 (IKA = 80)	1,66 (IKA = 80)	1,59 (IKA = 80)
4.	Sungai Klawing	1,97 (IKA = 80)	1,85 (IKA = 80)	2,29 (IKA = 80)
5.	Sungai Pekacangan	10,21 (IKA = 20)	10,21 (IKA = 20)	8,19 (IKA = 20)

Sumber: DLH Kabupaten Purbalingga, 2018

Indeks Kualitas Air Kabupaten Purbalingga, dari rata-rata IKA untuk 15 sampel pada tabel tersebut di atas diperoleh nilai sebesar 68. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain:

- a. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan pada beberapa sumber air;
- b. Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
- c. Penggunaan air;
- d. Serta tingkat erosi dan sedimentasi.

2. Kualitas Udara

Udara sebagai komponen lingkungan yang penting dalam kehidupan, perlu dipelihara kualitasnya sehingga tetap dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan makhluk hidup untuk hidup secara optimal. Namun akibat dampak



dari dinamika kehidupan manusia, pencemaran udara dapat dikatakan semakin menampakkan kondisi yang perlu mendapat perhatian.

Penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO dan SO. Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Penghitungan Indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives.

Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Purbalingga dilakukan sebanyak dua kali per tahun sehingga dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. Pada tahun 2018, lokasi yang ditetapkan titik pantau adalah Terminal Purbalingga, Perempatan Bukateja, Pertigaan Jompo, CV. Purbayasa, Perumahan Wirasana, Perumahan Abdi Kencana, Perempatan Sirongge, dan Pasar Segamas.

Adapun hasil perhitungan rata-rata Indeks Pencemaran Udara (IPU) untuk parameter SO₂ dan NO₂ di 8 (delapan) titik pantau adalah 8,3475 untuk SO₂ dan 17,015 untuk NO₂. Jika dikonversikan, maka nilai Indeks Kualitas Udara adalah sebesar 82,1458.

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

3. Tutupan Lahan

Tutupan lahan dapat diartikan sebagai luasan lahan yang belum atau tidak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan masyarakat secara intensif. Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Bentuknya dapat berupa hutan perkebunan, pekarangan dan sejenisnya.



Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Disamping tutupan hutan, parameter aspek lahan didasarkan juga pada tipe tutupan lahan lain dengan pertimbangan aspek konservasi karakteristik wilayah dan upaya rehabilitasi.

Nilai persentase tutupan hutan Kabupaten Purbalingga berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 34,82% yang dihitung berdasarkan luas hutan berbanding luas wilayah administratif kabupaten purbalingga.

Maka Nilai IKTL Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil perhitungan adalah sebesar 54,15. Nilai IKTL dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang, dan alih fungsi lahan.

Ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuang sampah rumah tangga dan limbah industri ke sungai serta
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan lahan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kualitas udara
- d. Kurangnya regulasi adat/local wisdom dalam pengelolaan sungai. Misalnya perdes tentang pengelolaan sungai.
- e. Kurangnya kerjasama masyarakat, pihak swasta dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sungai, beban pengelolaan lebih banyak diserahkan kepada pemerintah daerah.
- f. Minimnya pemahaman dari sisi pemerintah terhadap teknologi pengendalian pencemaran udara yang efektif dan efisien.
- g. Meningkatnya aktifitas pembangunan di Kabupaten Purbalingga yang kurang memperhatikan konservasi lahan.
- h. Pengambilan sampel untuk pengujian kualitas air dan udara yang belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kualitas air/udara di Kabupaten Purbalingga.



- i. Regulasi dalam hal penilaian Kualitas Tutupan lahan yang sering berubah, ditambah data tutupan lahan yang masih minim dianggap masih kurang menggambarkan kondisi tutupan lahan yang riil di Kabupaten Purbalingga.

Berikut alternatif solusi kedepan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain :

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi beban pencemaran udara dalam bentuk penggunaan BBM yang ramah lingkungan serta melaksanakan uji emisi kendaraan secara rutin
- b. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha untuk mengendalikan emisi cerobong pabrik serta memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran.
- c. Meningkatkan kemampuan petugas pemantau lapangan dengan pendidikan dan pelatihan tentang teknologi pengendalian pencemaran udara yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola sungai sebagai aset kehidupan masyarakat.
- e. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan pengelolaan limbah serta memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran.
- f. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan sungai antara masyarakat, pihak swasta dengan pemerintah daerah.
- g. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha tentang pentingnya pemanfaatan lahan karena keberadaannya sebagai daya dukung kehidupan manusia.
- h. Perlu adanya arahan upaya konservasi lahan sehingga terwujud proses pembangunan berwawasan lingkungan/berkelanjutan.
- i. Diperlukan adanya sistem pengawasan dan penegakkan aturan terkait pemanfaatan lahan; dan
- j. Dalam perencanaan RTRW Kabupaten Purbalingga untuk memperhatikan perbaikan kualitas tutupan lahan dan tetap menjaga agar tutupan hutan dan lahan masih tetap luas.



Upaya perbaikan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, antara lain melalui

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku;
- b. Pembinaan kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai;
- c. Penyediaan IPAL komunal untuk membantu pengolahan limbah domestik;
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.
- e. menambah jumlah sampel kualitas air dan udara yang dianggap cukup mewakili dan merepresentasikan kualitas air dan udara di kabupaten Purbalingga
- f. pengendalian pencemaran air dan udara.
- g. adanya kepastian regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar nilai kualitas tutupan lahan menggambarkan kondisi riil di Kabupaten Purbalingga. Sehingga diharapkan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat menjadi indikator dalam hal perumusan kebijakan, serta untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Program yang mendukung Sasaran Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
- d. Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penggunaan biaya guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 terdapat dalam tabel berikut :



Tabel 3.92 Realisasi Anggaran

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
MISI 1 <i>MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFISIEN, EFEKTIF, BERSIH DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT</i>				
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	112,688,907,000	98,682,087,619	87.57
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3,391,946,000	3,347,398,495	98.69
	Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	123,960,000	108,116,200	87.22
	Program Pengelolaan Persandian	66,000,000	65,996,400	99.99
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi	1,922,360,000	1,904,077,723	99.05
	Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1,663,865,000	1,559,519,220	93.73
	Program Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan	2,089,751,000	1,891,133,121	90.50
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2,496,832,000	1,982,526,434	79.40
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,032,362,000	900,341,088	87.21
	Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,898,113,000	2,027,960,263	69.98
	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	1,301,884,000	1,013,478,290	77.85



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
	Program Fasilitas dan Pengembangan Kepegawaian Daerah	4,537,243,000	3,501,914,587	77.18
	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2,007,375,000	1,851,773,016	92.25
	Program Pengelolaan Arsip	507,000,000	506,651,600	99.93
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	27,022,469,000	25,025,877,497	92.61
	Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	24,026,553,000	19,622,481,201	81.67
MISI 2 MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KE HADIRAT ALLAH SWT SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN RASA AMAN DAN TENTRAM DALAM MASYARAKAT YANG BERDASAR PADA REALITAS KEHIDUPAN				
Meningkatnya Paham Kebangsaan	Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3,206,290,000	2,973,304,974	92.73
	Program Fasilitas dan Pembinaan Sosial Politik	750,527,000	720,643,320	96.02
Meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perbup	Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	3,571,654,000	3,377,271,061	94.56
Terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat	Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	137,000,000	126,941,000	92.66
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda	923,970,000	808,229,288	87.47



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
Tertanganinya Korban Bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	889,660,000	732,820,310	82.37
	Program Penanggulangan Bencana	2,575,821,000	2,060,009,409	79.97
	Program Fasilitasi, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Bencana	50,000,000	39,753,600	79.51
MISI 3 <i>MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MANUSIA UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK</i>				
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	3,120,100,000	3,079,802,793	98.71
	Program Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	212,000,000	202,856,325	95.69
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	956,008,000	949,106,650	99.28
	Program Pengembangan Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan	220,000,000	218,247,000	99.20
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	95,000,000	94,995,000	99.99
	Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	5,689,202,000	4,782,999,810	84.07
	Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura	314,250,000	283,386,800	90.18
	Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan	274,250,000	271,386,000	98.96
	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair	253,940,000	243,049,628	95.71



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
	Program Pengembangan Budidaya Peternakan	211,799,000	211,799,000	100.00
	Program Pengembangan, Pengolahan, dan Pemasaran Produk Peternakan	208,995,000	208,942,000	99.97
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	1,796,460,000	1,711,879,163	95.29
Ketersediaan rumah	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman	17,936,680,000	12,356,337,036	68.89
MISI 4 <i>MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT</i>				
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Program Pendidikan Usia Dini	601,972,000	588,833,900	97.82
	Program Wajar Dikdas 9 Tahun	107,514,319,000	102,992,803,186	95.79
	Program Fasilitasi Akses Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi	417,000,000	0	0.00
	Program Pendidikan Non Formal	1,214,500,000	1,122,287,837	92.41
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	995,256,000	737,427,469	74.09
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25,126,702,000	24,467,665,929	97.38
	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah	7,274,424,000	6,884,489,178	94.64
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	251,002,000	218,376,000	87.00



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Farmasi	3,789,986,000	3,704,494,668	97.74
	Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia Lanjut	140,000,000	130,414,500	93.15
	Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	15,291,792,000	13,153,839,782	86.02
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Kesehatan Matra	1,583,777,000	1,493,014,246	94.27
	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	17,094,875,000	16,172,267,178	94.60
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan	29,045,467,000	24,412,875,800	84.05
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,321,671,000	1,317,885,390	99.71
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	35,000,000	34,500,000	98.57
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	500,270,000	467,268,482	93.40
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	151,673,457,000	147,587,568,338	97.31
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	1,963,215,000	1,809,146,422	92.15
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Program Pemberdayaan Keluarga	1,838,575,000	1,835,169,000	99.81
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	614,682,000	607,531,500	98.84



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
	Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	614,682,000	607,531,500	98.84
Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB	106,000,000	105,984,000	99.98
	Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB	4,436,595,000	3,557,747,688	80.19
	Program Pengendalian Penduduk	160,000,000	156,095,000	97.56
MISI 5 <i>MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI RAKYAT, DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, INDUSTRI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA</i>				
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, berkurangnya angka pengangguran, serta terkendalnya angka inflasi	Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja	2,264,737,000	2,193,900,070	96.87
	Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	360,000,000	352,495,750	97.92
	Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan	2,573,135,000	2,486,670,850	96.64
	Program Penumbuhan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi	424,085,000	413,127,902	97.42



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
	Program Pengembangan, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk UMKM	804,479,000	786,941,973	97.82
	Program Kemitraan, Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	1,046,845,000	932,972,478	89.12
	Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi	440,000,000	400,838,379	91.10
	Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu	272,500,000	224,572,500	82.41
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	1,188,629,000	1,082,630,600	91.08
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	517,000,000	488,568,096	94.50
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana & Prasarana Perdagangan	13,477,077,000	12,290,205,689	91.19
	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	24,831,300,000	2,607,121,516	10.50
	Program Ketransmigrasian	225,625,000	197,698,064	87.62
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3,628,881,000	3,501,113,483	96.48
	Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	2,003,425,000	1,854,188,885	92.55
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Wisata	550,161,000	390,725,701	71.02
	Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2,507,740,000	2,471,991,941	98.57



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	553,439,000	551,613,500	99.67
MISI 6 MEWUJUDKAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG SEHAT DAN MENARIK UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MELALUI GERAKAN MASYARAKAT, YANG DIDUKUNG DENGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR/ SARANA PRASARANA KEWILAYAHAN YANG MEMADAI				
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	1,796,460,000	1,711,879,163	95.29
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman	17,936,680,000	12,356,337,036	68.89
Meningkatnya kualitas desa.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	1,665,513,000	1,295,218,842	77.77
	Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat	606,097,000	492,723,420	81.29
Ketersediaannya air permukaan untuk pertanian pada jaringan irigasi primer dan sekunder	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan	12,038,244,000	10,090,873,815	83.82
Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang,	Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	848,559,000	776,799,300	91.54
	Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	336,434,000	336,433,500	100.00
	Program Catur Tertib Pertanahan	21,151,955,000	10,396,935,199	49.15



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan	18,455,178,000	16,342,020,343	88.55
	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	143,759,586,000	128,986,039,319	89.72
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	15,763,557,000	15,578,653,017	98.83
	Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	19,542,790,000	8,868,008,505	45.38
Meningkatnya akses air bersih	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan	4,541,135,000	4,122,682,479	90.79
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	2,005,953,000	1,978,320,930	98.62
	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	305,000,000	274,744,200	90.08
	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	382,000,000	269,171,000	70.46
	Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	9,010,590,000	7,631,680,974	84.70



Tabel 3.93 Analisis Efisiensi per Misi Tahun 2018

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE	% Capaian Kinerja	Keterangan
MISI 1 <i>MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFISIEN, EFEKTIF, BERSIH DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT</i>					
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	187,776,620,000,00	163,991,332,754,00	87,33	99,30	EFISIEN
MISI 2 <i>MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KE HADIRAT ALLAH SWT SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN RASA AMAN DAN TENTRAM DALAM MASYARAKAT YANG BERDASAR PADA REALITAS KEHIDUPAN</i>					
Meningkatnya Paham Kebangsaan	3,956,817,000,00	3,693,948,294,00	93,36	83,95	TIDAK EFISIEN
Meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perbup	3,571,654,000,00	3,377,271,061,00	94,56	104,17	EFISIEN
Terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat	1,060,970,000,00	935,170,288,00	88,14	196,08	EFISIEN
Tertanganinya Korban Bencana	3,515,481,000,00	2,832,583,319,00	80,57	215,22	EFISIEN



SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE	% Capaian Kinerja	Keterangan
MISI 3 <i>MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MANUSIA UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK</i>					
Meningkatnya Ketahanan Pangan	11,555,544,000.00	10,546,517,006.00	91.27	99,63	EFISIEN
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1,796,460,000.00	1,711,879,163.00	95.29	93,65	TIDAK EFISIEN
Ketersediaan rumah	17,936,680,000.00	12,356,337,036.00	68.89	91,63	EFISIEN
MISI 4 <i>MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT</i>					
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	143,395,175,000.00	137,011,883,499.00	95.54	95,40	TIDAK EFISIEN
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	222,439,510,000.00	210,283,274,806.00	94.54	99,73	EFISIEN
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	3,067,939,000.00	3,050,232,000.00	99.42	100,50	EFISIEN
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	4,702,595,000.00	3,819,826,688.00	81.22	113,07	EFISIEN



SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE	% Capaian Kinerja	Keterangan
MISI 5 <i>MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI RAKYAT, DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, INDUSTRI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA</i>					
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, berkurangnya angka pengangguran, serta terkendalinya angka inflasi	57,669,058,000.00	33,227,377,377.00	57.62	112.16	EFISIEN
MISI 6 <i>MEWUJUDKAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG SEHAT DAN MENARIK UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MELALUI GERAKAN MASYARAKAT, YANG DIDUKUNG DENGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR/ SARANA PRASARANA KEWILAYAHAN YANG MEMADAI</i>					
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1,796,460,000.00	1,711,879,163.00	95.29	240.74	EFISIEN
Meningkatnya kualitas desa.	2,271,610,000.00	1,787,942,262.00	78.70	128.28	EFISIEN
Ketersediaannya air permukaan untuk pertanian pada jaringan irigasi primer dan sekunder	12,038,244,000.00	10,090,873,815.00	83.82	128.28	EFISIEN



SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE	% Capaian Kinerja	Keterangan
Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang,	22,336,948,000.00	11,510,167,999.00	51.53	89,88	EFISIEN
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	197,521,111,000.00	169,774,721,184.00	85.95	109,81	EFISIEN
Meningkatnya akses air bersih	4,541,135,000.00	4,122,682,479.00	90.79	95,95	EFISIEN
MISI 7 MEWUJUDKAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP					
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	11,703,543,000.00	10,153,917,104.00	86.76	103,41	EFISIEN



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama tahun 2018 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2016-2021 dan telah memenuhi 20 (dua puluh) sasaran strategis sesuai dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/299 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 060/ 331 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat dinyatakan sangat berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 110,42%. Sehingga dari 20 indikator sasaran strategis yang diukur capaian kinerjanya, ada 8 indikator kinerja sasaran strategis atau 40% telah mencapai kategori sangat berhasil, 12 indikator kinerja sasaran strategis atau 60% telah mencapai kategori berhasil. Adapun simpulan atas rata – rata capaian sasaran strategis dapat disajikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis "Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" sebesar 99,30% ;
2. Sasaran Strategis "Meningkatnya Paham Kebangsaan" sebesar 83,95% ;



3. Sasaran Strategis "Meningkatnya Ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati" sebesar 104,17% ;
4. Sasaran Strategis "Terwujudnya Rasa Aman dan Tenram dalam Masyarakat" sebesar 196,08% ;
5. Sasaran Strategis "Tertanganinya Korban Bencana" sebesar 215,22% ;
6. Sasaran Strategis "Meningkatnya Ketahanan Pangan" sebesar 99,63% ;
7. Sasaran Strategis "Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni" sebesar 93,65% ;
8. Sasaran Strategis "Ketersediaan Rumah" sebesar 91,63% ;
9. Sasaran Strategis "Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat" sebesar 95,40%;
10. Sasaran Strategis "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat" sebesar 99,73%;
11. Sasaran Strategis " Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat" sebesar 100,50%;
12. Sasaran Strategis "Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk" sebesar 113,07%
13. Sasaran Strategis "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi, Berkurangnya Angka Pengangguran, serta Terkendalnya Angka Inflasi" sebesar 112,16%
14. Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman" sebesar 240,74%
15. Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Desa" sebesar 128,28%
16. Sasaran Strategis "Ketersediaan Air Permukaan Untuk Pertanian Pada Jaringan Irigasi Primer Dan Sekunder" sebesar 163,61%
17. Sasaran Strategis "Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang" sebesar 89,88%
18. Sasaran Strategis "Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektifitas Wilayah" sebesar 109,81%
19. Sasaran Strategis "Meningkatnya Akses Air Bersih" sebesar 95,95%
20. Sasaran Strategis "Terkendalnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup" sebesar 103,41%



Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata – rata capaian kinerja sasaran, disimpulkan bahwa dari 20 sasaran, sebagian besar menggunakan sumber daya dengan efisien.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap tujuan dan indikator kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Namun demikian masih ditemui adanya permasalahan/kendala dalam pencapaian target antara lain :

- a. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" belum sepenuhnya didukung implementasi manajemen berbasis kinerja oleh seluruh Pimpinan Perangkat Daerah maupun jajaran di bawahnya, sehingga pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada hasil/*outcome*;
- b. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Paham Kebangsaan" masih terkendala oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dinamika serta proses politik yang terjadi, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan cenderung apatis terhadap politik atau Pemilu, serta belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula;
- c. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah" masih belum optimal dalam mewujudkan sinergitas/kerjasama antar Perangkat Daerah dalam penanganan Trantibum maupun antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan instansi terkait, antara lain Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Purbalingga berkenaan dengan tindak pelanggaran operasi yustisi;



- d. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Terwujudnya Rasa Aman dan Tentram dalam Masyarakat" masih terkendala oleh faktor pendidikan masyarakat yang rendah serta kesenjangan sosial yang masih cukup tinggi;
- e. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Tertanganinya Korban Bencana" masih terkendala khususnya dalam penanganan bencana kebakaran, yang antara lain disebabkan oleh belum ada pemetaan daerah rawan kebakaran serta belum terpenuhinya cakupan pelayanan bencana kebakaran (Pos Wilayah Manajemen Kebakaran) dengan tingkat waktu tanggap (segera dan cepat 7,5 km ditempuh dalam waktu 15 menit) ;
- f. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Ketahanan Pangan" masih terkendala oleh faktor sosial ekonomi, berdasarkan hasil survei BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, bahwa 40 persen kelompok pengeluaran terbawah masyarakat Purbalingga baru memenuhi rata-rata kalori per kapita sebesar 1.742,37 kkal. Angka ini masih berada di bawah angka kecukupan kalori berdasarkan pada batas standar kecukupan kalori.
- g. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni" masih terkendala oleh faktor sosial yaitu tingkat gotong royong sebagian masyarakat yang menurun sehingga kesulitan untuk mencari tenaga kerja.
- h. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat" masih terkendala oleh faktor sosial ekonomi antara lain tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, sehingga berpengaruh pada pola pikir masyarakat yang hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang SD/ Sederajat atau SMP/ Sederajat saja, kemudian anak-anak usia sekolah diharuskan bekerja untuk meringankan beban orang tua.
- i. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat" sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sehingga menjadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya berbagai masalah kesehatan masyarakat.
- j. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat" yaitu masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan



- keluarga dalam meningkatkan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.
- k. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk" terkendala oleh masih tingginya angka Usia Kawin Pertama (UKP), rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengatur kelahiran dengan memakai alat kontrasepsi terutama Metode KB Jangka Panjang (MKJP) dan masih tingginya angka *drop out* pemakaian alat kontrasepsi.
 - l. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi, Berkurangnya Angka Pengangguran, serta Terkendalnya Angka Inflasi" yaitu masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran, terbatasnya lapangan kerja khususnya yang menampung tenaga kerja laki-laki sehingga harus didukung dari sektor yang lain seperti investasi, pariwisata, pendidikan dan lainnya, tidak cukup hanya dari sisi pelatihan dan penempatan kerja. Adapun penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga sudah cukup bagus namun penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar 13,01% dan Nasional 10,12%.
 - m. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman" masih perlu adanya peningkatan keterpaduan antara pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya terutama dalam kebijakan, program, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman, khususnya dalam upaya pencegahan timbulnya kawasan kumuh yang masih berpotensi muncul di lingkungan kawasan perkotaan.
 - n. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Desa" dipandang perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan serta maupun berswadaya guna mendukung program-program pemberdayaan pembangunan di wilayah desanya, dan belum tersinerginya pengembangan wilayah perdesaan dengan Perangkat Daerah terkait, khususnya yang menangani infrastruktur, pengembangan ekonomi, pengembangan pertanian, pemasaran produk dan lain-lain, serta masih



rendahnya komitmen Pemerintah Desa untuk mengembangkan inovasi baru dalam rangka mengelola potensi desa.

- o. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Ketersediaan Air Permukaan untuk Pertanian pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder" masih sering terkendala oleh fluktuasi ketersediaan jumlah air yang dipengaruhi oleh cuaca, perilaku petani dalam memandang air yang masih bersifat sosial (bebas), Perilaku petani dalam mengelola sarana dan prasarana irigasi masih minim (rasa memiliki sangatlah kurang), serta SDM petani yang masih rendah, sebagian besar petani di Kabupaten Purbalingga kurang kerjasama dalam pengelolaan irigasi.
- p. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang" masih terkendala oleh proses revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, serta belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Bobotsari.
- q. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektifitas Wilayah" masih terkendala kondisi geografis Kabupaten Purbalingga yang sebagian wilayah memiliki struktur tanah yang tidak stabil, mengakibatkan tanah mudah bergerak. Selanjutnya dalam proses pemeliharaan juga seringkali terkendala oleh faktor teknis seperti meningkatnya volume dan beban kendaraan, kondisi drainase yang tidak sempurna, serta beberapa permasalahan sosial seperti kurangnya kerjasama dari warga masyarakat yang terdampak pemeliharaan/peningkatan kapasitas jalan/jembatan.
- r. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Akses Air Bersih" masih terkendala diantaranya karena lokasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang sulit dijangkau, kesulitan mencari sumber air bersih dan terbatasnya debit air dari sumber mata air yang ada, serta dalam pengelolaan Pamsimas oleh masyarakat belum optimal.



- s. Dalam rangka mencapai sasaran strategis "Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup" masih terkendala oleh perilaku masyarakat, swasta dan pelaku usaha yang masih kurang peduli terhadap lingkungan.

C. LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA
Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui arah kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2020 memfokuskan pada upaya "Peningkatan Pelayanan Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" dengan disusun 5 prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
2. Peningkatan Pembangunan Manusia
3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok
4. Tata Kelola Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Adapun fokus program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, fokus pada :
 - a. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja;
 - b. Peningkatan jumlah destinasi wisata dan kualitas atraksi, serta peningkatan sarana prasarana amenities (hotel, homestay, rumah makan, restoran, toko cenderamata, fasum/sarana ibadah, kesehatan, dll);
 - c. Pengembangan dan pembinaan desa wisata;
 - d. Revitalisasi pasar-pasar tradisional dan penyediaan sentra PKL;
 - e. Introduksi teknologi dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah, terutama yang berbahan baku lokal;
 - f. Peningkatan manajemen, pengembangan dan pengawasan koperasi;
 - g. Peningkatan manajemen dan jejaring usaha bagi usaha mikro;
 - h. Introduksi teknik dan teknologi budi daya pertanian yang unggul dan pengembangan hortikultura / buah - buahan untuk substitusi impor;
 - i. Penerapan teknologi budidaya, pakan dan genetik ternak;



j. Peningkatan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat;

OPD yang membidangi antara lain : Dinpertan, Dinperindag, Dinkop UKM, DKPP, Dinporapar, DPMPTSP, Dinnaker, Dinpermasdes.

2. Peningkatan Pembangunan Manusia, fokus pada :

- a. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan dari sisi sarana prasarana, pembiayaan, tenaga pendidik dan kependidikan, serta penguatan manajemen pendidikan;
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dari sisi sarana prasarana, pembiayaan, tenaga kesehatan, serta penguatan manajemen kesehatan;
- c. Peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta pengendalian penduduk;
- d. Pembinaan perpustakaan dan pengembangan perpustakaan digital;
- e. Fasilitasi pementasan, pengiriman dan pelestarian seni budaya daerah;
- f. Peningkatan fasilitasi dan pengembangan even kepemudaan, serta peningkatan kompetisi olahraga prestasi;
- g. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial.

OPD yang membidangi antara lain: Dinkes, Dindikbud, DINSOSDALDUKKBP3A, Dinpendukcapil, Dinporapar, Dinarspus.

3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok, fokus pada:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok pangan utama bagi masyarakat;
- b. Penyediaan rumah layak huni antara lain melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni dan fasilitasi pembangunan perumahan swadaya;
- c. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi menuju target *Universal Access*.

OPD yang membidangi : DKPP, Dinrumkim, Dinkes



4. Tata Kelola Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, fokus pada:
 - a. Peningkatan pelayanan publik dan peningkatan keterbukaan informasi publik;
 - b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi;
 - c. Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
 - d. Meningkatkan pengawasan melalui penguatan kapabilitas APIP dan SPIP;
 - e. Meningkatkan pengendalian produk hukum dan penegakkan perda;
 - f. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin dan penataan ASN;
 - g. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja dan peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya *clean and clear government*;
 - h. Peningkatan wawasan kebangsaan dan kehidupan beragama melalui ketahanan ideologi Pancasila, semangat nasionalisme dan patriotisme, pencegahan intoleransi umat beragama, radikalisme, terorisme, *hate speech* dan *hoax news* dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kondusifitas wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - i. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusifitas wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - j. Peningkatan dan optimalisasi penanganan narkoba, konflik sosial dan horizontal;
 - k. Peningkatan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana, melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi risiko bencana dan menurunnya kerentanan bencana alam.

OPD yang membidangi antara lain : Setda, BKPPD, Inspektorat Daerah, Dinpendukcapil, DPMPTSP, Satpol PP, Kantor Kesbangpol, BPBD, Bappelifbangda, Dinpermasdes, Setwan, Bakeuda dan Dinkominfo.

5. Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup, dengan fokus :
- a. Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur serta cakupan layanan permukiman (air bersih, persampahan, drainase dan ruang publik);
 - b. Peningkatan kualitas prasarana pemerintahan;
 - c. Peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan;
 - d. Penyelesaian pembangunan infrastruktur;
 - e. Penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah.

OPD yang membidangi antara lain DPU-PR, Dinrumkim, Dinhub, Dinkominfo dan DLH.

Selanjutnya, guna mendukung tercapainya target kinerja sebagaimana telah diperjanjikan, masih perlu adanya upaya perbaikan dengan melaksanakan :

- a. Pembangunan sistem pengumpulan data kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja secara berkala.

Demikian Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 ini disusun sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga di masa-masa mendatang.

Pt. BUPATI PURBALINGGA,
WAKIL BUPATI



DYAH HAYUNING PRATIWI, SE.,B.Econ., M.M.